



Badan Layanan Umum

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN



www.blupmukp.id



BLU LPMUKP



@blupmukp

KATA PENGANTAR

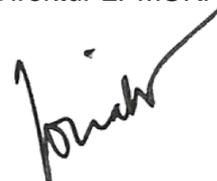
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan Satuan Kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016, ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. LPMUKP bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengelolaan dana bergulir pada tahun 2023, LPMUKP sesuai dengan tugasnya akan memberikan layanan pinjaman atau pembiayaan modal usaha yang berpendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP juga tidak terlepas dari tugasnya sebagai Satuan Kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuatlah Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai laporan yang memuat tentang capaian kinerja BLU LPMUKP selama Tahun Anggaran 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 18 Januari 2024

Direktur LPMUKP



I Nengah Putra Winata

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan pelaporan gambaran atas target kinerja yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP pada Tahun Anggaran 2023. Perjanjian kinerja kepada Sekretariat Jenderal KKP dijabarkan menjadi 12 Indikator Kinerja dengan satu sasaran kegiatan.

Capaian atas target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja LPMUKP kepada Setjen KKP berdasarkan Indikator Kinerja Utama dilihat dari realisasi persentase pencapaian dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi PNBP BLU

Target realisasi PNBP Layanan BLU pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp30 Miliar dengan realisasi capaian sebesar Rp22 Miliar sehingga persentase capaian kinerja dari IKU ini adalah sebesar 73,40%.

2. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Target realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1,10 Triliun dengan realisasi sebesar Rp998,51 Miliar sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 90,77%.

3. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Target dari IKU rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah maksimal 3% dengan realisasi capaian sebesar 7,33% sehingga apabila mangacu pada manual IKU yang tersedia maka persentase capaian dari IKU ini adalah sebesar 50%.

4. Modernisasi BLU

Target realisasi modernisasi BLU Tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 50,8% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 50,8%.

5. Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP

Target Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP Tahun 2023 adalah sebesar 80 dengan realisasi sebesar 88,5 sehingga capaian realisasi atas target tersebut adalah sebesar 110,63%.

6. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha

Target Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha Tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan realisasi sebesar 87,43% sehingga capaian realisasi atas target adalah sebesar 109,29%.

7. Nilai PM SAKIP LPMUKP

Target nilai PM SAKIP LPMUKP Tahun 2023 adalah sebesar 80,5 dengan realisasi capaian sebesar 74,60 sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 92,67%.

8. Nilai Kinerja Anggaran BLU LPMUKP

Target Nilai Kinerja Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2023 adalah sebesar 82 dengan realisasi capaian sebesar 94,54 sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 115,29%.

9. Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Target Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2023 adalah sebesar 92 dengan realisasi capaian sebesar 108,33 sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 117,75%.

10. Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2022 lingkup BLU LPMUKP

Target Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2022 lingkup BLU LPMUKP adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 100% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 100%.

11. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Target Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2023 adalah sebesar 75 dengan realisasi capaian sebesar 96 sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 128%.

12. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

Target realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 90% dengan realisasi capaian sebesar 65,27% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 72,52%.

Selanjutnya, dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP terus meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagai suatu komitmen dalam melaksanakan program pengeleolaan dana bergulir dengan menyediakan pembiayaan atau pinjaman yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya sektor kelauran dan perikanan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP	4
1.5. Visi dan Misi LPMUKP	11
1.6. Tugas dan Fungsi LPMUKP	12
1.7. Budaya Organisasi	12
1.8. Potensi dan Permasalahan	14
1.9. Sistematika Penulisan Laporan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Kerja LPMUKP	16
2.2. Perjanjian Kinerja	21
2.3. Program dan Kegiatan	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja LPMUKP	26
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.3. Kinerja Keuangan	83
3.4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2023	87
BAB IV. PENUTUP	98

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP	4
2. Tabel 1.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP	7
3. Tabel 1.3 Klasifikasi SDM LPMUKP	10
4. Tabel 2.1 Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP	17
5. Tabel 2.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP	20
6. Tabel 2.3 Proyeksi Pendapatan LPMUKP Tahun 2023	21
7. Tabel 2.4 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2023.....	22
8. Tabel 3.1 Capaian IKU BLU LPMUKP Tahun 2023	27
9. Tabel 3.2 Rincian PNBPN BLU per Bulan	31
10. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian PNBPN.....	32
11. Tabel 3.4 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per Sektor Usaha	37
12. Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir....	38
13. Tabel 3.6 Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih	41
14. Tabel 3.7 Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih	42
15. Tabel 3.8 Profil Kolektibilitas Debitur LPMUKP Tahun 2023	43
16. Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	44
17. Tabel 3.10 Manual IKU RDBDT Tahun 2022	45
18. Tabel 3.11 Tahapan Modernisasi Pengelolaan BLU	46
19. Tabel 3.12 Perhitungan Realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU	49
20. Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Modernisasi BLU	50
21. Tabel 3.14 Indeks Kuantitatif dan Kualitatif dalam Pengukuran Nilai IKM	52
22. Tabel 3.15 Aspek, Nilai Hasil, Nilai Hasil Dikonversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	55
23. Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP.....	56
24. Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Realisasi Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha.....	62
25. Tabel 3.18 Sub Komponen Penilaian PM SAKIP	64
26. Tabel 3.19 Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal KKP .	65
27. Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP.....	67
28. Tabel 3.21 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal KKP	70
29. Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP.....	71
30. Tabel 3.23 Rincian Realisasi IKU MP berdasarkan Satuan Kerja lingkup Setjen periode Triwulan IV Tahun 2023.....	73

31. Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	74
32. Tabel 3.25 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat Jenderal	76
33. Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP	74
34. Tabel 3.27 Data Rekapitulasi Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023.....	78
35. Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	79
36. Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Unit Eselon II Lingkup Setjen Tahun 2023.....	81
37. Tabel 3.30 Realisasi Anggaran BLU LPMUKP Periode TW IV Tahun 2023....	81
38. Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP	82
39. Tabel 3.32 Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	86
40. Tabel 3.33 Daftar Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2023.....	88
41. Tabel 3.34 Pemberitaan BLU LPMUKP melalui Media <i>Online</i>	91
42. Tabel 3.35 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2023.....	96
43. Tabel 3.36 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2023.....	97

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMUKP	4
2. Gambar 1.3 Komposisi Pegawai LPMUKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	11
3. Gambar 3.1 <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Tahun 2023 LPMUKP pada aplikasi Kinerjaku	26
4. Gambar 3.2 Target PNBP Layanan Bulanan dan Kumulatif.....	30
5. Gambar 3.3 Realisasi PNBP Layanan Bulanan	31
6. Gambar 3.4 Proses Bisnis LPMUKP	35
7. Gambar 3.5 Target Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2023.....	36
8. Gambar 3.6 Dokumentasi Penyaluran Dana Bergulir 2023.....	38
9. Gambar 3.7 Realisasi Tahapan Modernisasi BLU	49
10. Gambar 3.8 Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Aspek Kepuasan dan Kepentingan	55
11. Gambar 3.9 Sebaran Responden Survey Peningkatan Usaha Debitur	60
12. Gambar 3.10 Proporsi Peningkatan Usaha Debitur	61
13. Gambar 3.11 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART ..	70
14. Gambar 3.12 Perkembangan Pendapatan PNBP BLU	84
15. Gambar 3.13 Perkembangan Anggaran dan Realisasi LPMUKP hingga Tahun 2023.....	85
16. Gambar 3.14 BLU LPMUKP dalam Sosial Media	89
17. Gambar 3.15 Tampilan <i>Website</i> LPMUKP	90

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 – Perjanjian Kinerja Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal (versi awal)
2. Lampiran 2 - Perjanjian Kinerja Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal (versi revisi November)
3. Lampiran 3 – Perjanjian Kinerja Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal (versi revisi Desember)
4. Lampiran 4 – Memorandum Hasil Perhitungan Capaian Persentase PNBPN Layanan BLU periode Triwulan IV Tahun 2023
5. Lampiran 5 – Memorandum Hasil Perhitungan Capaian Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2023
6. Lampiran 6 – Memorandum Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih
7. Lampiran 7 – Hasil Perhitungan Modernisasi BLU
8. Lampiran 8 – Ringkasan Hasil Survey Indeks Kepuasan Pemanfaat Layanan
9. Lampiran 9 – Rincian Debitur yang Disurvey dalam Penilaian Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan.
10. Lampiran 10 – Memorandum Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
11. Lampiran 11 – Memorandum Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023
12. Lampiran 12 – Memorandum Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
13. Lampiran 13 – Memorandum Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Tahun 2022
14. Lampiran 14 – Memorandum Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja periode Triwulan IV Tahun 2023
15. Lampiran 15 – Data Realisasi Anggaran LPMUKP Tahun 2023 dari aplikasi OM SPAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (termasuk dana bergulir) yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian pengaturan terkait Badan Layanan Umum (BLU) tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lemabga, dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Atas dasar hal tersebut, dibentuklah satuan kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai BLU dengan rumpun pengelolaan dana bergulir di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LPMUKP ditetapkan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum dengan status penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kemudian pada Tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan terkait struktur organisasi dan tata kelola BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan fungsi utama BLU LPMUKP sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 3 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang kemudian dilakukan melalui tiga skema penyaluran dana bergulir yaitu model penyaluran langsung kepada UMKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 4/PER-LPMUKP/2017, kemudian model penyaluran melalui LKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 3/PER-LPMUKP/2017 serta model penyaluran melalui LKB/LKBB lainnya.

BLU LPMUKP diberikan dana kelolaan pada Tahun 2017 sebesar Rp.500.000.000.000,00 yang kemudian dana kelolaan tersebut diberikan tambahan sebesar Rp.850.000.000.000,00 pada Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1.350.000.000.000,00. Sejak tahun pertamanya hingga akhir Desember 2022, dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, LPMUKP telah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat kelautan dan perikanan sebesar Rp1.005.846.548.490,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 26.078 jiwa. Dengan adanya program penyaluran dana bergulir yang dikhususkan untuk masyarakat kelautan dan perikanan, diharapkan mampu untuk mendongkrak ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan membiayai pelaku usaha yang bersifat *nonbankable* yang diberikan pendampingan selama menjadi debitur LPMUKP hingga pelaku usaha atau kelompok usaha tersebut menjadi bankable.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2023 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pelaporan kinerja dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai suatu wadah atau sarana untuk mengkomunikasikan/mempublikasikan capaian kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

1.3. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Sesuai pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara, LPMUKP perlu ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Untuk mendukung hal tersebut, pada tanggal 20 September 2016 LPMUKP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016. Melalui penetapan PPK BLU, diharapkan LPMUKP mampu menjalankan peran pemerintah sebagai salah satu solusi atas permasalahan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya alokasi dana kelolaan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola oleh LPMUKP tentu menuntut hadirnya tata kelola organisasi yang baik serta perencanaan bisnis dan penganggaran yang matang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti risiko operasional, hukum, kredit macet dan bermasalah serta risiko lainnya, di samping untuk memberikan pelayanan pinjaman atau pembiayaan yang optimal pada masyarakat kelautan dan perikanan. Seiring dengan perkembangan LPMUKP yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

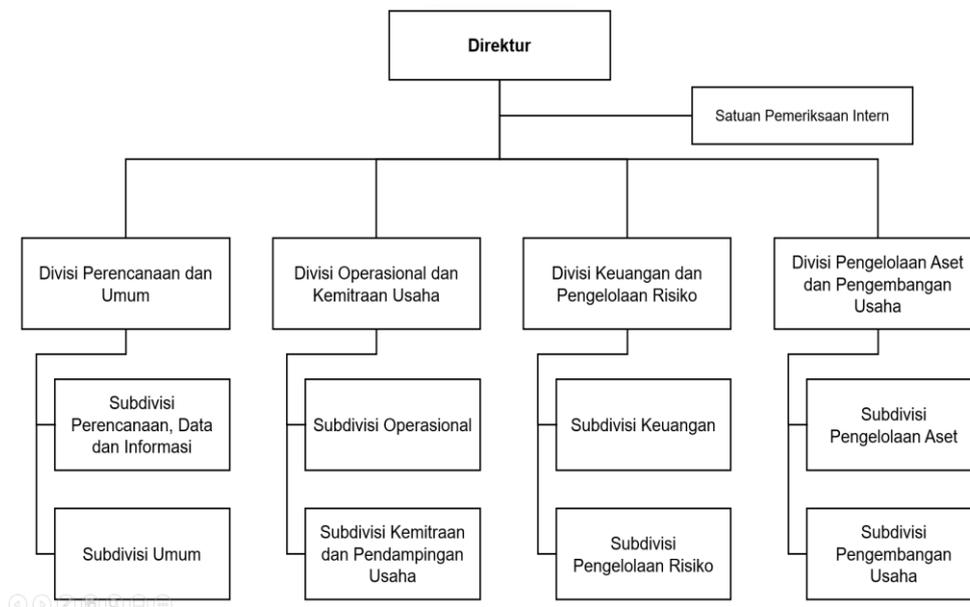
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP

1.4.1. Organisasi BLU LPMUKP

Penetapan BLU LPMUKP sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Adapun struktur organisasi BLU LPMUKP dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMUKP

A. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLU LPMUKP mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan BLU LPMUKP mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait operasional Satker LPMUKP. Untuk lebih jelasnya, susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP

No	Nama	Jabatan	Nomor SK
1.	Tony Sumantri	Ketua Dewan Pengawas	79/KEPMEN-KP/2023
2.	Setyawati	Anggota Dewan Pengawas	79/KEPMEN-KP/2023
3.	Ishartini	Anggota Dewan Pengawas	79/KEPMEN-KP/2023
4.	Heru Wibowo	Anggota Dewan Pengawas	79/KEPMEN-KP/2023
5.	Agus Hermawan	Anggota Dewan Pengawas	79/KEPMEN-KP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Paragraf 2 yang mengatur mengenai Dewan Pengawas, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU. Kewajiban, wewenang dan larangan Dewan Pengawas BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban Dewan Pengawas

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah di tindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan Dewan Pengawas

- a. memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- e. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
- h. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- j. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- k. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- l. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Larangan Dewan Pengawas

- a. melakukan tindakan yang kepentingan mempunyai benturan (*conflict of interest*) dan/ atau memanfaatkan pqsisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLU, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan;
- c. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLU atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLU; dan

- d. mengintervensi pelaksanaan dan/ atau ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BLU yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLU melebihi kewenangan Dewan Pengawas kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Pejabat Pengelola

Pejabat pengelola di lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan terdiri dari:

- a. Direktur selaku Pimpinan BLU LPMUKP;
- b. Pejabat Pengelola Teknis BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Perencanaan dan Umum, serta Divisi Operasional dan Kemitraan;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko;
- d. Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, susunan direksi dan manajemen BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP

NO	NAMA	POSISI	NOMOR SK
1.	I Nengah Putra Winata	Direktur	08/MEN-KP/KP.430/II/2022
2.	Agus Prasetyo	Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko	76/KEP-LPMUKP/2023
3.	Dicky Rachmanzah	Kepala Divisi Perencanaan dan Umum	1/KEP-LPMUKP/2024
4.	Darmawan Sidik	Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha	75/KEP-LPMUKP/2023

1) Direktur BLU LPMUKP

Direktur BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan BLU LPMUKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan BLU LPMUKP;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan Pelaporan keuangan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

2) Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP dalam pelaksanaannya mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BLU LPMUKP.

3) Divisi Perencanaan dan Umum

Divisi Perencanaan dan Umum BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan. Divisi Perencanaan dan Umum dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kajian pengelolaan dana; dan
- c. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

Divisi Perencanaan dan Umum dalam penyelenggaraannya terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a. Subdivisi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, serta pelaksanaan kajian pengelolaan dana.
- b. Subdivisi Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

4) Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana

kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kerja sama dengan stakeholders, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan stakeholders;
- d. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a. Subdivisi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Subdivisi Kemitraan dan Pendampingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan stakeholders, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan.

5) Divisi Keuangan dan Pengelola Risiko

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan keuangan, pelaksanaan transaksi, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penilaian kelayakan proposal pinjaman, dan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan;
- b. Pelaksanaan transaksi penyaluran dana;
- c. Pelaksanaan penyusunan sistem akuntansi dan laporan keuangan;

- d. Pelaksanaan pengembangan dana kelolaan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan penilaian kelayakan proposal pinjaman; dan
- f. Pelaksanaan pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a. Subdivisi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan, transaksi penyaluran dana, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, serta pengembangan dana kelolaan dan pendapatan.
- b. Subdivisi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kelayakan proposal pinjaman, pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

1.4.2. Sumber Daya Manusia BLU LPMUKP

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor determinan dalam sebuah organisasi. Kualitas SDM pada suatu organisasi sangat menentukan arah keberhasilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil kinerja yang optimal tentu menuntut adanya dukungan dan manajemen SDM yang prima.

Sebagaimana layaknya institusi yang bergerak di bidang finansial, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan dalam rangka persiapan operasional penyaluran dana bergulir, LPMUKP pada 31 Desember 2023 didukung oleh SDM sebanyak 270 orang dan dewan pengawas 5 orang. LPMUKP terus berusaha secara optimal untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan, dalam rangka tetap memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional, produktif, efektif, dan efisien serta akuntabel guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir. Secara rinci, klasifikasi sumber daya manusia pada LPMUKP dapat dilihat pada **Tabel 1.3** sebagai berikut.

Tabel 1.3. Profil SDM LPMUKP Tahun 2023

No	Status Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Kontrak	204	75,56%
2	Pegawai Tetap Non PNS	61	22,59%
3	PNS	5	1,85%
Total		270	100%

No	Jabatan	Jumlah
1	Direktur	1
2	Kepala SPI	1
3	Kadiv	2
4	Kasubdiv	4
5	Staf	262
Total		299

No	Agama	Jumlah
1	Hindu	7
	Laki-Laki	6
	Perempuan	1
2	Islam	229
	Laki-Laki	161
	Perempuan	68
3	Katolik	11
	Laki-Laki	9
	Perempuan	2
4	Kristen	23
	Laki-Laki	18
	Perempuan	5
Total		270

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	194	71,85%
2	Perempuan	76	28,15%
Total		270	100%

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	16	5,93%
2	S1	201	74,44%
3	D4	42	15,56%
4	D3	7	2,59%
5	SMA	4	1,48%
Total		270	100%

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	65	24,07%
2	31-40	137	50,74%
3	41-50	55	20,37%
4	>50	13	4,81%
Total		270	100%

1.5. Visi dan Misi LPMUKP

A. Visi

Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan dalam visi tersebut, maka LPMUKP mempunyai misi:

- a. Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat;

- b. Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan;
- d. Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.

1.6. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

1.7. Budaya Organisasi

LPMUKP menerapkan prinsip-prinsip yang senantiasa dijalankan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menjadi budaya yang melekat pada setiap elemen LPMUKP. Hal ini bertujuan agar LPMUKP dapat mencapai kinerja terbaik dan memenuhi ekspektasi yang ada. Prinsip-prinsip dalam tata kelola LPMUKP adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

LPMUKP menerapkan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi, keterbukaan dalam penyampaian informasi

yang jelas, tepat waktu dan diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan serta keterbukaan dalam pengelolaan yang relevan dengan organisasi.

2. Akuntabilitas

LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada LPMUKP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan program pelayanan publik namun juga meliputi akuntabilitas baik dari aspek kegiatan maupun aspek keuangan LPMUKP.

3. Responsibilitas

Pengelola organisasi LPMUKP harus senantiasa memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat. LPMUKP juga menetapkan tugas dan kewenangan pengelola LPMUKP yang ada, baik melalui Tata Kelola LPMUKP maupun melalui penjabaran lebih lanjut dalam SOP, Juknis dan pengaturan lain yang ada. Seluruh elemen LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

4. Independensi

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai etika dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Adanya prinsip ini memberikan kesadaran kepada seluruh pegawai LPMUKP tentang asas *prudent dan proper* dalam pelaksanaan tugas.

5. Integritas

Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk mencapai hasil terbaik untuk organisasi melalui pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri, dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan program-program organisasi. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip kewajaran yang ditunjukkan dengan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* LPMUKP yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

LPMUKP dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pengelola dana bergulir yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan tentu perlu memetakan potensi yang dimiliki oleh BLU LPMUKP untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh BLU LPMUKP antara lain:

1. Ketersediaan dana kelolaan yang memadai untuk target penyaluran dana bergulir Tahun 2023;
2. Dukungan SDM LPMUKP sebagai *supporting* dalam pencapaian IKU lembaga;
3. Potensi pelaku usaha perikanan yang diperkuat dengan data potensi pelaku usaha yang bersumber dari *website* KUSUKA KKP;
4. Produk layanan LPMUKP dengan skema pembiayaan yang murah sebagai program pemberdayaan masyarakat melalui dukungan permodalan;
5. Felksibilitas pengelolaan anggaran yang bersumber dari PNBPN;

B. Permasalahan

Untuk mengoptimalkan kinerja LPMUKP, masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian di Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kesiapan dan pemahaman masyarakat yang memiliki usaha di sektor Kelautan dan Perikanan dalam menerima program penyaluran dana bergulir LPMUKP;
2. Terdapat kekurangan sumber daya manusia terutama di bidang teknologi informasi;
3. Terjadinya kegagalan pemenuhan kewajiban oleh debitur akibat kegagalan usaha yang dilakukan, dikarenakan perubahan iklim (*force majeure*), inflasi yang berdampak kepada harga bahan pokok produksi (BBM, pakan, bahan baku olahan), dan faktor lainnya;
4. Pembiayaan yang dibatasi untuk satu sektor usaha di sektor Kelautan dan Perikanan yang memiliki risiko usaha relatif tinggi, namun disatu sisi LPMUKP diwajibkan untuk mengikuti standar penilaian yang digunakan untuk lembaga keuangan pada umumnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi LPMUKP dalam memberdayakan masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui pembiayaan dana bergulir.

1.9. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menyajikan uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi LPMUKP termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKJ.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Menyajikan uraian perencanaan kinerja BLU LPMUKP dari sasaran strategis hingga arah dan kebijakan untuk BLU LPMUKP pada Tahun 2023.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menyajikan capaian indikator kinerja utama serta analisis kinerja LPMUKP Tahun 2023.
4. Bab IV Penutup
Menyajikan keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja utama serta upaya perbaikan kedepan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja LPMUKP

BLU LPMUKP merupakan Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710 Tahun 2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tugas BLU LPMUKP adalah melakukan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022.

Selanjutnya untuk mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP maka ditetapkan suatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang juga mengatur tentang tugas dan fungsi BLU LPMUKP sebagai Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung tugas utama tersebut, LPMUKP diberikan dana kelolaan oleh Kementerian Keuangan sebagai stimulus dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat. Dana kelolaan pertama LPMUKP diterima pada bulan Oktober 2017 dengan jumlah Rp.500 Miliar, kemudian LPMUKP mendapat dana kelolaan tambahan sebesar Rp.850 Miliar di bulan Oktober Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1,35 Triliun.

Tarif yang dikenakan dalam operasional penyaluran dana bergulir tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (**Tabel 2.1**):

Tabel 2.1. Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP

PROGRAM	URAIAN
<p>1. Pinjaman Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Konvensional)</p>	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pinjaman dana bergulir yang berpendampingan dari BLU LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola konvensional yang disalurkan secara langsung atau melalui LKM-KP/LKB/LKBB sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP langsung ke UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun. b. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP kepada LKM-KP/LKB/LKBB adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun. c. Tingkat suku bunga dari LKM-KP/LKB/LKBB kepada UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Paling tinggi 7% (tujuh persen) per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih rendah atau sama dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS); dan/atau 2) Paling tinggi $4\% + \left(\frac{IKK_i}{IKK_n}\right) \times 3\%$ per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS);
<p>2. Pembiayaan Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Syariah)</p>	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan dari LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. 2) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. 3) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. b. Nisbah pembiayaan <i>musyarakah</i> (pembiayaan bersama bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. c. Margin pembiayaan <i>murabahah</i> (pembiayaan jual beli) yang dikenakan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah kepada

PROGRAM	URAIAN
	<p>UMKM-KP persentase dari harga beli berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak;</p> <p>d. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah</i> (pembiayaan sewa) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</p> <p>e. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah mumtahiya bit-tamlik</i> (pembiayaan <i>leasing</i>) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</p> <p>f. Nilai <i>ujroh</i> biaya gadai dalam pembiayaan <i>rahn</i> (pembiayaan sistem gadai) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</p> <p>g. Pola syariah lainnya yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</p>
<p>3. Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir</p>	<p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir merupakan pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikenakan satu kali pada saat penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bentuk penggantian biaya provisi, administrasi, dan asuransi¹ yang timbul dari penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dengan menggunakan pola konvensional atau syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir sebagaimana dimaksud terdiri atas:</p> <p>a. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>b. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>c. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>d. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola</p>

PROGRAM	URAIAN
	<p>Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>e. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>f. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p>

A. Rencana Anggaran

LPMUKP merencanakan terkait anggaran setiap tahunnya, rencana anggaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka penyaluran dana bergulir. Tahun 2022 BLU LPMUKP tidak menerima anggaran rupiah murni dari Bagian Anggaran KKP (BA 032 KKP). Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran, LPMUKP menggunakan anggaran yang bersumber dari proyeksi pendapatan PNBPN BLU sebesar Rp57.174.996.000,00. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan yang berasal dari tarif bunga layanan serta provisi LPMUKP serta pengelolaan *idle cash* dari dana kelolaan yang tersedia.

Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target pengelolaan dana bergulir serta Indikator Kinerja yang diukur pada Tahun Anggaran 2023. Pada Indikator Kinerja yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan dana bergulir, LPMUKP memiliki IKU berupa realisasi PNBPN BLU, realisasi penyaluran dana bergulir, dan rasio dana bergulir diragukan tertagih. Sementara itu untuk Indikator Kinerja yang bersifat non layanan berupa modernisasi BLU, nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP, persentase penyelesaian temuan BPK, nilai kinerja anggaran LPMUKP, unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar, dan persentase realisasi anggaran LPMUKP.

Tabel 2.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Volume Satuan	Target (dalam Rp. ribu)
66056	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	IKU Program: 1. Persentase PNBP BLU 2. Persentase Penyaluran Dana Bergulir		
032.01.01	Program: Dukungan Manajemen		
6453	Kegiatan: Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	Indikator Kinerja Kegiatan: 1. Tersedianya Layanan Penyaluran Modal Usaha 2. Realisasi Pemanfaat Penerima Modal Usaha 3. Rasio Piutang Bermasalah Terhadap <i>Outstanding</i> Dana Bergulir		
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	5.964	11.273.112
	Belanja Barang:	Pemanfaat	
	-RM		-
	-BLU		11.273.112
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	1.998.042
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		-
	-BLU		1.998.042
6453.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	41.197.127
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		-
	-BLU		41.197.127
6453.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	19	295.000
	Belanja Modal:	Unit	
	-RM		
	-BLU		295.000
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4	2.411.715
	Belanja Barang:	Laporan	
	-RM		
	-BLU		2.411.715
TOTAL BELANJA LPMUKP			57.174.966

B. Target Kinerja Penyaluran

Pada tahun 2023 diharapkan LPMUKP mampu memenuhi target penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 660 Miliar dari asumsi total dana kelolaan yang belum tersalurkan. Dari dana kelolaan tersebut, diharapkan mampu diserap dan disalurkan melalui Mitra UMKM-KP. Pada tahun 2023, fokus penyaluran dana bergulir diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP seperti program perangkapan ikan terukurm dan kampung budi daya. Selain itu terdapat juga program retail. Selanjutnya, dengan penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan selain dapat memperkuat permodalan bagi Koperasi/LKM dan UKM, juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar perikanan, usaha garam rakyat serta usaha masyarakat pesisir lainnya.

C. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2023, diproyeksikan total pendapatan BLU LPMUKP yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran dana bergulir adalah sebesar Rp.60,94 Miliar. Proyeksi pendapatan tersebut merupakan total target pendapatan dana bergulir BLU. Rincian proyeksi pendapatan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3. Proyeksi Pendapatan LPMUKP Tahun 2023

PENDAPATAN LPMUKP	TARGET
Penerimaan RM	-
Pendapatan Jasa Layanan (BLU)	60.943.937.000
1. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	33.032.104.000
2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	9.562.500.000
3. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	18.349.333.000
4. Pendapatan Hibah BLU	-
5. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-
TOTAL	60.943.937.000

2.2. Perjanjian Kinerja

Setiap tahunnya BLU LPMUKP wajib menyusun dokumen *Key Performance Indicator* (KPI) yang berisi tentang target kinerja BLU LPMUKP dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Pembina Keuangan Badan Layanan Umum untuk dilakukan pembahasan terkait dengan target kinerja yang tertuang dalam dokumen usulan KPI dimaksud. Selain itu, LPMUKP juga menyusun perjanjian kinerja Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal dimana dalam perjanjian kinerja tersebut LPMUKP diberikan indikator kinerja khusus untuk menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik untuk dukungan manajemen.

Pada Tahun Anggaran 2023, terjadi beberapa penyesuaian pada perjanjian kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP, penyesuaian tersebut berupa perubahan Manual IKU pada penyaluran dana bergulir yang disesuaikan dengan proses bisnis LPMUKP yang lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas KKP, realisasi PNBPN yang pengukurannya hanya berfokus kepada PNBPN layanan BLU, serta terdapat Indikator Kinerja baru berupa Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan. Selain itu penyesuaian yang dilakukan adalah berupa penyesuaian pada beberapa target kinerja yang memang disepakati untuk naik dibandingkan dengan Tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya, Perjanjian Kinerja LPMUKP yang telah mengalami penyesuaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp.)	30.000.000.000
		2 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	660.000.000.000
		3 Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 3
		4 Modernisasi BLU (%)	100
		5 Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80
		6 Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80
		7 Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	80,5
		8 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	82
		9 Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	92
		10 Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2022 lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		11 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	75
		12 Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	90

a. Realisasi PNBP BLU

Realisasi PNBP Layanan merupakan pendapatan BLU yang bersumber dari pendapatan layanan berupa pendapatan atas tarif layanan sesuai PMK 100/PMK.05/2017 yang dihitung tercatat penerimaannya mulai pada tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

b. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas komitmen pembiayaan yang telah diadakan antara debitur dengan LPMUKP sepanjang tahun 2023 (terhitung mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023).

c. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah perbandingan anantara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancer, diragukan dan macet) dengan *outstanding* Piutang Dana Bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 hingga tanggal 31 Desember 2023.

d. Modernisasi BLU

Modernisasi pengelolaan BLU adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi

integrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

e. Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat pengguna layanan BLU LPMUKP atas layanan yang diberikan BLU dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM diukur dengan angka, yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

f. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha

Peningkatan usaha debitur penerima pelatihan usaha merupakan peningkatan dari sisi produktivitas debitur sebelum dan sesudah menerima pelatihan/pendampingan usaha dari BLU LPMUKP.

Persentase peningkat usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha dihitung dengan membandingkan jumlah debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha yang mengalami peningkatan produktivitas usaha minimal 30% dari sebelum pelatihan/pendampingan usaha terhadap jumlah seluruh debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh BLU LPMUKP pada tahun 2023.

g. Nilai PM SAKIP LPMUKP

PM SAKIP merupakan Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Satker yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dilakukan verifikasi oleh APIP dan Penilai dari Unit Eselon I.

h. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

i. Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi menciptakan menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari.

Perhitungan indikator berasal dari penilaian komponen keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

j. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP merupakan suatu Indikator Kinerja yang nilainya diperoleh dari penyelesaian terhadap temuan-temuan oleh BPK pada Tahun 2022 dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai tindaklanjut terhadap temuan tersebut.

k. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 atau Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

l. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran.

Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif.

2.3. Program dan Kegiatan

BLU LPMUKP melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Dukungan Manajemen pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian atas program

tersebut, LPMUKP memiliki kegiatan berupa Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang dijabarkan dalam output sebagai berikut:

- a. UMKM yang Dilayani Permodalan BLU
- b. Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha
- c. Layanan Umum
- d. Layanan Perkantoran
- e. Layanan Sarana Internal
- f. Laporan Pengelolaan Keuangan
- g. Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Usaha
- h. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir

Untuk mencapai Output tersebut dengan sejumlah target indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2023 yang menyesuaikan dengan proyeksi PNBP pada tahun 2023. Pagu anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian output di atas adalah sebesar Rp.57.174.996.000,00.

BAB III

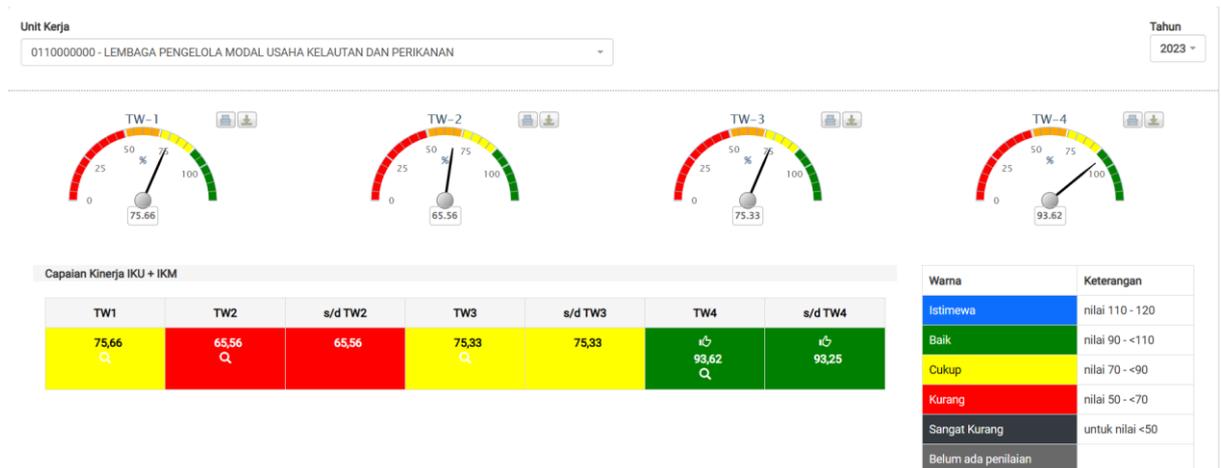
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja LPMUKP

3.1.1. Pencapaian Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik untuk Indikator Kinerja utama dengan periode pengukuran Triwulanan, Semesteran dan Tahunan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Utama dimaksud. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja dimaksudkan agar Lembaga dapat terus mengawasi/memonitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Proses pengelolaan kinerja LPMUKP menggunakan bantuan aplikasi kinerjaku yang dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id.

Analisis capaian kinerja LPMUKP pada setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama dilakukan untuk menjabarkan realisasi pada setiap indikator kinerja utama, permasalahan, dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkup BLU LPMUKP. Analisis capaian kinerja tersebut juga disandingkan dan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada Tahun Anggaran sebelumnya. Capaian perjanjian kinerja BLU LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2023 LPMUKP pada aplikasi kinerjaku

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp.)	30 Miliar	22 Miliar	74,30
	2 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	1,10 Triliun	998,51 Miliar	90,77
	3 Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 3	7,33	50
	4 Modernisasi BLU (%)	100	50,8	50,8
	5 Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP (Indeks)	80	88,5	110,63
	6 Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80	87,43	109,29
	7 Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	80,5	74,60	92,67
	8 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	82	94,54	115,29
	9 Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup LPMUKP	92	108,33	117,75
	10 Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2022 lingkup BLU LPMUKP (%)	100	100	100
	11 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	75	96	128
	12 Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	90	65,27	72,52

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Analisis capaian indikator kinerja utama merupakan suatu proses dalam menjabarkan realisasi capaian kinerja berdasarkan pedoman perhitungan kinerja yaitu manual IKU. Analisis tersebut berisikan penjelesan umum atau definisi terkait dengan IKU, metode cara pengukuran IKU yang dihitung berdasarkan realisasi dibandingkan dengan target, kemudian penjelasan mengenai hasil tindak lanjut rencana aksi pada periode sebelumnya, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan target renstra, serta menjabarkan terkait dengan faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan, dan terakhir menjabarkan rencana aksi untuk periode selanjutnya.

3.2.1. Realisasi PNBP Layanan BLU (Indikator Kinerja 01)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

LPMUKP sebagai Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum bahwa BLU memiliki pola anggaran fleksibel (flexible budget) atau pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan

sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. Kemudian BLU menyusun Rencana Bisnis dan anggaran yang disusun berdasarkan:

- a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
- b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
- c. basis akrual.

Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh BLU sepanjang tahun anggaran terdiri dari:

- a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
- e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini pendapatan yang diterima oleh BLU LPMUKP sesuai dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (424134)

Pendapatan program dana bergulir sektoral diperoleh dari pembayaran bunga pinjaman dan atau imbal jasa pembiayaan dana bergulir yang disalurkan BLU LPMUKP. Tingkat suku bunga yang diberlakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan BLU LPMUKP yaitu paling tinggi adalah sebesar 4% per tahun. Meskipun begitu, LPMUKP menetapkan tingkat suku bunga sebesar 3% per tahun sebagaimana arahan Presiden RI sehingga terdapat penurunan sebesar 1% bila dibandingkan tarif maksimal BLU yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Keuangan nomor 100/PMK.05/2017.

- b. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (424139)

Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya digunakan untuk pendapatan layanan LPMUKP yang bersumber dari pembayaran provisi atas pinjaman dana bergulir yang dicairkan yang dibayarkan satu kali untuk sekali pinjaman dimana besaran yang diberlakukan untuk pembarayan biaya provisi LPMUKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan BLU LPMUKP yaitu sebesar 1,5% dari besaran dana yang dipinjam oleh debitur LPMUKP.

c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911)

Selain pendapatan diatas, LPMUKP sebagai BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana untuk memperoleh pendapatan sebagai pendapatan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 tentang rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Penempatan dana dilakukan berdasarkan perhitungan idle cash, yaitu kas pada rekening BLU yang belum digunakan dalam jangka waktu tertentu. Penempatan dana dilakukan dalam rangka optimalisasi idle cash yang ada.

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Selanjutnya

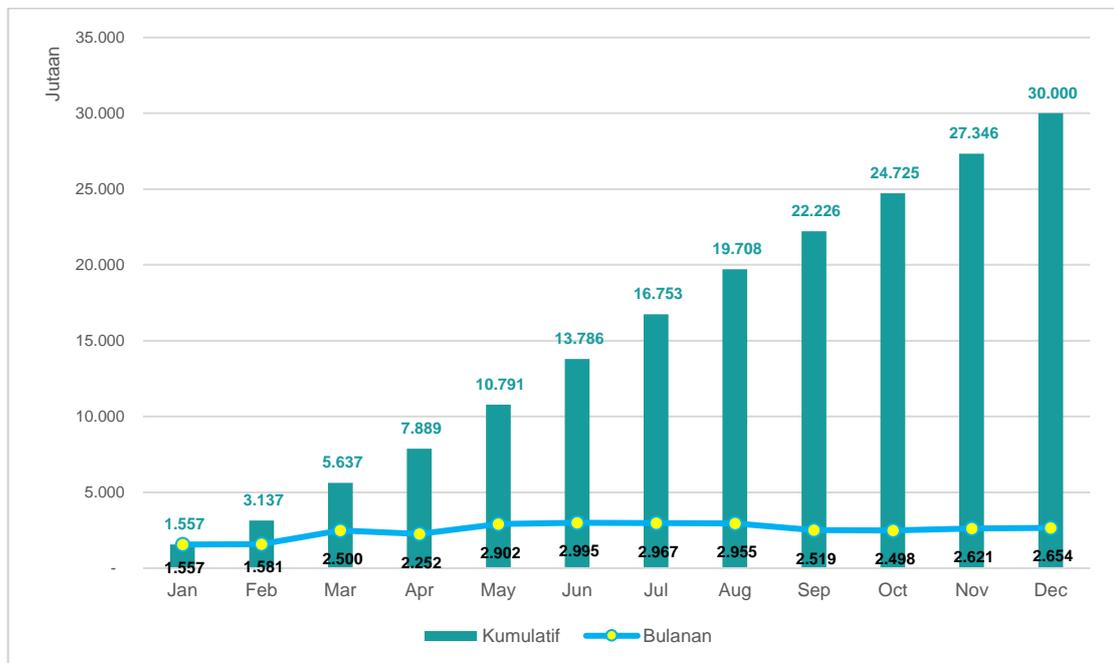
Menindaklanjuti rencana aksi periode Triwulan III dalam rangka mendukung pencapaian PNBP Layanan BLU, maka LPMUKP telah melaksanakan rencana aksi yang dicanangkan untuk Triwulan IV dengan hasil sebagai berikut:

1. Pembiayaan dana bergulir Tahun 2023 telah difokuskan untuk mendukung program prioritas KKP seperti program penangkapan ikan terukur, dan kampung budidaya dengan total pencairan pada program prioritas sebesar Rp213.512.162.900, dan total pencairan dana bergulir hingga 31 Desember adalah sebesar Rp328.512.512.900. Atas pencairan tersebut telah diperoleh PNBP dari jasa Provisi sebesar Rp5.007.422.226 yang merupakan perolehan provisi terbesar dari tahun pertama LPMUKP beroperasi.
2. Terdapat jasa layanan yang masih tertunggak hingga 31 Desember 2023 dengan jumlah sebesar Rp9.550.809.130. Atas jumlah tunggakan tersebut, sebetulnya LPMUKP telah menindaklanjuti terkait dengan rencana aksi untuk Triwulan III terkait dengan tunggakan, yaitu:
 - a) LPMUKP telah melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga pendamping LPMUKP pada tanggal 23 Oktober 2023, dan 11-13 Desember 2023. Hasil dari evaluasi kinerja tersebut menjadi pertimbangan dalam keberlangsungan pendamping, dikarenakan LPMUKP memang seharusnya memberlakukan mekanisme *reward and punishment*.
 - b) Terkait dengan upaya penagihan, LPMUKP juga telah mengupayakan penagihan jasa layanan secara langsung kepada debitur, sehingga LPMUKP mampu untuk menagih jasa layanan yang tertunggak sebesar Rp2.543.900.884,33, dan total jasa layanan yang tertagih sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp6.024.596.323,80.

- c) Upaya optimalisasi pendamping untuk mendukung program penyaluran dana bergulir LPMUKP belum menemui kesepakatan dikarenakan LPMUKP setelah melakukan evaluasi pendamping secara berkala akan fokus untuk membenahan terhadap pendamping terlebih dahulu. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan LPMUKP tetap akan menerima usulan pinjaman dana bergulir yang diajukan dan didukung oleh tenaga penyuluh KKP.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Realisasi Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, indikator kinerja yang disepakati sebagai target dalam mengukur PNBPN adalah realisasi PNBPN layanan BLU yang hanya berfokus dalam menghitung realisasi penerimaan yang bersumber dari jasa layanan dan biaya provisi atas pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat. Target realisasi PNBPN Layanan LPMUKP perbulan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3.2 Target PNBPN Layanan Bulanan dan Kumulatif

Selanjutnya, untuk menghitung realisasi dan capaian IKU Realisasi PNBPN Layanan BLU, adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi PNBPN BLU} = \text{Realisasi Pendapatan Jasa Layanan} + \text{Realisasi Jasa Provisi}$$

$$\text{Capaian Realisasi PNBPN BLU} = \frac{\text{Realisasi PNBPN Layanan BLU}}{\text{Target PNBPN Layanan BLU}} \times 100\%$$

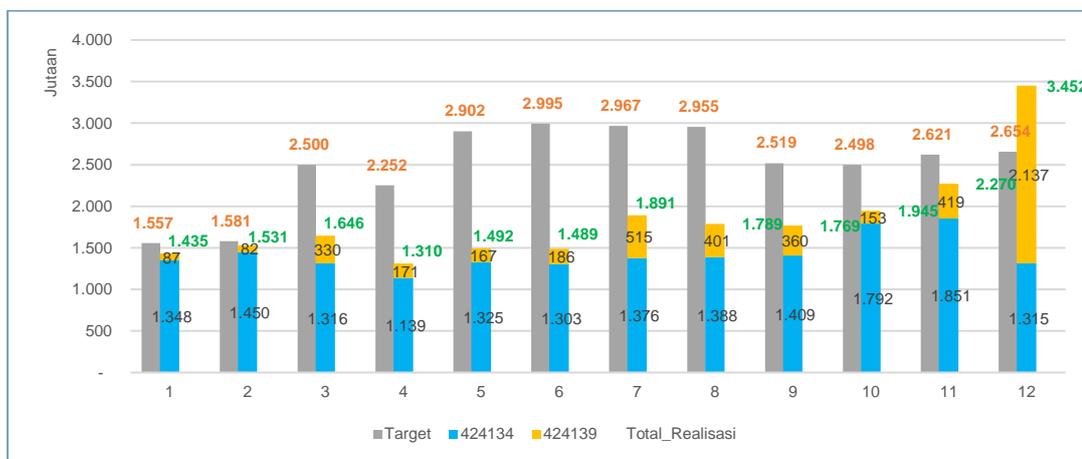
Realisasi pendapatan PNBPN Tahun 2023 adalah sebesar Rp61.228.283.450 yang terdiri dari hasil pendapatan jasa layanan sebesar Rp22.019.837.486, selain itu BLU LPMUKP juga memperoleh pendapatan non jasa layanan sebesar Rp39.208.445.963,98. Rincian target PNBPN perbulan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Rincian PNBPN BLU per Bulan

Bulan	424911	424134	424139	424919	424916	PNBP
Januari	1.348.007.421	86.955.000	3.263.540.224	8.000	-	4.698.510.645
Februari	1.449.818.673	81.600.000	3.320.363.915	123.083	-	4.851.905.671
Maret	1.316.026.580	330.390.000	3.079.745.281	699.065	-	4.726.860.926
April	1.138.514.144	171.300.000	2.774.523.418	(124.500)	-	4.084.213.062
Mei	1.325.476.910	166.875.000	3.122.363.652	-	-	4.614.715.562
Juni	1.302.619.652	186.075.000	2.650.331.346	(137.500)	-	4.138.888.498
Juli	1.376.198.444	515.274.000	3.020.460.257	(176.583)	-	4.911.756.118
Agustus	1.388.134.264	400.650.000	4.386.739.411	(232.759)	-	6.175.290.916
September	1.408.561.661	359.962.500	2.657.811.499	-	-	4.426.335.660
Oktober	1.792.300.071	152.706.750	3.405.447.887	-	-	5.350.454.708
November	1.851.426.366	418.934.250	3.487.284.063	-	-	5.757.644.679
Desember	1.315.331.074	2.136.699.726	3.938.601.141	455.064	100.620.000	7.491.707.005
Total	17.012.415.260	5.007.422.226	39.107.212.093	613.870	100.620.000	61.228.283.450

- *) 424911 = Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
- 424134 = Pendaptan Program Dana Bergulir Sektoral
- 424139 = Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
- 424916 = Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran yang Lalu
- 424919 = Pendapatan lain-lain

Akun penerimaan yang merupakan jasa layanan adalah 424134 (pendapatan program dana bergulir sektoral) dan 424139 (pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya), selain dari kedua akun tersebut merupakan pendapatan non jasa layanan, sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi PNBPN layanan BLU adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3. Realisasi PNBPN Layanan Bulanan

$$\begin{aligned} \text{Realisasi PNBP BLU} &= 17.012.415.260 + 5.007.422.226 \\ &= \mathbf{22.019.837.486} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi PNBP BLU} &= \frac{22.019.837.486}{30.000.000.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{73,40\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan realisasi dan capaian di atas, total realisasi jasa layanan LPMUKP hingga bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp22.019.837.486 yang terdiri atas jasa layanan sebesar Rp17.012.415.260, dan jasa provisi atas pinjaman dana bergulir telah terealisasi sebesar Rp5.007.422.226. Sedangkan target PNBP layanan pada periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.000.000.000, sehingga capaian atas target Tahun 2023 yang dihitung sesuai dengan manual IKU adalah sebesar 73,40%.

D. Perbandingan Capaian Realisasi PNBP Layanan BLU Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Secara nominal, capaian PNBP BLU periode Tahun 2023 sebesar Rp22.019.087.486 atau sebesar 73,40% relatif mengalami kenaikan sebesar 0,12% jika dibandingkan dengan periode Tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024, maka capaian periode Tahun 2023 adalah sebesar 73,40% dikarenakan target Realisasi PNBP Layanan BLU pada Tahun 2024 relatif sama. Untuk lebih jelasnya terkait dengan perbandingan capaian kinerja realisasi PNBP BLU dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian PNBP

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-1		Realisasi PNBP Badan Layanan Umum (Rp.)											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
6,15 Miliar	13,10 Miliar	13,75 Miliar	19,77 Miliar	21,99 Miliar	30 Miliar	22,01 Miliar	73,40	0,12	22,01 Miliar	73,40	30 Miliar	73,40	

Kenaikan capaian Tahun 2023 sebesar 0,12% dikarenakan jumlah jasa provisi yang dibayarkan lebih besar daripada Tahun 2022, hal ini selaras dengan jumlah dana bergulir yang dicairkan relatif lebih besar di Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2024, capaian realisasi PNBP layanan BLU memperoleh nilai yang sama, hal ini dikarenakan target PNBP

layanan BLU pada Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah realisasi Tahun 2023 yang belum optimal dikarenakan terdapat jasa layanan tidak tertagih yang jumlahnya cukup besar, dan dana kelolaan LPMUKP yang masih terbatas. Asumsi perolehan jasa layanan jika seluruh dana kelolaan LPMUKP tersalurkan maka realisasinya hanya sebesar Rp40.500.000.000, di satu sisi LPMUKP juga menyalurkan dana kepada sektor usaha dengan risiko yang tinggi, sehingga dinilai sangat sulit untuk menghindari agar tidak terjadinya kegagalan pada yang bergantung kepada alam.

Untuk membandingkan nilai realisasi capaian PNBPN Layanan LPMUKP sebesar Rp22.019.837.486 atau 73,40% dari target sebesar Rp30.000.000.000, terdapat satu Badan Layanan Umum lain yang telah merilis nilai secara resmi yaitu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dimana Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tercapai sebesar 104,99% dari target sebesar 100%. Namun demikian, belum terdapat dokumen laporan kinerja yang resmi dari BLU BAKTI sehingga tidak terinformasi secara detil berapa target nominal rupiah yang disepakati, dan sumber penerimaan PNBPN dari jenis apa saja yang dapat diakui sebagai target dan realisasi PNBPN. (sumber: <https://pantau.kominfo.go.id/pantau>)

E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Permasalahan yang terjadi pada realisasi PNBPN Layanan BLU yang bersumber dari jasa layanan dan provisi pada Triwulan IV berkaitan dengan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban debitur setelah mendapatkan pembiayaan akibat kegagalan usaha yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi sepanjang periode Triwulan IV Tahun 2023, pada periode selanjutnya LPMUKP akan melaksanakan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring terhadap debitur-debitur yang telah dibiayai dengan tetap mengingatkan terkait dengan pembayaran jasa layanan maupun pembayaran pokok melalui SMS blast maupun melalui tenaga pendamping di daerah.
- b) Menginventarisasi debitur-debitur yang memiliki piutang untuk kemudian dilakukan klasterisasi terhadap debitur-debitur yang menunggak. Sehingga diperoleh data berdasarkan kolektibilitas dan dari data tersebut akan dilakukan optimalisasi penagihan piutang dengan skala prioritas, terutama terhadap debitur yang memiliki nilai piutang jasa layanan yang tinggi. Terhadap debitur yang telah dilakukan proses penagihan dan tidak memiliki itikad yang baik, maka akan dilanjutkan kepada proses teguran, bahkan sampai dengan proses penyelesaian.

c) Optimalisasi jasa provisi dari pencairan dana bergulir di Tahun 2024.

3.2.2. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir (Indikator Kinerja 02)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah, dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah dan selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat, demikian seterusnya (Bultek SAP Nomor 07).

Dana Bergulir utamanya ditujukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, caranya dengan memberikan suku bunga yang lebih murah dibandingkan lembaga keuangan komersial atau memberikan pinjaman tanpa disertai agunan (untuk pembiayaan kelompok).

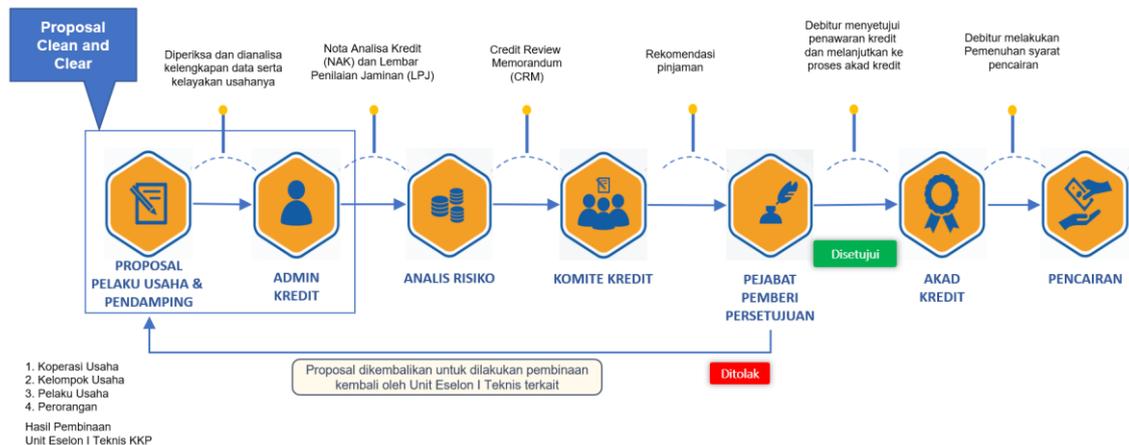
BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP menyalurkan Dana Bergulir kepada nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, LPMUKP rencananya akan melaksanakan sinergi program dengan Unit Eselon I Teknis KKP dalam rangka mendukung program prioritas KKP yang dikoordinir oleh Unit Eselon I Teknis KKP tersebut. LPMUKP berperan sebagai lembaga yang memberikan stimulus berupa modal usaha agar program prioritas yang dicanangkan dapat berkelanjutan. Sinergi tersebut dilakukan dengan menyiapkan skema penyaluran dana bergulir yang difokuskan kepada koperasi yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan agar dapat meneruskan program prioritas KKP dengan memanfaatkan pembiayaan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha yang dilakukan. Program prioritas KKP yang akan menjadi fokus LPMUKP adalah penangkapan ikan terukur, dan kampung budidaya.

Selain itu, sinergi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana bergulir adalah dengan mengikutsertakan Unit Eselon I sebagai unsur yang ikut memberikan rekomendasi dari sisi teknis usaha dalam rapat komite pinjaman dana

bergulir dikarenakan secara teknis Unit Eselon I teknis lebih memiliki pemahaman yang baik dan juga kemungkinan besar akan mengetahui karakteristik dan kemampuan dari debitur yang mengajukan pinjaman dikarenakan beberapa debitur LPMUKP merupakan binaan dari KKP sendiri.

Terkait dengan proses bisnis LPMUKP yang diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan realisasi penyaluran dana bergulir yang dimana proses yang diklaim sebagai realisasi adalah komitmen pembiayaan atau akad yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Pembahasan terkait dengan realisasi akad yang menjadi nilai realisasi penyaluran dana bergulir telah disepakati oleh Sekretaris Jenderal KKP, dimana untuk model bisnis LPMUKP yang mendukung program prioritas KKP, akad yang dilakukan bernilai besar dan juga proses akad tersebut sebetulnya juga merupakan salah satu tahapan dalam pencairan dana bergulir dimana prosesnya dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Proses Bisnis LPMUKP

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Selanjutnya

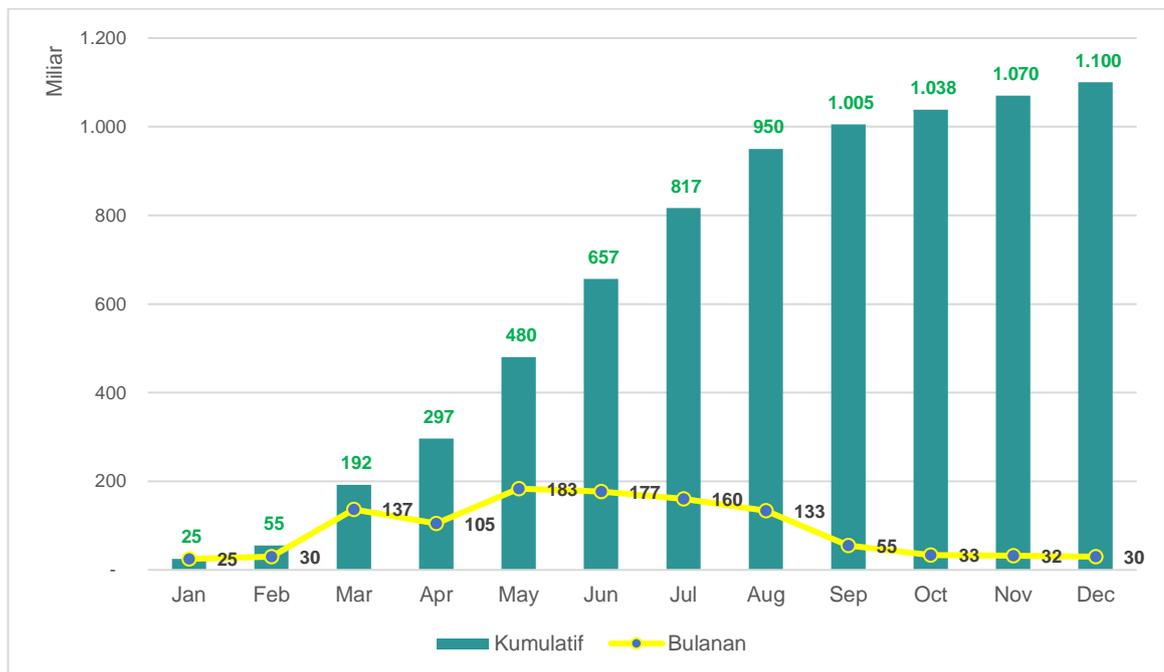
Menindaklanjuti rencana aksi periode Triwulan III untuk dalam rangka mendukung realisasi penyaluran dana bergulir di Triwulan IV, maka LPMUKP telah melaksanakan beberapa hal berikut:

1. LPMUKP telah berupaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap program penyaluran dana bergulir LPMUKP, terutama dalam mendukung program prioritas KKP melalui temu teknis UMKM di daerah.
2. LPMUKP telah melakukan optimalisasi komitmen pembiayaan dengan realisasi sebesar Rp998.518.000.000 serta pencairan dana bergulir yang dioptimalkan dari pelaksanaan komitmen pembiayaan dengan total yang disalurkan hingga Desember 2023 adalah sebesar Rp328.512.512.900 kepada 4.983 Pemanfaat.

- LPMUKP telah melakukan koordinasi dengan Eselon I Teknis KKP, utamanya terkait dengan pelaksanaan komite pinjaman dana bergulir yang telah dilaksanakan terakhir pada tanggal 29 November 2023.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Untuk mendorong perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan, LPMUKP pada Tahun 2023, berkomitmen untuk menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan dengan total penyaluran sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah), dengan rincian target sebagai berikut:



Gambar 3.5 Target Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2023

Sementara itu, untuk menghitung realisasi dan capaian penyaluran dana bergulir sesuai dengan Manual IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} = \frac{\text{Realisasi Akad Pinjaman Dana Bergulir}}{\text{Target Akad Pinjaman Dana Bergulir}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir melaksanakan komitmen pembiayaan dengan total sebesar Rp998.518.000.000 kepada 388 debitur. LPMUKP juga telah melakukan komitmen pembiayaan tersebut sesuai dengan arah dan kebijakan untuk mendukung program prioritas KKP yaitu dukungan program penangkapan ikan terukur yang tentunya sektor usahanya adalah perikanan tangkap, untuk sektor perikanan budidaya terdapat program prioritas berupa kampung budidaya. Selain itu, LPMUKP juga tetap menyalurkan kepada kelompok usaha atau perorangan yang tidak tergabung atau teridentifikasi dalam program prioritas KKP

dengan sektor usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha garam rakyat, dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Untuk lebih jelasnya realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Per Sektor Usaha

No	Program/Sub Sektor Usaha	Jumlah Akad	Jumlah Debitur
1	Kampung Budidaya	142.477.000.000	13
	Perikanan Budidaya	142.477.000.000	13
2	Penangkapan Ikan Terukur	762.586.500.000	23
	Perikanan Tangkap	762.586.500.000	23
3	Ritel	93.454.500.000	352
	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	21.411.600.000	80
	Perikanan Budidaya	28.180.000.000	188
	Perikanan Tangkap	28.327.200.000	65
	Usaha Garam Rakyat	4.989.700.000	6
	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	10.546.000.000	13
	Total	998.518.000.000	388

Realisasi penyaluran dana bergulir periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp998.518.000.000 dari target Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.100.000.000.000 atau sebesar 90,77% dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan capaian berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} &= \frac{998.518.000.000}{1.100.000.000.000} \times 100\% \\ &= 90,77\% \end{aligned}$$

Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir LPMUKP menambahkan anggaran belanja untuk perjalanan dinas dalam rangka operasional penyaluran dana bergulir dan akad kredit yang semula Rp325.000.000 menjadi Rp650.000.000 dengan realisasi sebesar Rp425.667.570. Kemudian untuk mendukung proses *clean and clear* proposal di awal, LPMUKP juga meningkatkan dukungan pada proses pengecekan karakter calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) dengan anggaran sebesar Rp114.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp95.726.400. Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme Revisi DIPA dan RBA LPMUKP Tahun 2023.



Gambar 3.6 Dokumentasi Penyaluran Dana Bergulir 2023

D. Perbandingan Capaian Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Jika realisasi penyaluran dana bergulir tersebut dibandingkan dengan realisasi penyaluran Tahun 2022, maka capaian persentase penyaluran dana bergulir pada Tahun 2023 relatif mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2024, realisasi penyaluran dana bergulir Tahun 2023 mencapai 71,32%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan nilai realisasi tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-2		Realisasi Penyaluran Dana Bergulir											
Realisasi					2023					Renstra LPMUKP 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
215 Miliar	182 Miliar	192 Miliar	270 Miliar	133 Miliar	1,10 Triliun	988 Miliar	90,77	649,47	1,10 Triliun	90,77	1,35 Triliun	73,96	

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, penyaluran dana bergulir tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi yang signifikan. Namun sebetulnya, perbandingan realisasi penyaluran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dikategorikan sebagai perbandingan dalam arti sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun

2023 klaim realisasi penyaluran dana bergulir adalah sampai dengan realisasi pada komitmen pembiayaan atau akad kredit sesuai dengan pembahasan hasil Dialog Kinerja Organisasi (DKO) lingkup Sekretariat Jenderal KKP.

Selanjutnya, perbandingan target Tahun 2024 telah mengacu pada usulan perjanjian kinerja LPMUKP Tahun 2024 yang telah dilakukan verifikasi. Realisasi penyaluran dana bergulir 2023 terhadap target Tahun 2024 terealisasi sebesar 73,96%.

Untuk perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lain, terdapat satu BLU rumpun pengelola dana yang telah merilis hasil perhitungan kinerja secara resmi melalui *website* nya yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. LPMUKP hingga 31 Desember, telah memberikan komitmen pembiayaan sebesar Rp998.518.000.000 atau dengan capaian sebesar 90,77% dari target kepada 388 Debitur, sedangkan untuk BLU BPDLH, realisasi Jumlah Penyaluran Insentif Dana Program adalah sebesar Rp224,70 Miliar dari target Rp165 Miliar, Persentase Kinerja Dana Rehabilitasi Mangrove mencapai 88,36% dari target sebesar 80%. (sumber: <https://bpdh.id/reports>)

E. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Meskipun realisasi penyaluran dana bergulir berupa komitmen pembiayaan belum dapat mencapai target sebesar Rp1,10 Triliun, namun realisasi tersebut sudah dapat dikategorikan optimal karena realisasinya telah mencapai Rp998,51 Miliar atau sebesar 90,77%. Beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian target adalah:

- a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan program penyaluran dana bergulir LPMUKP mengakibatkan masyarakat masih awam terkait dengan prosedur dan mekanisme pengajuan untuk akses pembiayaan dana bergulir dari LPMUKP. Terutama terkait dengan dukungan pembiayaan program prioritas KKP dimana masyarakat masih enggan untuk melakukan usaha dengan skala ekonomi yang besar (tergabung dalam koperasi/kelompok). Hal tersebut juga berkaitan dengan masyarakat atau para pelaku usaha belum memahami dengan baik manfaat yang diperoleh pada saat melakukan usaha yang terkelola dengan baik melalui koperasi atau kelompok.
- b) Pemahaman pendamping terkait dengan target pembiayaan pada program prioritas KKP juga masih terbilang kurang, hal tersebut tentunya berpengaruh pada calon debitur yang menjadi sasaran target para pendamping LPMUKP di daerah masih didominasi oleh para pelaku usaha yang mengajukan pinjaman per seorangan dengan nominal yang relatif kecil.

Berdasarkan kendala yang dihadapi pada Triwulan IV Tahun 2023, maka LPMUKP untuk lebih mengoptimalkan pencapaian target pada Tahun 2024, akan melakukan beberapa hal berikut:

- a) Melakukan peningkatan pemahaman terhadap program pembiayaan dana bergulir LPMUKP terutama terkait dengan dukungan pada program prioritas KKP berupa penangkapan ikan terkur, dan kampung budi daya melalui temu teknis atau kegiatan lain yang lebih efisien.
- b) Melakukan bimbingan kepada para pendamping di daerah terkait dengan program prioritas KKP dalam rangka meningkatkan pemahaman pendamping.
- c) Mengoptimalkan proses *clean and clear* proposal penyaluran dana bergulir di awal untuk mengefektifkan pelayanan pembiayaan dana bergulir.

3.2.3. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Indikator Kinerja 03)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Sementara untuk menentukan klasifikasi piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan.

LPMUKP mengemban misi di bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui penguatan permodalan UMKM, dimana sasaran langsung (sebagian besar koperasi/LKM) dan tidak langsung/*end user* (sebagian besar anggota koperasi) dimungkinkan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, LPMUKP dalam menetapkan NPL mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kami memandang perlu adanya penetapan istilah NPL (*Non Performing Loan*) seperti lazimnya digunakan pada lembaga perbankan/lembaga keuangan untuk pengukuran kinerja pinjaman/pembiayaan bermasalah yang dilakukan. Untuk itu, LPMUKP mengusulkan dalam rangka mengukur kinerja pinjaman/pembiayaan, dilakukan melalui penetapan Kolektibilitas Dana Bergulir.
- 2) Kolektibilitas Dana Bergulir adalah pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan mitra dalam rangka mendapatkan informasi tentang kualitas pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir.

- 3) Pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan adalah penggolongan kualitas pengembalian pinjaman/pembiayaan dan/atau pembayaran Tarif/Imbal Jasa dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPMUKP dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kondisi dari pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan.
- 4) Pada Tahun 2023, LPMUKP menentukan perhitungan Kolektibilitas Dana Bergulir dalam bentuk klasifikasi piutang mulai dari Kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rasio Dana Bergulir Diragukan adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan, macet) dengan outstanding piutang dana bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Tujuan dari perhitungan capaian IKU ini adalah untuk menjaga kualitas atau tingkat kesehatan pinjaman atas dana bergulir dengan polarisasi indikator kinerja Minimize (semakin rendah capaian semakin baik). Penilaian capaian kinerja rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.6. Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	0% < NPL ≤ 3%	100%
2	3% < NPL ≤ 4%	90%
3	4% < NPL ≤ 5%	80%
4	NPL > 5%	50%

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 131/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012, dirumuskan acuan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan rasio *Non Performing* (NPF) adalah Pembiayaan (KL, D, M)/ Total Pembiayaan.
- 2) Pembiayaan (KL, D, M) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- 3) Peringkat Komposisi Bank yang dikategorikan secara umum sangat sehat dan secara umum sehat, adalah yang antara lain memnuhi rasio NPF kurang dari 5%.

Kemudian penentuan kualitas piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, sebagai berikut:

Tabel. 3.7. Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Klasifikasi	Keterangan	Penyisihan
Lancar	Untuk investasi tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	0,5%
Kurang Lancar	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	10%
Diragukan	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	50%
Macet	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 240 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.	100%

Untuk menghitung Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT) menggunakan formulasi perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih} = \frac{\text{Kolektibilitas 2,3,4}}{\text{Oustanding Pinjaman Dana Bergulir}} \times 100\%$$

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Menindaklanjuti rencana aksi periode sebelumnya terkait dengan Indikator Kinerja Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh LPMUKP dalam upaya menekan rasio dana bergulir diragukan tertagih:

1. LPMUKP telah mengupayakan pencairan dana bergulir sesuai dengan waktu yang tepat, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana oleh debitur, dikarenakan apabila dana diberikan kepada pelaku usaha yang sangat bergantung pada alam pada waktu yang tidak tepat atau bukan waktu untuk produksi, maka tidak menutup kemungkinan dana tersebut direalisasikan untuk hal lain. Maka dari itu, LPMUKP memastikan agar pemberian dana akan dilakukan di waktu yang tepat.
2. Penerapan manajemen risiko dalam hal pembiayaan dana bergulir telah dilakukan dengan pemberlakuan proses *clean and clear* proposal di awal, khususnya untuk pembiayaan pada dukungan program prioritas KKP, dalam pemberian pinjaman tersebut LPMUKP telah melakukan seleksi terhadap penerima di awal dengan mempertimbangkan jumlah anggota, keberlangsungan usaha, serta mitigasi risiko terhadap usaha yang dijalankan.

3. LPMUKP telah melakukan upaya penagihan baik untuk pokok pinjaman maupun jasa layanan sesuai dengan Peraturan Direktur Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan piutang.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kolektibilitas dari masing-masing debitur, LPMUKP kemudian menghitung rasio dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan klasifikasi nilai kolektibilitas yang telah dijabarkan sebelumnya untuk mengetahui nilai dari NPL. Hingga 31 Desember 2023, profil rasio dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan nilai kolektibilitas yang telah dilakukan penyisihan pinjaman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Profil Kolektibilitas Debitur LPMUKP Tahun 2023

Kolektibilitas	Kualitas	Dana Bergulir Diragukan Tertagih*
1	Lancar	636.442.777
2	Kurang Lancar	1.326.417.757
3	Diragukan	429.521.167
4	Macet	62.312.986.280
NPL (Kol 2,3,4)		64.068.925.204
Total		64.705.367.981

*) Laporan Keuangan LPMUKP Tahun 2023 Unaudited

Hingga 31 Desember 2023, jumlah outstanding pinjaman dana bergulir adalah sebesar Rp874.548.562.835, sehingga nilai rasio rasio dana bergulir diragukan tertagih yang dihitung berdasarkan manual IKU, adalah sebagai berikut:

$$RDBDT = \frac{64.068.925.204}{8874.548.562.835} \times 100\%$$

$$RDBDT = 7,33\%$$

Sesuai dengan dokumen Manual IKU, capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih dihitung berdasarkan *range* nilai realisasinya. Target Tahun 2023 adalah sebesar 3%, sementara realisasinya adalah 7,33%, maka capaian IKU ini sesuai penjelasan sebelumnya (3.2.3.A) adalah sebesar 50%.

D. Perbandingan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2023 dengan periode Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Nilai rasio dana bergulir diragukan tertagih pada periode Tahun 2023 relatif mengalami penurunan dalam arti positif dikarenakan IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih menggunakan polarisasi pengukuran Minimize dimana semakin rendah capaian maka

nilai dan interpretasinya semakin baik, penurunan tersebut sekitar 0,88% dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2024, maka jika berpedoman pada perhitungan manual IKU tahun 2023, capaian Tahun 2023 dibandingkan target 2024 tentunya mengalami kenaikan dikarenakan target pada Tahun 2024 diusulkan untuk kembali menggunakan standar NPL dari Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, begitu pula dalam dokumen Renstra Bisnis Eksisting, target tahun 2024 adalah 5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-3		Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
0%	3,69%	3,01%	2,87%	8,25%	3%	7,33%	50%	0,88%	3%	50%	5%	80%	

Realisasi rasio dana bergulir diragukan tertagih pada Tahun 2023 adalah sebesar 7,37%. Capaian realiasi tersebut sesuai dengan manual IKU adalah sebesar 50% dikarenakan berada pada range nilai lebih dari 5%. Sedangkan realisasi periode Tahun 2022 adalah sebesar 8,25%, dengan nilai capaian sebesar 60%. Kedua nilai tersebut memang melebihi angka 5%, namun dikarenakan perbedaan range nilai pada Manual IKU, maka capaian tahun 2023 relatif lebih rendah. Kemudian jika kita ingin membandingkan indikator kinerja ini, tidak bisa membandingkan nilai realisasinya dikarenakan polarisasi dari IKU ini adalah minimize dimana semakin kecil nilainya akan semakin baik, sedangkan jika nilainya mengalami kenaikan malah semakin buruk. Untuk menghitung perbandingan tersebut, maka digunakanlah pengurangan dimanan realisasi tahun 2022 dikurangi realisasi tahun 2023, dan diperoleh nilai penurunan dalam arti positif sebesar 0,88%.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024, dimana target Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih diusulkan untuk kembali menggunakan nilai standar NPL Bank Indonesia sebesar 5%, hal tersebut juga kemungkinan berpengaruh pada Manual IKU, maka untuk menghitung capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 nilai capaiannya adalah sebesar 80%, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 3.10 Manual IKU RDBDT Tahun 2022

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	RDBDT = 0%	150%
2	0% < RDBDT ≤ 1%	120%
3	1% ≤ RDBDT ≤ 2%	110%
4	2% ≤ RDBDT ≤ 5%	100%
5	5% ≤ RDBDT ≤ 8%	80%
6	8% ≤ RDBDT ≤ 12%	60%
7	RDBDT ≥ 12%	50%

Untuk membandingkan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, belum ada Badan Layanan Umum lain yang memiliki Indikator Kinerja Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih atau *Non Performing Loan*, yang merilis perhitungan secara resmi, sehingga untuk membandingkan realisasi pada IKU ini LPMUKP belum memiliki acuan perbandingan yang relevan.

E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh tim penagihan LPMUKP, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya NPL sehingga menyumbang nilai dalam realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih. Nilai NPL tersebut disebabkan oleh beberapa hal sehingga berdampak terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban dari debitur kepada LPMUKP berupa pembayaran pokok pinjaman dan jasa layanan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, berikut kami jabarkan terkait dengan penyebab kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut diantaranya:

- a) Terjadinya Pandemi *Covid* 19 yang berdampak kepada usaha kelautan dan perikanan khususnya dalam hal pemasaran baik skala lokal maupun ekspor.
- b) Terdampak bencana alam (*force majeure*) seperti: rob (banjir) berkepanjangan, gempa bumi, badai dan gelombang tinggi, serta bencana lain yang menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas usaha.
- c) Terjadinya kesalahan manajemen ataupun konflik internal dalam organisasi khususnya untuk pemanfaat yang berupa Kelompok Usaha, Koperasi, PT maupun yang berbentuk badan usaha lain yang mengakibatkan terganggunya proses produksi maupun usaha.
- d) Semakin meningkatnya harga bahan baku (BBM, pakan, bibit, bahan baku olahan dll) akibat inflasi, yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga barang hasil produksi sehingga margin realtif sedikit.

Atas permasalahan tersebut, kami telah menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menurunkan rasio NPL dengan rincian sebagai berikut:

- a) Mengirimkan pengingat (reminder) terhadap kewajiban serta tunggakan debitur melalui media elektronik berupa SMS *Blast*.
- b) Mengirimkan Surat Penagihan, Surat Peringatan, ataupun Surat Teguran sesuai dengan kolektibilitas debitur sesuai dengan Perdir terkait Pengelolaan Piutang.
- c) Melakukan pemanggilan terhadap debitur yang menjadi prioritas dalam penanganan piutang bermasalah.
- d) Melakukan pertemuan secara daring baik dengan pendamping ataupun dengan debitur untuk meminta konfirmasi dan komitmen terkait dengan pembayaran kewajiban tunggakan.
- e) Pemberian Surat Somasi kepada debitur yang berada di kolektibilitas 4 dimana debitur tersebut dirasa usahanya sudah tidak berjalan dan tidak memiliki itikad baik untuk selanjutnya dilimpahkan kepada PUPN/KPKNL.

3.2.4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU (Indikator Kinerja 04)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Good governance, actual, transparan dan akuntabel merupakan komponen yang ingin dicapai dalam sistem pemerintahan yang modern. Tuntutan terhadap efektifitas pelayanan publik menjadi dasar untuk BLU LPMUKP untuk melakukan modernisasi pengelolaan BLU untuk meningkatkan performance dalam pelayanan publik. Mengingat pentingnya modernisasi pengelolaan BLU maka kegiatan ini menjadi indikator utama kinerja lembaga BLU LPMUKP. Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegritas sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) tahapan dengan dasar nilai capaian tiap triwulan adalah 100% dengan penyelesaian tahapan:

Tabel 3.11 Tahapan Modernisasi BLU

Tahap	Uraian	Bobot
I	Integrasi Data	40%
II	Analitika Data	20%
III	Sistem Informasi Manajemen	20%
IV	Website	10%
V	Operasionalisasi BIOS	10%
Total		100%

Penjelasan terkait dengan tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Integrasi data merupakan tahapan penilaian yang mengarah kepada interkoneksi data antara LPMUKP dengan Direktorat PPK BLU yang dilakukan melalui pengembangan *webservice* sehingga apabila BLU sudah mencapai tahapan *production*, maka data-data yang diperlukan oleh PPK BLU seperti data layanan pengelolaan dana bergulir, data keuangan, data SDM dan data-data lainnya. Namun demikian untuk sampai kepada tahapan *production* yang dikirimkan setiap hari, idealnya BLU harus memiliki aplikasi yang sudah siap untuk mengelola data-data yang dibutuhkan.
2. Analitika data merupakan tahapan yang menilai terkait dengan pengolahan data yang dapat diampu melalui aplikasi agar pengolahan data tersebut ditampilkan dengan bentuk papan instrumen (*dashborad*) supaya informasi terkait dengan kondisi BLU dapat mudah dipahami melalui *dashboard* yang tersedia.
3. Sistem informasi manajemen merupakan tahapan yang menilai terkait dengan kesediaan aplikasi/tools yang digunakan untuk menyediakan data terkait dengan data keuangan, data layanan, serta data SDM.
4. Website merupakan tahapan yang menilai terkait dengan performa dan fungsi *website* dari BLU.
5. Operasionalisasi BIOS merupakan tahapan yang menilai terkait dengan kelengkapan data-data yang harus diunggah atau dilengkapi pada aplikasi BIOS.

Untuk menghitung realisasi dan capaian dari IKU Penyelesaian Modernisasi BLU adalah dengan menggunakan formulasi perhitungan berikut:

$$\text{Realisasi Modernisasi BLU} = \text{Nilai Tahapan (I + II + III + IV + V)}$$

$$\text{Capaian Modrenisasi BLU} = \frac{\text{Realisasi Modernisasi BLU}}{\text{Target Modernisasi BLU}}$$

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Menindaklanjuti rencana aksi Tahun sebelumnya, dalam upaya pencapaian penyelesaian modernisasi BLU, LPMUKP telah melakukan beberapa hal berikut:

1. LPMUKP telah mengupayakan persiapan infrastruktur Teknologi Informasi dengan mempedomani dokumen manual IKU penyelesaian modernisasi BLU, namun demikian dikarenakan LPMUKP hingga saat ini belum memiliki SDM di bidang IT, sehingga berpengaruh pada proses penyelesaian modernisasi BLU.
2. Terkait dengan SDM di bidang IT, seperti yang telah dijelaskan bahwa LPMUKP belum memiliki SDM di bidang IT. Sementara itu, hasil koordinasi dengan pembina,

terkait dengan permintaan izin untuk rekrutmen SDM di bidang IT, LPMUKP mendapatkan rekomendasi agar mengoptimalkan SDM yang tersedia saat ini, dan pada realitanya LPMUKP tidak memiliki SDM yang mahir dalam mengelola teknologi informasi.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian modernisasi BLU, LPMUKP telah berupaya seoptimal mungkin meskipun tidak memiliki SDM yang mahir dalam mengelola teknologi informasi. Namun demikian, LPMUKP tetap berupaya untuk memenuhi tahapan-tahapan yang menjadi poin penilaian.

1) Integrasi data

Pada tahapan integrasi data, LPMUKP sebetulnya telah dapat mengklaim poin permintaan *secret key development*, namun belum dapat ditindaklanjuti secara lebih jauh.

2) Analitika Data

LPMUKP pada tahun 2023 telah memiliki beberapa *dashboard* terkait dengan layanan, keuangan, SDM dan *dashboard* lainnya, namun untuk *dashboard* layanan, keuangan, dan SDM memang belum tersedia akses untuk Pembina BLU. Sehingga poin capainnya belum optimal. Sementara *dashboard* lainnya adalah *dashboard* indeks kepuasan masyarakat, dan *dashboard* hasil perhitungan debitur yang mengalami peningkatan usaha sebesar 30% pada tahun 2023.

3) Sistem Informasi Manajemen

Terdapat tiga penilaian pada sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi keuangan, sistem informasi layanan, dan sistem informasi SDM. Pada penilaian tahapan ini untuk sistem layanan, LPMUKP telah dapat mencatat transaksi layanan utama untuk penyaluran dana bergulir, namun belum terintegrasi langsung dengan sistem keuangan. Kemudian, untuk sistem informasi SDM baru dapat mengakomodir pencatatan data SDM belum termasuk pencatatan perhitungan kinerja SDM.

4) Website

Untuk tahapan website terdapat dua poin yang dinilai yaitu performa website, dan fungsi website. Untuk tahapan website tersebut, LPMUKP dapat memenuhi poin-poin yang menjadi penilaian website.

5) Operasionalisasi BIOS

Tahapan operasionalisasi BIOS dinilai berdasarkan kelengkapan data pada modul BIOS yaitu profil BLU, data layanan BLU, data keuangan BLU, rencana Bisnis dan

Anggaran dan Rencana Strategis, pengelolaan kinerja, dokumentasi, pembinaan, dewasa, *maturity rating assesment*, tarif dan remunerasi.

Tabel 3.12 Perhitungan Realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU

Tahap	Uraian	Bobot	Capaian
I	Integrasi Data	40%	0,8%
II	Analitika Data	20%	14%
III	Sistem Informasi Manajemen	20%	16%
IV	Website	10%	10%
V	Operasionalisasi BIOS	10%	10%
Total		100%	50,8%

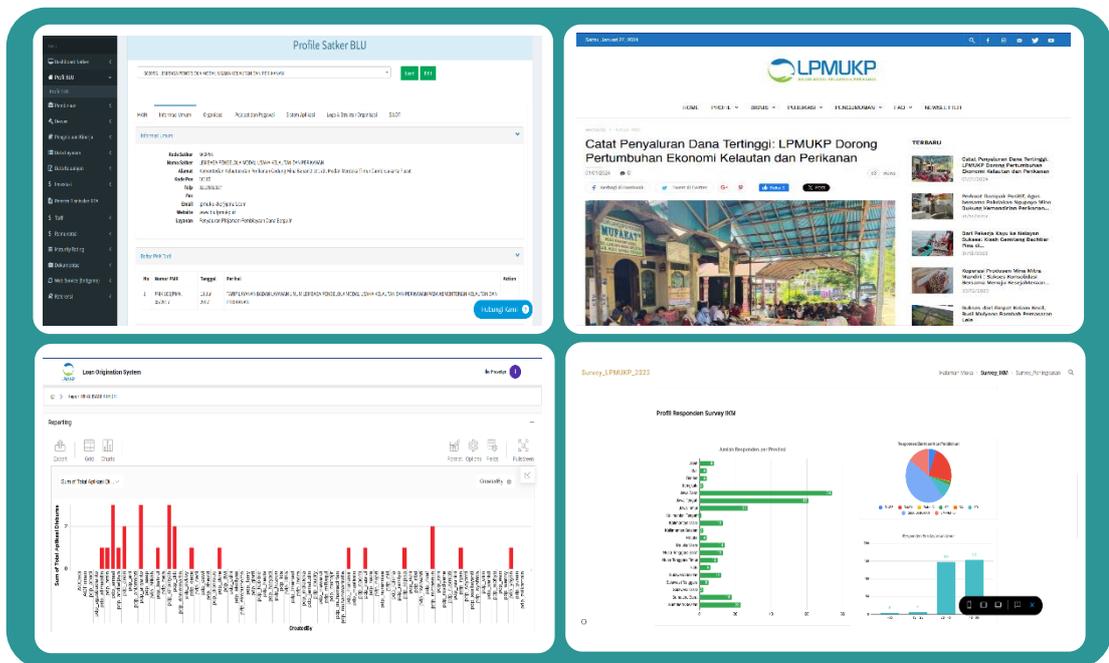
Realisasi Modernisasi BLU = Nilai Tahapan (0,8% + 14% + 16% + 10% + 10%)

$$= 50,8\%$$

Capaian Modrenisasi BLU = $\frac{50,8\%}{100\%}$

$$= 50,8\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi Modernisasi BLU LPMUKP tahun 2023 adalah sebesar 50,8% dengan target sebesar 100%. Sehingga capaian Modernisasi BLU Tahun 2023 adalah sebesar 50,8%.



Gambar 3.7 Realisasi Tahapan Modernisasi BLU

D. Perbandingan Capaian Realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya dan Perbandingan Target Resntra 2024

Realisasi penyelesaian modernisasi BLU Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 dengan penurunan sebesar 32,04%. Kemudian, jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 capainnya tetap sebesar 50,8% dikarenakan target pada Tahun 2024 relatif sama dengan Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Modernisasi BLU

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-4		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
90%	60%	95%	97%	74,75%	100%	50,8%	50,8	-32,04	100%	50,8	100%	50,8	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Modernisasi BLU mengalami realtif mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan pada setiap tahunnya, Manual IKU Modernisasi BLU dilakukan pembaharuan/penyesuaian dan setiap tahun mengalami peningkatan untuk pengelolaan modernisasi BLU tersebut.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Tahun 2024, maka capaian realisasi Tahun 2023 adalah sama, yaitu sebesar 50,8%, hal tersebut dikarenakan target Modernisasi BLU pada Tahun 2024 telah mencapai nilai maksimum (100). Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa untuk manual IKU nya akan mengalami penyesuaian pada Tahun 2024.

Untuk perbandingan realisasi Modernisasi BLU, terdapat BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah merilis secara resmi terkait dengan perhitungan kinerja tahun 2023. Nilai capaian modernisasi BLU LPMUKP pada Tahun 2023 adalah sebesar 50,8%, sementara nilai capaian modernisasi BLU BPD LH mencapai 114,47% dari target yang yang sama yaitu 100%. Rendahnya nilai modernisasi BLU pada LPMUKP diakibatkan dari tidak adanya SDM khusus yang menangani bidang teknologi informasi serta kriteria penilaian yang cukup kompleks. Namun demikian, informasi lebih detail mengenai kriteria penilaian modernisasi BLU pada BPD LH belum dapat dijabarkan dikarenakan belum ada dokumen laporan kinerja Tahun 2023 yang telah dirilis secara resmi. (sumber: <https://bpdlh.id/reports>)

E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Permasalahan yang terjadi pada Indikator Kinerja Modernisasi BLU pada Tahun 2023 disebabkan oleh hal yang relatif sama dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terkait dengan integrasi data yang merupakan tahapan dengan nilai paling tinggi, LPMUKP belum memiliki infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai.
2. LPMUKP hingga saat ini belum mempunyai SDM yang mumpuni/mahir di bidang Teknologi Informasi, sehingga kegiatan-kegiatan yang terkait Teknologi Informasi belum dapat direalisasikan secara optimal, termasuk pemetaan sistem informasi apa saja yang sesuai dengan kebutuhan LPMUKP, serta inetgrasi data yang harus dikoneksikan kepada sistem BIOS PPK BLU juga memerlukan SDM yang memahami terkait dengan Teknologi Informasi.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2023, LPMUKP akan mengupayakan beberapa hal berikut:

1. LPMUKP akan melakukan pemenuhan SDM di bidang Teknologi Informasi di Tahun 2024, dan bila tidak dimungkinkan, LPMUKP akan memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan bagi pegawai yang memiliki minat di bidang Teknologi Informasi.
2. Melakukan koordinasi dengan Pusdatin KKP, untuk meminta dukungan terkait dengan hal-hal yang dapat diakomodir oleh Pusdatin, termasuk sebagai pengarah dalam hal pengadaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di lingkup LPMUKP.
3. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan bagian sistem informasi PPK BLU untuk memenuhi tahapan-tahapan yang akan dinilai begitu Manual IKU Modernisasi BLU ditetapkan.

3.2.5. Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP (Indikator Kinerja 05)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan BLU dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM diukur dengan angka, yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Kemudian, IKM diukur berdasarkan hasil survei, yang merupakan gabungan dari indeks kuantitatif dan indeks kualitatif sebagai berikut:

Tabel 3.14 Indeks Kuantitatif dan Kualitatif dalam Pengukuran Nilai IKM

Indeks Kuantitatif		Indeks Kualitatif	
Skala 1 – 4	Sakala 1 – 100	Predikat	Predikat
1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,59	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,60 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan survei ini menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun unsur-unsur kepuasan adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) Biaya
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) Produk spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 6) Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Pada dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP, Indikator Kinerja Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP baru ditargetkan pada Tahun 2023. Namun demikian, untuk Perjanjian antara Direktur LPMUKP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Indikator Kinerja ini telah diberlakukan sejak Tahun 2022.

Terkait dengan tindak lanjut pada Indikator Kinerja Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP pada Tahun 2022 yang menjadi rekomendasi untuk Tahun 2023, LPMUKP telah melakukan beberapa hal berikut:

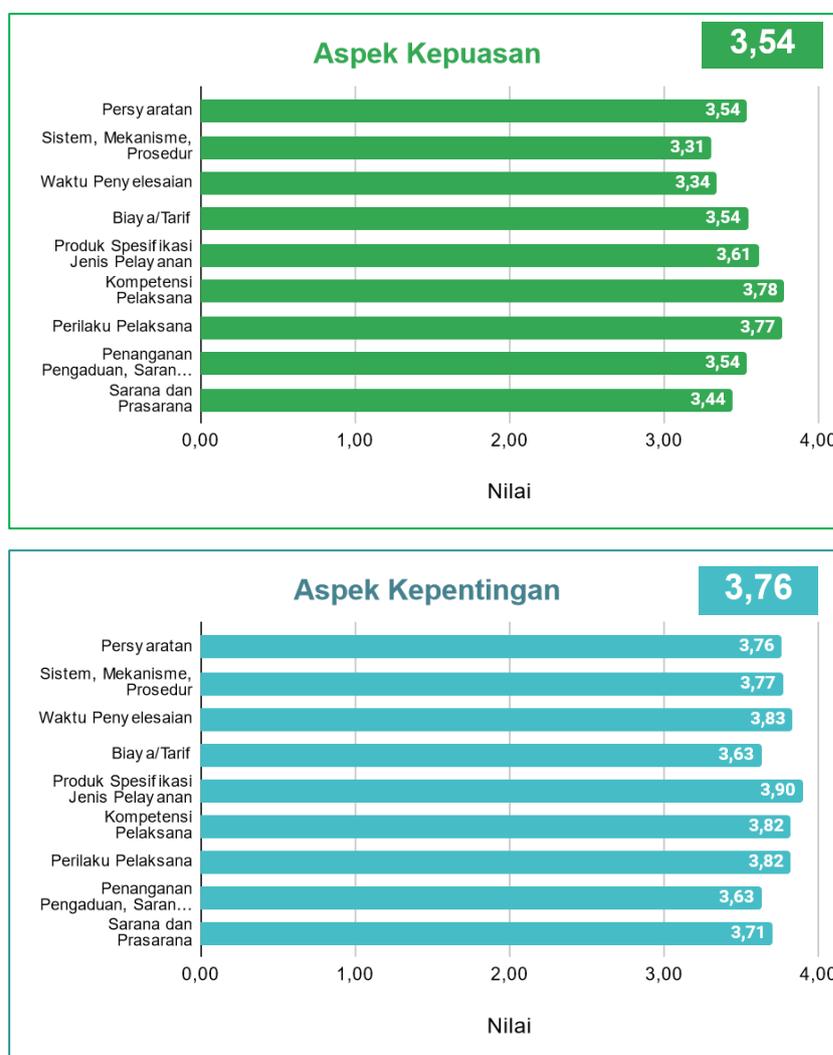
1. Terkait dengan perbaikan waktu penyelesaian, LPMUKP telah menindaklanjuti dengan pemberlakuan proses proposal yang *clean and clear* di awal, termasuk pengecekan karakter calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK), sehingga tidak lagi terdapat proposal dengan status 2A (belum lengkap), atau 2B (sudah lengkap), proposal yang akan diproses, seluruhnya harus sudah lengkap, baru proposal tersebut akan diterima dan argo terhadap proposal tersebut baru berjalan. Jika proposal tersebut belum lengkap maka akan dikembalikan terlebih dahulu untuk dilengkapi dan diajukan kembali setelah lengkap.
2. Terhadap unsur kompetensi pelaksana, LPMUKP telah melakukan beberapa pelatihan terhadap pelaksana LPMUKP baik pendamping di daerah maupun pelaksana LPMUKP.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan pada bulan November 2023 melalui media form kuesioner yang disebarakan secara *online* melalui para pendamping LPMUKP yang merupakan kepanjangan tangan dari LPMUKP untuk melakukan pelayanan pada debitur atau mitra LPMUKP yang berada di daerah.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dilakukan di 20 Provinsi yang terdapat pencairan dana bergulir di tahun 2023, dengan sampel sebanyak 310 orang yang mewakili 1.442 pemanfaat yang merupakan populasi dari debitur LPMUKP dan merupakan pemanfaat penerima dana bergulir tahun 2023 yang masih memiliki tenaga pendamping aktif di Lokasi Layanan Pendampingannya. Responden tersebut sangatlah beragam baik dari usia maupun dari latar belakang pendidikan.

Hasil pelaksanaan survey tersebut, LPMUKP mendapatkan rata-rata nilai pada aspek kepuasan adalah sebesar 3,54 dan untuk nilai rata-rata pada aspek kepentingan adalah sebesar 3,76. Unsur yang berkontribusi membirkan nilai tertinggi pada aspek kepuasan adalah Kompetensi Pelaksana, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah Sistem, Mekanisme, Prosedur. Kemudian, pada aspek kepentingan unsur yang memerikan nilai tertinggi adalah produk spesifikasi jenis pelayanan, dan unsur dengan nilai terendah adalah biaya/tarif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.



Gambar 3.8 Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Aspek Kepuasan dan Kepentingan

Selanjutnya jika dituangkan dalam skala likert yang dihitung berdasarkan nilai interval serta konversi nilai interval, maka nilai kepuasan dan kepentingan layanan LPMUKP yang disurvei berada pada kategori sangat baik dimana aspek kepuasan mendapatkan nilai 3,54 atau jika dikonversikan menjadi 88,50. Sedangkan untuk nilai kepentingan LPMUKP mendapatkan nilai 3,76 atau sebesar 94,00 jika dikonversikan. Untuk lebih jelasnya nilai capaian dan nilai konversi terhadap aspek kepuasan dan kepentingan dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Aspek, Nilai Hasil, Nilai Hasil Dikonversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Aspek	Nilai Hasil	Nilai Hasil Dikonversi	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
Kepuasan	3,54	88,50	A	Sangat Baik
Kepentingan	3,76	94,00	A	Sangat Baik

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP} &= \frac{88,50\%}{80\%} \\ &= 110,63\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, realisasi Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP pada Tahun 2023 adalah sebesar 88,50% dengan target sebesar 80%, sehingga capaian pada IKU ini adalah sebesar 110,63%.

D. Perbandingan Capaian Realisasi Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Jika realisasi Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, maka terjadi kenaikan capaian sebesar 4,42%. Sementara jika dibandingkan dengan target Renstra 2024 maka nilai capaian Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP Tahun 2023 adalah sebesar 104,12%. Sementara itu, trend realisasi nilai IKM LPMUKP cukup fluktuatif, dan untuk lebih jelasnya, perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-5		Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
82,50	86,00	83,25	85,25	84,75	80	88,50	110,63	4,42	80	110,63	85	104,12	

Terjadinya kenaikan nilai realisasi dan capaian pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya dikarenakan LPMUKP telah memperbaiki beberapa mekanisme penyaluran terutama pengajuan proposal yang harus *clean and clear* sehingga secara psikologis dinilai lebih cepat karena argo perhitungan hari proses proposal dimulai pada saat LPMUKP benar-benar menerima proposal tersebut dalam kondisi lengkap, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih menerima proposal yang belum lengkap, namun proposal tersebut tidak dikembalikan melainkan tetap diterima sembari dilengkapi dokumennya, sehingga calon debitur merasa bahwa proposal sudah masuk sejak lama namun belum juga selesai prosesnya. Kemudian juga terkait dengan peningkatan pada kompetensi pelaksana yang diberikan pelatihan/pembekalan, sehingga kompetensi pelaksana yang merupakan poin tertinggi kedua pada aspek kepentingan telah ditindaklanjuti oleh LPMUKP.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan usulan target Tahun 2024, target Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP adalah sebesar 85 (rentang nilai 1 – 100). Sehingga nilai capaian Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024 adalah sebesar 104,12%. Target tersebut sudah dinaikkan sebesar 5 poin dari target Tahun 2023. Kenaikan tersebut didasari oleh tercapainya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP pada Tahun 2023.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP akan dibandingkan dengan BLU BPD LH yang telah merilis perhitungannya secara resmi. Realisasi Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP Tahun 2023 adalah 3,54 dengan target 3,4. Sedangkan pada BLU BPD LH realisasinya adalah 3,7 dari target 3,6. Pada IKU ini terdapat perbedaan skala perhitungan dimana LPMUKP menggunakan skala perhitungan 1-4, dan BPD LH menggunakan skala perhitungan 1-5. Namun dalam hal pencapaian, baik LPMUKP maupun BPD LH telah mencapai target Tahun 2023.

E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Jika dilihat dari unsur-unsur yang dinilai, rata-rata hasil penilaian pada setiap unsur sebetulnya berada di atas nilai 3 (tiga) yang menunjukkan bahwa secara umum layanan yang diberikan LPMUKP pada Tahun 2023 sudah memuaskan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap unsur yang memiliki nilai tertinggi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor keberhasilan pertama terletak pada proses percepatan layanan penyaluran dana bergulir yang memberlakukan kondisi proposal *clean and clear* di awal sehingga dari awal proposal diterima harus sudah dalam kondisi lengkap sesuai dengan persyaratan proposal yang diberlakukan, kemudian juga proposal tersebut dilengkapi dengan hasil pengecekan karakter calon debitur, sehingga usulan proposal pinjaman dana bergulir tersebut sudah dapat dinilai layak atau tidaknya dari pertama mengusulkan, terutama jika dilihat dari hasil SLIK nya menunjukkan bahwa karakter calon debitur tersebut tidak baik (memiliki histori kredit macet). Kondisi proposal yang proses nya relatif lebih cepat tersebut membuat nilai pada unsur waktu penyelesaian bukan lagi menjadi unsur dengan nilai terendah tetapi unsur waktu penyelesaian tersebut memiliki nilai 3,34 yang relatif naik jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai 3,11.
2. Selanjutnya, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana menjadi unsur dengan perolehan rata-rata nilai tertinggi pada aspek kepuasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya kompetensi pelaksana maupun perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada calon debitur ataupun debitur dinilai sudah memuaskan. Kondisi tersebut memang selaras dengan pelayanan LPMUKP yang mengedepankan konsep pemberdayaan yang dikombinasikan dengan pemberlakuan tarif layanan yang terjangkau, sehingga sebetulnya layanan LPMUKP masih dinilai memuaskan bagi masyarakat.

Kemudian, terkait dengan rencana aksi periode selanjutnya, LPMUKP akan terus meningkatkan layanan dengan mengacu pada hal yang perlu diperbaiki berdasarkan matriks *Importance Performance Analysis* dimana unsur produk spesifikasi jenis pelayanan meskipun berada di atas nilai 3 (tiga), namun demikian unsur tersebut merupakan unsur dengan nilai terendah, sehingga LPMUKP perlu melakukan pengembangan produk spesifikasi jenis pelayanan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung pengembangan produk spesifikasi jenis layanan dimaksud.

3.2.6. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (Indikator Kinerja 06)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Peningkatan usaha debitur penerima pelatihan usaha merupakan peningkatan dari sisi produktivitas debitur sebelum dan sesudah menerima pelatihan/pendampingan usaha dari debitur.

Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha dihitung dengan membandingkan jumlah debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha yang mengalami peningkatan produktivitas usaha minimal 30% dari sebelum pelatihan/pendampingan usaha terhadap jumlah seluruh debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh BLU LPMUKP pada tahun 2023.

Jadi, usaha yang dilakukan oleh debitur harus mengalami peningkatan sebesar minimal 30% dari sebelum dilakukannya pendampingan/pelatihan. IKU ini bertujuan mengukur dampak (outcome) program pendampingan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BLU LPMUKP sebagai bagian dari pendampingan kepada pemanfaat/end user. Untuk menghitung realisasi Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan adalah sebagai berikut:

$$\text{PPUDPP} = \frac{\text{Debitur yang Mengalami Peningkatan Usaha}}{\text{Jumlah debitur LPMUKP Tahun 2023}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian PPUDPP} = \frac{\text{PUDPP}}{\text{Target PPUDPP}}$$

PPUDPP : Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pendampingan/Pelatihan

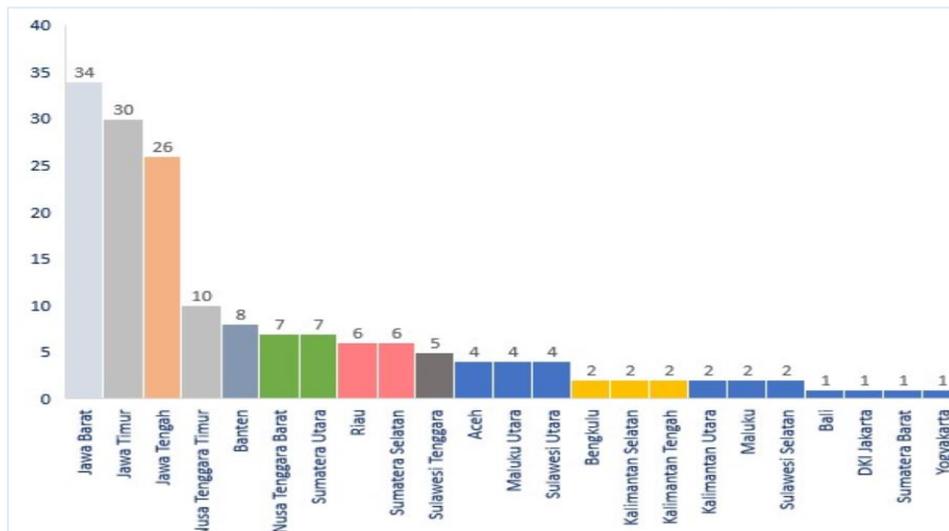
B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha baru ditargetkan pada Perjanjian Kinerja antara Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP di Tahun 2023 sama seperti halnya Indikator Kinerja indeks kepuasan pemanfaat atas layanan LPMUKP. Sementara itu, sebetulnya Indikator Kinerja ini telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja antara Direktur LPMUKP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Selanjutnya, rekomendasi dari hasil realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2022 adalah LPMUKP agar terus mengupayakan pelaksanaan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan pelayanan dana bergulir kepada masyarakat.

Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penerapan mitigasi risiko pada proses penyaluran dana bergulir LPMUKP dari mulai pengusulan proposal, penilaian proposal, analisa kelayakan usaha, proses komite pinjaman, pencairan, hingga pasca pencairan.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Pengukuran pada IKU Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha dilaksanakan melalui pengisian formulir secara *online* oleh pendamping kepada debitur LPMUKP yang berada di daerah sebagai salah satu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh LPMUKP pada Tahun 2023. Target dari survey ini adalah para pelaku usaha yang menjadi mitra LPMUKP dan pinjamannya direalisasikan sepanjang Tahun 2023 dan minimal telah melakukan produksi usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari LPMUKP agar dapat menjadi dasar pengukuran atas peningkatan usaha. Jumlah debitur yang digunakan sebagai perhitungan dalam survei ini adalah sebanyak 167 debitur yang tersebar di 23 Provinsi di Indonesia, berdasarkan data realisasi penyaluran pada tahun 2023.

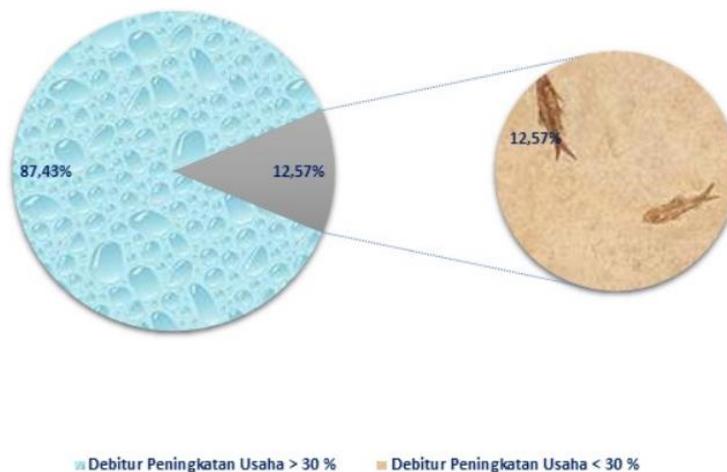


Gambar 3.9 Sebaran Responden Survey Peningkatan Usaha Debitur

Sumber Daya Alam dan penguasaan teknologi dari Sumber Daya Manusia, berperan sangat penting terhadap sektor usaha yang dijalankan, sektor usaha budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan serta pemasaran sudah marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia sehingga kondisi tersebut memperkuat dukungan pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan memang berjalan dan telah memperoleh akses pasar yang jelas. Sementara itu, untuk usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya yang merupakan usaha kedai pesisir atau usaha pariwisata belum banyak masyarakat yang menjalankan usaha tersebut dikarenakan

tidak semua masyarakat dapat melakukan usaha tersebut mengingat perlu adanya kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.

Jumlah debitur yang terlibat dalam pelaksanaan survey peningkatan usaha debitur merupakan debitur yang telah memenuhi kriteria sebagai responden, salah satunya adalah telah melakukan produksi minimal satu kali sepanjang tahun 2023. Diharapkan debitur yang telah diberikan dukungan pembiayaan untuk pengembangan usaha tersebut memang meraih kenaikan produktivitas setelah dilakukannya pembiayaan LPMUKP dibandingkan sebelum dilakukannya pembiayaan. Adapun untuk jumlah debitur yang mengalami kenaikan sebesar 30% dan debitur yang kenaikan produktivitasnya masih dibawah 30% dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3.10 Proporsi Peningkatan Usaha Debitur

Dari total 167 debitur yang disurvei, terdapat 146 debitur yang mengalami peningkatan produktivitas usaha yang lebih dari atau sama dengan 30%. Sementara itu, terdapat 21 debitur yang peningkatan produktivitas usahanya masih dibawah 30%. Dengan begitu, realisasi IKU ini adalah sebesar 87,43% dengan target 80%, maka capaiannya adalah sebesar 109,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPUDPP} &= \frac{146}{167} \times 100\% = 87,43\% \\
 \text{Capaian PPUDPP} &= \frac{87,43\%}{80\%} = \mathbf{109,29\%}
 \end{aligned}$$

Terkait dengan rincian debitur yang disurvei beserta data hasil surveynya secara lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran IKU Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha.

D. Perbandingan Capaian Realisasi Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha Tahun 2023 dengan periode Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,17%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Tahun 2024, capaian realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 102,86%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Realisasi Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-6		Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	80,83	80	87,43	109,29	8,17	80	109,29	85	102,86	

Kenaikan capaian pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh penyaluran dana bergulir pada Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP berupa program penangkapan ikan terukur, dan kampung budidaya dengan target penerima dana adalah koperasi perikanan atau kelompok usaha kelautan dan perikanan yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Dampak positif usaha secara bersama yang dikelola dengan baik dan benar akan lebih berdampak dibandingkan dengan usaha perorangan.

Kemudian, target tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5% dikarenakan ketercapaian IKU Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan /Pendampingan di Tahun 2023. Selain itu capaian Tahun 2023 masih dapat melampaui target Tahun 2024, namun bukan berarti pencapaian realisasi tersebut dapat dilakukan dengan mudah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas dari para debitur LPMUKP.

Hingga saat ini belum ada data dari BLU lain yang dapat digunakan untuk membandingkan IKU Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan dikarenakan berkaitan dengan pendampingan, memang baru LPMUKP yang memiliki keterlibatan pendamping dalam melakukan proses bisnisnya.

E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IKU Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan adalah penerima pinjaman dana bergulir telah melalui tahapan mitigasi risiko dimana pinjaman yang diberikan telah diverifikasi baik dari kelayakan usaha, dari rencana anggaran biaya, serta dari penyertaan jaminan. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada kelangsungan usaha debitur yang menerima pinjaman dana bergulir, dan tentunya diharapkan sesuai dengan tujuan LPMUKP memberikan pembiayaan yaitu agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Sedangkan untuk mempertahankan atau meningkatkan pencapaian kinerja kedepan, LPMUKP akan terus mengupayakan pelaksanaan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan pelayanan dana bergulir kepada masyarakat.

3.2.7. Nilai PM SAKIP LPMUKP (Indikator Kinerja 07)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Penilaian SAKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam LKE sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a) Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b) Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c) Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagaimana pada **Tabel 3.18**.

Tabel 3.18 Sub Komponen Penilaian dan Predikat PM SAKIP

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	6	9	15	30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
Total	20	30	50	100

Sedangkan untuk kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP LPMUKP merupakan perubahan dari Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup LPMUKP pada Tahun 2022. Tentunya kedua IKU tersebut memiliki sunstansi penilaian yang berbeda, dan Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP LPMUKP maupun Nilai PM SAKIP level II baru dijadikan sebagai Indikator Kinerja pada Tahun 2023, sehingga belum memiliki rencana aksi yang harus ditindaklanjuti berdasarkan evaluasi rencana aksi maupun laporan kinerja Tahun 2022.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal KKP dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2023, berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023, hasil penilaian PM SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal KKP

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas		Predikat
					Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	
1	Biro Perencanaan	27,60	24,00	13,80	20,00	85,40	A
2	Biro SDMAO	25,80	24,60	13,80	20,50	84,70	A
3	Biro Hukum	27,00	24,60	13,50	22,50	87,60	A
4	Biro Humas dan KLN	25,20	24,00	11,10	23,00	83,30	A
5	Biro Keuangan	27,00	24,00	12,00	22,50	85,50	A
6	Biro Umum dan PBJ	24,60	23,70	12,75	19,25	80,30	A
7	Pusdatin	27,90	24,00	12,75	22,50	87,15	A
8	BPISDKP	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A
9	LPMUKP	22,20	22,80	11,10	18,50	74,60	BB

$$\begin{aligned} \text{Nilai PM SAKIP LPMUKP} &= 22,20 + 22,80 + 11,10 + 18,50 \\ &= \mathbf{74,60} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Nilai PM SAKIP LPMUKP} &= \frac{74,60}{80,5} = \mathbf{92,67\%} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan realisasi Nilai PM SAKIP adalah sebesar 74,60 dengan target 80,5, sehingga nilai capaiannya adalah sebesar 92,67%.

Berdasarkan dokumen hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal, penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara umum pada LPMUKP Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan di lingkup LPMUKP telah tersedia, memenuhi standar yang baik, menggunakan penyelarasan sampai dengan ke level individu secara logis dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Seluruh kriteria pada perencanaan kinerja telah terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.

Pada Renstra Setjen 2020-2024 terdapat 1 IKU yaitu IKU Realisasi UMKM kelautan dan perikanan penerima modal usaha (KUKP) yang tidak ada pada PK 2022-2023 akibat penggabungan IKU. Terhadap IKU perubahan tersebut perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen Renstra Setjen 2020-2024 dan beberapa dokumen lainnya pada tahun 2023 guna menjamin keselarasan perencanaan kinerja.

Dokumen tambahan yang menjadi dokumen pendukung pada aspek perencanaan ada yang belum lengkap seperti matriks analisa SMART, matriks cascading, dan beberapa SKP pegawai serta dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam perencanaan kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada LPMUKP telah dilakukan secara berkala dan telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. Namun pengukuran secara berjenjang dari level III dan IV belum terkelola dengan baik, ini terlihat dari belum adanya laporan secara resmi dari level III dan IV karena masih sebatas pengumpulan raw data ke pimpinan.

Manual IKU sudah disusun dengan baik, namun belum dilampirkan alur proses pengumpulan data untuk setiap indikator.

Penerapan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kontrak kinerja pegawai di informasikan telah dilakukan, namun belum bisa diperlihatkan mekanisme yang jelas atau aturan di internal LPMUKP.

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap seluruh pegawai LPMUKP terkait pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja, terlihat seluruh pegawai telah memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja perlu terus didorong untuk memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan program/kegiatan lingkup LPMUKP untuk perencanaan ke depan yang lebih baik sehingga dapat terus mengoptimalkan peningkatan pencapaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKJ) LPMUKP Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 telah tersedia dan telah disahkan oleh pimpinan. Dokumen LKJ telah menggambarkan kinerja, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya.

Guna peningkatan kualitas pelaporan kinerja perlu meningkatkan kualitas penyajian informasi secara detail dan menginfokan analisis dan evaluasi atas efisiensi sumber daya, realisasi kinerja dengan jangka menengah serta penguangan upaya tindak lanjut atas rekomendasi pada setiap periode pelaporan kinerja.

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pegawai tentang kepedulian terhadap laporan kinerja, sebanyak 100% pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Untuk mempertahankan hal ini, perlu terus melakukan internalisasi atas informasi pada laporan kinerja pada setiap pegawai di lingkungan LPMUKP.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan secara baik oleh SDM yang memadai. Tindaklanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja melalui rekonsiliasi kinerja telah ditindaklanjuti seluruhnya. Namun terjadi penurunan nilai rekon kinerja dari tahun 2021 ke 2022.

Dari keseluruhan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, LPMUKP perlu terus mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat lebih memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk peningkatan pencapaian seluruh target kinerja.

D. Perbandingan Capaian Realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP Tahun 2023 dengan periode Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Nilai PM SAKIP LPMUKP merupakan Indikator Kinerja yang baru dilakukan pengukuran kinerja pada Tahun 2023, sebelumnya Indikator Kinerja ini merupakan Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP yang memiliki substansi penilaian yang berbeda, sehingga nilai realisasinya tidak dapat dibandingkan. Sementara itu untuk perbandingan dengan target Tahun 2024, Nilai PM SAKIP LPMUKP Tahun 2023 memperoleh capaian sebesar 88,81%. Untuk lebih jelasnya, realisasi capaian PM SAKIP Tahun 2023 dan perbandingan dengan target Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-6		Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	80,5	74,60	92,67	-	80,5	92,67	84	88,81	

Peningkatan target pada Tahun 2024 merupakan penyesuaian yang disepakati di lingkup Sekretariat Jenderal, sehingga bagi LPMUKP yang nilai capaiannya belum optimal, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri agar perolehan Nilai PM SAKIP LPMUKP pada Tahun 2024 dapat mencapai hasil yang optimal.

E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Penyebab tidak tercapainya target Nilai PM SAKIP LPMUKP dikarenakan terdapat beberapa variabel dalam sub komponen penilaian yang tidak dapat dipenuhi oleh LPMUKP pada Tahun 2023 atas pelaksanaan SAKIP Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Selanjutnya, terkait dengan permasalahan yang dialami pada Penilaian Mandiri SAKIP LPMUKP Tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaporan atas kinerja bawahan (level III dan IV) belum disampaikan secara baik, perlu dibuatkan format tersendiri atas laporan kinerja di level bawah
2. Indikator kinerja pada Renstra jika terjadi pengurangan/penghilangan perlu dijelaskan lebih lanjut dalam berita acara yang disepakati oleh Biro Perencanaan dan Mitra Sekretariat Jenderal
3. Keterlibatan pimpinan dalam pencapaian kinerja perlu didokumentasikan
4. Mengawal capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya agar lebih baik di tahun berikutnya
5. Analisa dan evaluasi atas perbandingan-perbandingan yang perlu ada pada LKJ agar di narasikan secara baik
6. Rekomendasi atas perbaikan kinerja yang ada pada LKJ agar ditindaklanjuti dan terimplementasi di dalam dokumen kinerja lainnya
7. Dokumen agar terpublikasi secara baik dan berkala pada website LPMUKP
8. Melengkapi seluruh dokumen yang belum dilampirkan, antara lain:
 - SKP seluruh pegawai yang ditandatangani
 - Matriks analisis SMART
 - Matriks tindaklanjut atas saran/rekomendasi pada LKJ
 - Alur proses pengumpulan data pada manual IKU
 - Sertifikat SDM pengelola kinerja

3.2.8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP (Indikator Kinerja - 08)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Penilaian kinerja anggaran berdasarkan diukur dengan mengukur beberapa aspek yaitu:

- **Aspek Implementasi** adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya;
- **Aspek Manfaat** adalah evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L;
- **Aspek Konteks** adalah evaluasi kinerja anggaran untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKAKL termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Terkait dengan rekomendasi pada periode sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran yang belum optimal dikarenakan dari nilai realisasi output yang belum diinput secara menyeluruh oleh LPMUKP, serta belum dilakukannya penyesuaian pada rencana penarikan dana sehingga mengakibatkan nilai konsistensi tidak optimal. Maka berdasarkan rekomendasi dalam hal penginputan realisasi output, LPMUKP telah melakukan input nilai pada realisasi output secara menyeluruh dikarenakan memang beberapa output baru terealisasi secara penuh pada bulan Desember, seperti pemanfaat atau dalam target RO adalah UMKM, baru mendapatkan jumlah yang signifikan pada bulan Desember sesuai dengan jumlah penyalurannya. Kemudian output yang berupa laporan juga beberapa baru dapat terpenuhi pada bulan Desember dikarenakan penyusunannya selesai pada bulan tersebut.

Untuk konsistensi, LPMUKP telah melakukan penyesuaian pada Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi dan rencana penarikan bulan selanjutnya. Terakhir, terkait dengan efisiensi, LPMUKP memang tidak menyerap anggaran secara besar dikarenakan LPMUKP mengedepankan realisasi output daripada realisasi anggaran itu sendiri, sehingga memang nilai efisiensi LPMUKP terealisasi secara optimal.

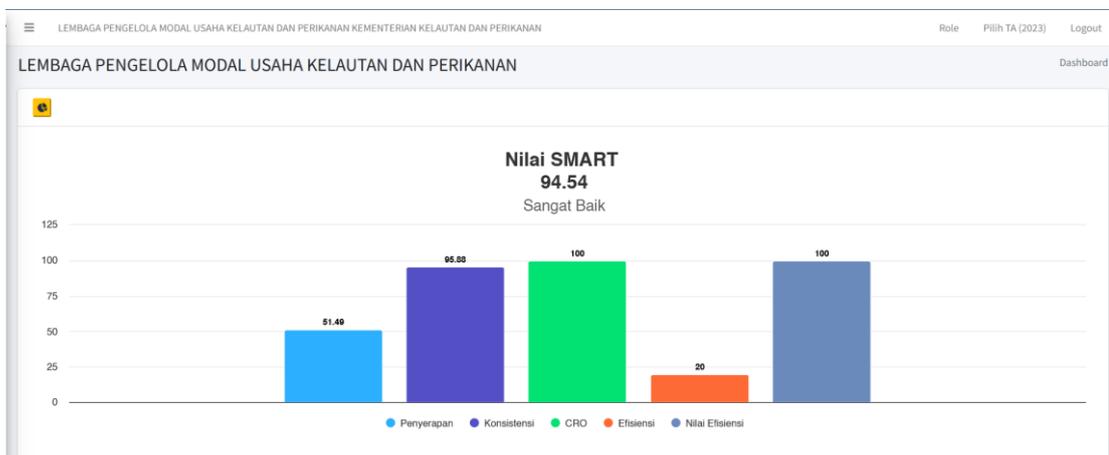
C. Realisasi dan Perhiungan Capaian Tahun 2023

Pada Tahun 2023 target Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP adalah sebesar **82**, dengan periode pelaporan Tahunan dan polarisasi Maximize, dimana semakin besar realisasi capaian maka semakin besar nilai kinerja anggaran yang diperoleh.

Realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP pada Tahun 2023 diukur menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu dan disampaikan melalui Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 83/SJ.2/TU.210/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Sekretariat Jenderal KKP Triwulan IV Tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar **94,54** yang dapat dijabarkan berdasarkan tabel 3.21 dan grafik yang dapat dilihat pada **Gambar 3.21**.

Tabel 3.21 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal KKP

No	Kode Satker	Nama Satker	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	622081	Biro Umum dan Pengadaan	83,43	99,21	84,86	100,00	0,79	51,98
2	632004	Barang/Jasa BPISDKP	87,40	97,17	99,37	100,00	2,83	57,07
3	660056	LPMUKP	94,54	51,49	95,88	100,00	20,00	100,00



Gambar 3.11 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART

Realisasi nilai SMART tersebut merupakan realisasi nilai kinerja anggaran LPMUKP, sehingga secara perhitungan, apabila realisas dibandingkan dengan target maka capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP adalah sebesar **115,29%**.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP} &= \frac{94,54}{82} \times 100\% \\
 &= 115,29\%
 \end{aligned}$$

D. Perbandingan Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2023 relatif mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2022. Kenaikan yang dialami LPMUKP pada realisasi capaian NKA adalah sebesar 3,54%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2024, maka capaian realisasi NKA pada Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024 adalah sebesar 109,93% dengan rincian perbandingan capaian yang dapat dilihat pada **Tabel 3.22**.

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-8		Nilai Kinerja Anggaran BLU LPMUKP											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	92,03	77,45	80,19	82	94,54	115,29	17,89	82	115,29	84	109,93	

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP lebih tinggi dengan kenaikan capaian sebesar 17,89%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022, LPMUKP melaksanakan realisasi anggaran yang tinggi tanpa diimbangi dengan realisasi capaian Output, sehingga pelaksanaan anggaran LPMUKP dinilai kurang efisien.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024, capaian realisasi NKA 2023 adalah sebesar 109,93%. Kenaikan target pada tahun 2024 tetap akan memperhatikan performa NKA pada tahun selanjutnya. Namun demikian, LPMUKP sesuai arah dan kebijakan, akan lebih berfokus kepada efisiensi anggaran dimana realisasi anggaran yang digunakan harus mendukung Output khususnya pada realisasi output pemanfaat penerima dana bergulir.

E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran dikarenakan LPMUKP mengedepankan realisasi pencapaian output pada target Rincian Output yang telah disepakati dan juga nilai efisiensi yang cukup tinggi yang merupakan dampak dari rendahnya nilai realisasi penyerapan anggaran namun realisasi outputnya tinggi. Selain itu keberhasilan pada pencapaian target NKA, juga dipengaruhi oleh konsistensi pada rencana penarikan dana.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi capaian IKU NKA Tahun 2024, LPMUKP akan menyelaraskan antara penyerapan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian output kinerja LPMUKP. Sehingga harapannya baik dari sisi penyerapan maupun sisi capaian output dapat terealisasi secara optimal dan berimbang, hal tersebut tentunya juga akan menunjang poin efisiensi jika capaian realisasi output mendapatkan capaian yang optimal.

3.2.9. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Indikator Kinerja – 09)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka LPMUKP akan mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar. Dengan adanya dukungan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja tersebut, diharapkan LPMUKP dapat berkontribusi terhadap *sharing knowledge* lingkup KKP agar dapat menambah wawasan antar pegawai dan pejabat lingkup KKP.

Penilaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan menggunakan platform *Portal Collaboration Office* melalui Satuan Kerja PUSDATIN sebagai koordinator dari Indikator Kinerja tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek yaitu aspek kelengkapan dokumen, aspek keikutsertaan serta aspek keaktifan.

Kedepannya, IKU Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar yang diterapkan melalui platform *Portal Collaboration Office* dapat menjadi sebuah sarana untuk bertukar informasi dan berbagi wawasan antar pegawai KKP, agar setiap pegawai KKP mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di lingkup KKP.

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Menindaklanjuti rencana aksi yang dibuat pada Laporan Kinerja periode Triwulan III Tahun 2023 terkait dengan Indikator Kinerja Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh LPMUKP dalam upaya mengoptimalkan realisasi IKU MP:

1. Koordinasi dengan Pusdatin dilakukan terkait dengan nilai maksimum capaian kinerja Manajemen Pengetahuan yang Terstandar yang ternyata bisa mendapatkan nilai capaian di atas 100% dengan nilai maksimum 133,33% apabila posting yang dilakukan melebihi 3 poin.

2. Monitoring user telah dilakukan sehingga nilai capaian LPMUKP pada Triwulan IV mendapatkan capaian poin sebesar 4 poin dengan capaian nilai sebesar 133,33% atau nilai maksimum.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Selanjutnya, berdasarkan memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 20/SJ.7/TU.210/I/2024 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Triwulan IV 2023, realisasi target LPMUKP periode Triwulan IV adalah sebesar 133,33% dari target sebesar 92%. Berbeda dengan beberapa periode sebelumnya, pada periode Triwulan IV tahun 2023, Indikator Kinerja Manajemen Pengetahuan yang Terstandar diukur menggunakan platform *Protal Collaboration Office* yang dapat diakses melalui <https://portal.kkp.go.id>. Platform tersebut mirip dengan aplikasi *bitrix24* yang biasa digunakan hanya fitur yang tersedia masih relatif belum begitu lengkap seperti *bitrix*. Kemudian perbedaan pengisian pada *Collaboration Office* hanya dilakukan pada level 2 atau pada eselon 2, dan belum mengakomodir untuk penyimpanan dokumen sehingga penilaian hanya dilakukan berdasarkan aspek keaktifan saja. Realisasi persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Rincian Realisasi IKU MP berdasarkan Satuan Kerja lingkup Setjen periode Triwulan IV Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Triwulan				Capaian	Target	%
		I	II	III	IV			
1	Biro Perencanaan	100,00	100,00	116,67	133,33	112,50	92,00	122,28
2	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
3	Biro Keuagam	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
4	Biro SDMAO	100,00	99,68	116,67	133,33	108,25	92,00	117,67
5	Biro Hukum	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	92,59	98,25	100,00	133,33	106,04	92,00	115,26
7	Pusat Data, Statistik dan Informasi	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
8	LPMUKP	100,00	100,00	100,00	133,33	108,33	92,00	117,75

Sementara itu, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka nilai capaian LPMUKP adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Persentase MP} &= \frac{108,33\%}{117,75\%} \\ &= 117,75\% \end{aligned}$$

Terjadi permasalahan pada aplikasi *Collaboration Office* sehingga tidak bisa menampilkan informasi terakait dengan dokumentasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar periode Tahun 2023, sehingga tidak dapat menampilkan dokumentasi bukti penginputan pada aplikasi dimaksud.

D. Perbandingan Capaian Realisasi Manejemen Pengetahuan Terstandar Lingkup LPMUKP Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Realisasi Indikator Kinerja Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada periode Triwulan IV Tahun 2023 jika dibandingkan dengan periode Triwulan IV Tahun 2022 relatif mengalami kenaikan sebesar 2,11%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 sebesar 94 capaian realisasi Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 111,11%. Untuk lebih jelasnya terkait dengan perbandingan realisasi Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-9		Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2022	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	95,56	97,45	98,44	92	108,33	117,75	10,05	92	117,75	94	115,24	

Kenaikan realisasi pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan pada Tahun 2023, LPMUKP sudah sangat menyadari akan pentingnya penilaian Indikator Kinerja Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, sehingga pelaksanaan posting atau update terkait dengan informasi pada *platform* yang baru pun LPMUKP sudah terbiasa, terlebih lagi pada *Collaboration Office* yang diwajibkan mengisi atau memposting informasi hanya pejabat Eselon II, sehingga lebih mudah dalam proses monitoring dan *reminder*.

Sedangkan untuk target Renstra 2024, realisasi capaian MP Tahun 2023 dibandingkan target Tahun 2024 adalah sebesar 115,24%, hal tersebut dikarenakan LPMUKP memperoleh nilai yang optimal pada Tahun 2023.

E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Berdasarkan hasil penilaian dan perbandingan yang telah dilakukan, capaian IKU Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah melampaui target dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun sebelumnya. Faktor pendorong keberhasilan tersebut tidak jauh berbeda dengan langkah yang dilakukan pada periode Triwulan III, dengan metode yang relatif sama, yaitu:

1. Melakukan pengisian atau posting pada aplikasi *collaboration office* bagi user yang dinilai keaktifannya (User Eselon II). Posting dilakukan sesuai dengan nilai yang dipersyaratkan yaitu 3 poin untuk posting yang bersifat narasi yang dilengkapi dengan dokumentasi akan bernilai 0,5 poin, sehingga memerlukan total 6 posting untuk mendapatkan 3 poin.
2. Melakukan monitoring pengisian aplikasi *collaboration office* baik secara langsung maupun memastikan nilai capaian berdasarkan hasil input kepada Pusdatin.

Selanjutnya, untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, LPMUKP akan melakukan beberapa kegiatan yang dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut berupa monitoring terhadap user yang dinilai keaktifannya agar poin yang ditargetkan dapat tercapai.

3.2.10. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP (Indikator Kinerja – 10)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam Perjanjian Kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP Tahun Anggaran 2023 salah satu Indikator Kinerja LPMUKP yang baru bagi LPMUKP adalah Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP dengan

target capaian sebesar **100%**. Dengan adanya Indikator Kinerja ini maka LPMUKP harus berusaha untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK pada Tahun 2022.

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Rencana aksi terkait dengan strategi mempertahankan nilai realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP adalah dengan menindaklanjuti seluruh temuan dari BPK RI Tahun 2022 sehingga tidak terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti. LPMUKP pada Tahun 2023 telah menindaklanjuti temuan BPK Tahun 2022 sehingga mendapatkan nilai realisasi yang optimal pada Tahun 2023.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setjen yang tercantum dalam Memorandum Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor 1717/SJ.2/RC.610/X/2023 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022” adalah 100% sehingga capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 100%.

Tabel 3.25 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat Jenderal

No.	Uit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Biro Umum dan PBJ	475.510.932.637	68.482.499	<1	0,01	100,99
	Biro Umum dan PBJ	-	38.200.599		0,01	100,99
	Biro Perencanaan	-	-	<1	0,00	0
	Biro Keuangan	-	30.281.900	<1	0,01	100,99
	Biro Hukum	-	-	<1	0,00	0
	Biro SDMAO	-	-	<1	0,00	0
	Biro Humas dan KLN	-	-	<1	0,00	0
	Pusdatin	-	-	<1	0,00	0
2	LPMUKP	41.467.114.758	-	<1	0,00	101,00
3	Dekonsentrasi	5.873.164.774	-		0,00	101,00
Jumlah		522.851.112.169	68.482.499	<1	0,01	100,99

Sementara itu, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka nilai capaian LPMUKP adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK} &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 100,00\% \end{aligned}$$

D. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP dengan Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Perbandingan capaian realisasi pesentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP cenderung sama, tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini disebabkan LPMUKP mampu untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK pada Tahun 2023 maupun Tahun 2022 sehingga capaiannya pun masih sama yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-10		Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 lingkup LPMUKP											
Realisasi					2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	0	100%	100	100%	100	

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka realisasi persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP pada tahun 2023 relatif sama. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya LPMUKP mengupayakan untuk mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan LPMUKP yang dilakukan oleh BPK RI.

Selanjutnya terhadap target tahun 2024, realisasi pada tahun 2023 telah mencapai target tahun 2024 yang secara nilai sudah mencapai rata-rata nilai maksimum untuk target indikator kinerja. Untuk menjaga pencapaian nilai yang telah dilakukan, LPMUKP akan mendukung pencapaian opini untuk menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada Tahun Anggaran selanjutnya LPMUKP akan terus mempertahankan kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebagai bentuk kepatuhan terhadap tindak lanjut temuan pada saat dilakukannya pemeriksaan. Serta kedepannya LPMUKP juga akan terus mengupayakan terkait dengan temuan-temuan BPK RI untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan.

3.2.11. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (Indikator Kinerja – 11)

A. Penjelasan Umum/Definisi IKU

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan.

Target Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP dengan polarisasi maximize dimana semakin tinggi nilai persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi maka capaian tersebut semakin baik.

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Pada periode Triwulan III Tahun 2023, LPMUKP telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, sehingga nilai capaian yang diperoleh dari Indikator Kinerja ini adalah sebesar 100%. Sehingga tidak ada permasalahan dalam pencapaian target. Namun demikian LPMUKP tetap melakukan upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan pada periode Triwulan IV dengan pemenuhan maupun perbaikan administratif yang direkomendasikan. Sehingga pencapaian indikator kinerja pada periode Triwulan IV Tahun 2023 dapat mencapai target.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2023

Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 86/SJ.2/TU.210/I/2024 perihal Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023”, realisasi capaian LPMUKP adalah sebesar 96% dari target sebesar 75%. Maka capaian dari target IKU tersebut sesuai dengan nilai pada aplikasi kinerjaku adalah sebesar 128%. Untuk lebih jelasnya nilai dari Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP periode Triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Data Rekapitulasi Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	12	12	100,00	0	00,00
3	Biro Umum dan PBJ	18	18	100,00	0	00,00
4	Biro Hukum	16	16	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	24	24	100,00	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	1	1	100,00	0	00,00
7	Pusdatin	7	7	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00
Total		113	112	99,12	1	00,88

Sementara itu, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka nilai capaian LPMUKP adalah sebagai berikut:

Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan TW IV	= 96%
Pencapaian Rekomendasi Hasil Pengawasan TW IV	= $\frac{96\%}{75\%}$
	= 128,00%

D. Perbandingan Capaian Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP Triwulan IV Tahun 2023 dengan periode Triwulan IV Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Realisasi periode Triwulan IV Tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022, maka capaian tersebut relatif mengalami penurunan sebesar 0,04%. Kemudian, jika realisasi periode Triwulan IV Tahun 2023 dibandingkan dengan target pada Tahun 2024, maka capaiannya adalah sebesar 101,05%. Terkait dengan perbandingan tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-11		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	73	100	100	75	96	128	-0,04	75	128	95	101,05	

Pada periode Triwulan IV Tahun 2023, rekomendasi yang diberikan kepada LPMUKP untuk ditindaklanjuti adalah sebanyak 25 rekomendasi, sedangkan yang berhasil ditindaklanjuti adalah sebanyak 24 rekomendasi, sehingga rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 1. Sedangkan pada periode Tahun 2022, LPMUKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target 2024, sebetulnya nilai realisasi pada periode Triwulan IV masih melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 95%, dengan capaian sebesar 101,05%.

E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Tidak tercapainya target pada indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BLU LPMUKP dikarenakan terdapat satu rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti oleh LPMUKP.

Kemudian untuk rencana aksi pada periode selanjutnya yaitu pelaksanaan pada Tahun 2024, LPMUKP melalui Divisi Satuan Pemeriksa Intern (SPI) akan mengkoordinir terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada LPMUKP untuk dilakukan tindak lanjut dengan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak LPMUKP yang terkait untuk pemenuhan atau perbaikan dokumen dalam upaya pemenuhan tindak lanjut.

3.2.12. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (Indikator Kinerja – 12)

A. Penjelasan Umum/Defisini Indikator Kinerja

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah Lembaga/Instansi untuk suatu periode tertentu. Kemudian, penyerapan anggaran merupakan kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada.

Pada Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran BLU LPMUKP sesuai dengan surat bersama perihal pagu definitif adalah sebesar Rp.57.174.996.000,00 yang seluruhnya bersumber dari proyeksi pendapatan PNBPN BLU Tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasional kegiatan BLU LPMUKP guna mendukung pencapaian target kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2023.

Dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2023, LPMUKP termasuk dalam program Dukungan Manajemen (032.01) dengan Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (6453) dengan 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output dan 8 (delapan) Rincian Output yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan modal usaha kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Berdasarkan dokumen Manual IKU, periode pelaporan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP adalah Triwulanan dengan polarisasi pelaporan *maximize* dimana semakin tinggi capaian maka semakin baik.

B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Dalam rangka optimalisasi realisasi penyerapan anggaran, LPMUKP telah mengupayakan beberapa beberapa rencana aksi yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. LPMUKP telah melakukan Optimalisasi PNBPN BLU dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp61 Miliar.
2. LPMUKP telah melakukan revisi DIPA dalam rangka mendukung percepatan realisasi anggaran Tahun 2023.

C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Triwulan IV

Hingga 31 Desember (Triwulan IV) 2023, realisasi anggaran BLU LPMUKP mencapai Rp37.316.946.840,00 atau sebesar 65,27% dari total pagu anggaran sebesar Rp.57.174.996.000,00. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per Rincian Output Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.29 dan Tabel 3.30.

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	%
Biro Hukum	13.001.664.000	12.912.457.558	99,31
Biro Humas dan KLN	24.281.262.000	24.172.422.550	99,55
Biro Keuangan	12.737.230.000	12.655.154.252	99,36
Biro Perencanaan	108.496.211.000	104.057.242.986	95,91
Biro SDMAO	14.609.428.000	14.388.513.128	98,49
Biro Umum dan PBJ	280.497.365.000	278.936.250.046	99,44
Pusdatin	115.753.575.000	114.753.744.705	99,14
BLU LPMUKP	57.174.996.000	37.316.956.840	65,27

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran BLU LPMUKP Periode TW IV Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	11.273.112.000	5.590.001.974	49,59
001	UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	11.273.112.000	5.590.001.974	49,59
BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.998.042.000	622.217.862	31,14
001	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1.998.042.000	622.217.862	31,14
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	41.197.127.000	30.149.537.204	73,18
962	Layanan Umum	7.638.071.000	3.898.098.127	51,04
994	Layanan Perkantoran	33.559.056.000	26.251.439.077	78,22
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	295.000.000	40.600.000	13,76
951	Layanan Sarana Internal	295.000.000	40.600.000	13,76
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2.411.715.000	914.589.800	37,92
001	Laporan Pengelolaan Keuangan	955.900.000	418.942.200	43,83
002	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Usaha	576.100.000	435.360.700	75,57
003	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	879.715.000	60.286.900	6,85
Total		57.174.996.000	37.316.956.840	65,27

Target persentase realisasi anggaran BLU LPMUKP periode Triwulan IV adalah 90% dari total pagu anggaran, namun realisasi anggaran BLU LPMUKP hanya mencapai 72,52% sehingga capaian dari Indikator Kinerja persentase realisasi anggaran BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Penyerapan Anggaran TW IV} &= 65,27\% \\
 \text{Pencapaian Penyerapan Anggaran TW IV} &= \frac{65,27\%}{90\%} \\
 &= 72,52\%
 \end{aligned}$$

D. Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Perbandingan Terhadap Target Renstra 2024

Persentase realisasi penyerapan anggaran pada periode Triwulan IV Tahun 2023 jika dibandingkan dengan periode Triwulan IV Tahun 2023 relatif mengalami penurunan sebesar 23,20%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024, capaian periode Triwulan IV Tahun 2023 baru mencapai 72,52%. Perbandingan capaian secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-12		Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2023				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	75,74%	91,51%	84,99%	90%	65,27%	72,52	-23,20	90%	72,52	90	72,52	

Penurunan capaian pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 salah satunya diakibatkan dari penurunan belanja pegawai yang dimana pegawai LPMUKP sendiri mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan ditambah dengan evaluasi status pegawai pendamping LPMUKP. Hal tersebut tentunya berkontribusi terhadap besaran gaji yang dibayarkan berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pagu anggaran Tahun 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap persentase capaian realisasi penyerapan anggaran.

Selanjutnya, dibandingkan dengan target 2024, capaian realisasi penyerapan anggaran LPMUKP relatif sama sebesar 72,52%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2023 persentase realisasi anggaran LPMUKP tidak dapat mencapai target sebesar 90% sehingga pada Tahun 2024, target tersebut masih tetap.

E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Permasalahan yang terjadi sepanjang periode Triwulan IV Tahun 2023, sehingga menyebabkan persentase realisasi penyerapan anggaran menjadi kurang optimal adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan anggaran, LPMUKP harus benar-benar bijak dalam penggunaan anggaran sehingga tidak menimbulkan *over head cost*. Kondisi *over head cost* tersebut akan terjadi apabila anggaran yang digunakan tidak selaras dengan realisasi penyaluran dana bergulir yang ditargetkan.
2. Anggaran belanja yang digunakan pun bersumber dari PNBPN BLU sehingga LPMUKP harus mengoptimalkan realisasi PNBPN jika menginginkan target realisasi anggaran yang sesuai dengan pagu anggaran LPMUKP.
3. Menurunnya jumlah pegawai LPMUKP juga memberikan kontribusi yang bisa dihitung mempengaruhi dalam persentase realisasi penyerapan anggaran. Hal tersebut dapat dibandingkan melalui realisasi pada akun belanja gaji dan tunjangan (525111) pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2023.

Selanjutnya, terhadap permasalahan yang terjadi pada periode Triwulan IV Tahun 2023, LPMUKP dalam rangka pelaksanaan anggaran, akan melakukan monitoring secara lebih intensif terhadap pelaksanaan dan realisasi belanja sehingga LPMUKP dapat mengambil langkah lebih awal terkait dengan realisasi belanja. Kemudian sebagai langkah dalam mengambil tindakan konsekuensi, LPMUKP telah mengurangi pagu belanja di Tahun 2024 menjadi sebesar Rp41,79 Miliar.

3.3. Kinerja Keuangan

3.3.1. Pendapatan

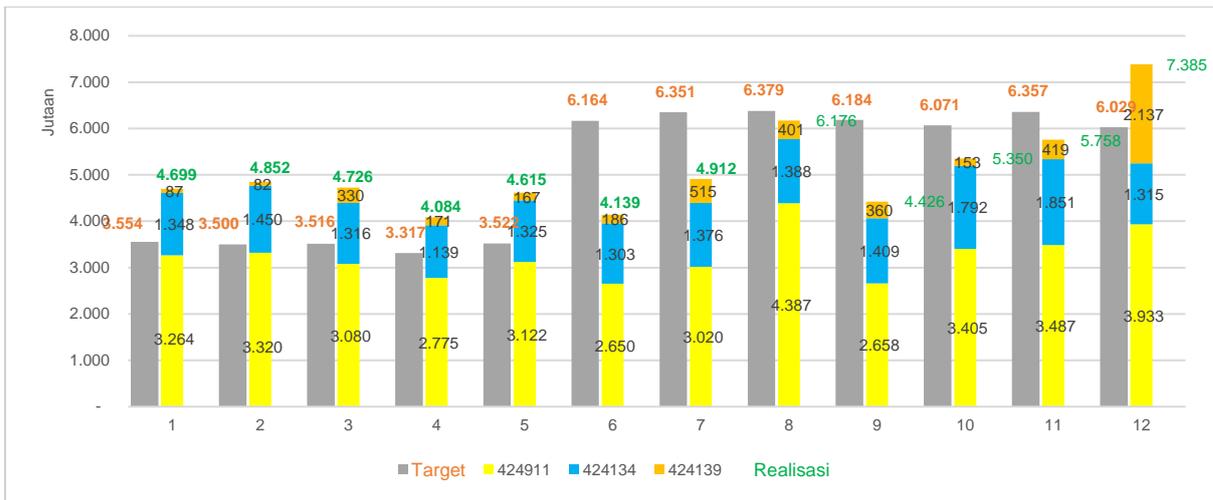
Realisasi pendapatan LPMUKP pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp61.120.932.727,00 dari target pendapatan PNBPN sebesar Rp60.943.937.000,00 yang terdiri dari:

- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp18.349.333.000,00
- Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp33.032.104.000,00
- Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya sebesar Rp9.562.500.000,00

Realisasi jumlah PNBPN BLU mengalami perubahan komposisi yang dominan dikarenakan pada Tahun 2023 komposisi pendapatan jasa layanan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan non jasa layanan. Hal tersebut menunjukkan hasil yang baik bagi kinerja PNBPN BLU dikarenakan pada Tahun sebelumnya PNBPN BLU didominasi oleh pendapatan non jasa layanan yang bersumber dari penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi jangka pendek.

Namun demikian, pada Tahun 2023, LPMUKP belum dapat merealisasikan PNBPN sesuai dengan target dikarenakan pada Tahun 2023 LPMUKP memfokuskan untuk melakukan penyesuaian pola penyaluran dana bergulir dalam rangka mendukung program prioritas KKP melalui penyaluran dana bergulir dengan harapan LPMUKP dapat searah dengan kebijakan dan program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedepannya, LPMUKP akan terus mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan memperkecil proporsi pendapatan non jasa layanan atas penempatan dana kelolaan BLU. Perkembangan pendapatan PNBPN lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut:

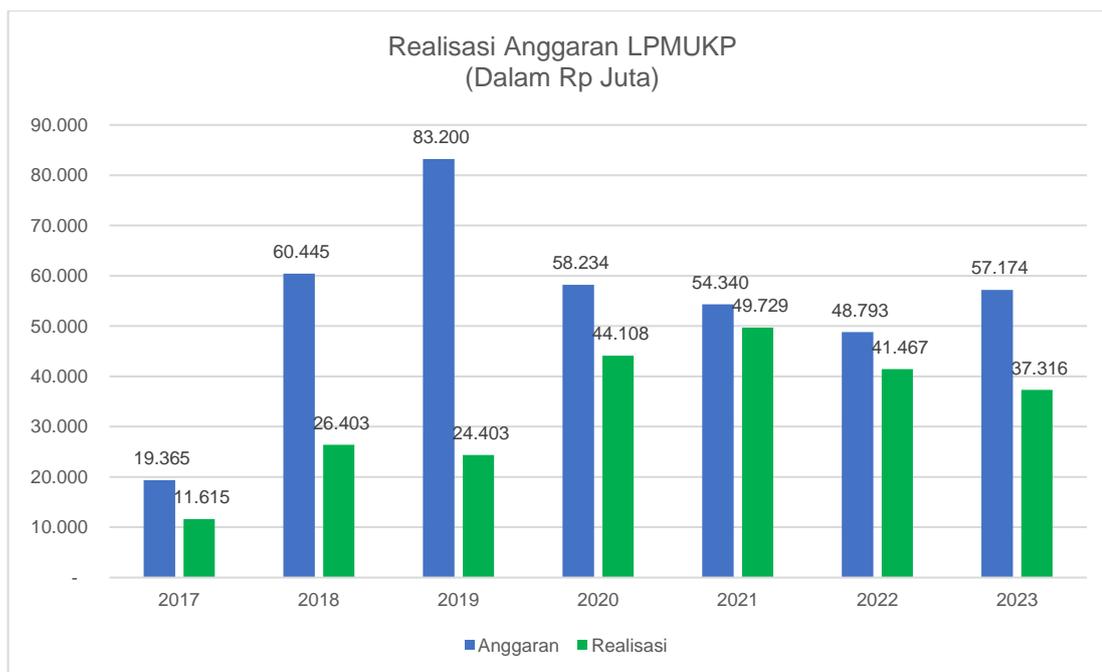


Gambar 3.12 Perkembangan Pendapatan PNBPNP BLU

3.3.2. Belanja Operasional

Pada Tahun 2023, pagu anggaran BLU LPMUKP berdasarkan surat bersama adalah sebesar Rp57.174.996.000,00 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan PNBPNP hasil pengelolaan dana bergulir. Pelaksanaan anggaran LPMUKP pada Tahun 2023 mengedepankan skala prioritas penggunaan anggaran untuk menghindari adanya kemungkinan defisit anggaran, sebab pendapatan yang direalisasikan tidak dapat mengkomodir anggaran belanja yang berlebihan. Realisasi belanja pada BLU LPMUKP erat kaitannya dengan pendapatan BLU pada Tahun Anggaran tersebut, sejak Tahun 2020 LPMUKP tidak lagi menggunakan Rupiah Murni karena sudah harus berkembang dengan mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana bergulir baik dari layanan maupun non layanan.

Selanjutnya, penentuan anggaran belanja LPMUKP juga masih mengedepankan optimalisasi pendapatan yang diproyeksi akan diterima pada tahun anggaran berjalan. LPMUKP meminimalisir penggunaan saldo kas dalam rangka pemenuhan belanja operasional agar berpengaruh positif terhadap belanja operasional pendapatan operasional (BOPO) sehingga anggaran LPMUKP diharapkan masih dinilai efisien. Kemudian secara histori perkembangan anggaran belanja LPMUKP secara lengkap dapat dilihat pada **Gambar 3.13**.



Gambar 3.13 Perkembangan Anggaran dan Realisasi LPMUKP hingga Tahun 2023

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp37,31 Miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp57,17 Miliar sehingga realisasi anggaran yang digunakan dari total alokasi adalah 65,27% persen.

Perkembangan anggaran LPMUKP dari tahun ke tahun relatif fluktuatif, hal tersebut dipengaruhi komposisi anggaran LPMUKP yang semula mendapatkan alokasi Rupiah Murni pada Tahun 2017 hingga 2019 dan juga mengalokasikan PNBPN pada DIPA BLU, sehingga pada Tahun 2018 dan 2019 anggaran LPMUKP terlihat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran lainnya dimana mulai dari Tahun 2020 LPMUKP mencoba untuk menjadi mandiri dengan penggunaan anggaran belanja yang dialokasikan berdasarkan proyeksi pendapatan LPMUKP.

3.3.3. Surplus/Defisit

LPMUKP pada Tahun Anggaran 2023 mengalami surplus sebesar Rp23.803.985.887,00 dari pendapatan PNBPN BLU sebesar Rp61.120.932.727,00 dengan total realisasi anggaran belanja sebesar Rp37.316.946.840,00. Realisasi anggaran tersebut lebih relatif berkurang jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pada Tahun sebelumnya. Hal ini juga dipengaruhi dari penerapan kebijakan efisiensi anggaran LPMUKP guna menghindari defisit anggaran antara pendapatan dan belanja.

3.3.4. Neraca LPMUKP Tahun 2023 (*Unaudited*)

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tahun 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.419.700.959.277 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp130.824.734.321; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.722.634.414; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp476.730.392.913; dan Ekuitas sebesar Rp69.430.342.414. Laporan Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.32**.

Tabel 3.32. Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN 1	JUMLAH	
	2023 2	2022 3
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Lainnya dan Setara Kas	77.540.831	60.375.000
Kas pada Badan Layanan Umum	14.659.316.360	97.799.281.648
Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum	107.000.000.000	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	764.520.541	1.292.201.188
Piutang Bukan Pajak	0	17.396.929.458
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(12.474.024.517)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	4.922.904.941
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	28.726.675.709	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(20.418.013.983)	0
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	8.308.661.726	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	35.235.000	5.821.918
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	35.235.000	(29.110)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	70.470.000	5.792.808
Persediaan	5.764.000	4.960.000
JUMLAH ASET LANCAR	130.796.273.458	104.085.515.515
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Dana Bergulir	874.571.785.835	637.009.941.741
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(65.705.367.981)	(51.622.093.842)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	809.843.194.854	585.387.847.899
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	5.659.545.164	5.609.617.164
Aset Tetap Lainnya	1.982.110.376	1.982.110.376
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5.348.937.519)	(4.456.566.366)
JUMLAH ASET TETAP	2.292.718.021	3.135.161.174

NAMA PERKIRAAN 1	JUMLAH	
	2023 2	2022 3
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	2.857.226.000	2.857.226.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	475.451.437.165	712.990.058.259
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.743.001.627)	(1.367.092.879)
JUMLAH ASET LAINNYA	476.565.661.538	714.480.191.380
JUMLAH ASET	1.419.497.847.871	1.407.088.715.968
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	144.463.282	57.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	89.368.500	143.159.908
Utang Jangka Pendek Lainnya	12.812.081	3.375.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	246.643.863	203.534.908
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN	1.350.246.643.863	1.350.203.534.908
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	69.251.204.008	56.885.181.060
JUMLAH EKUITAS	69.251.204.008	56.885.181.060
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.419.497.847.871	1.407.088.715.968

3.4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2023

3.4.1. Penysunan Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2023

Dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, LPMUKP menyusun beberapa regulasi sebagai bentuk pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir pada Tahun 2023 guna mengatur kebijakan-kebijakan yang perlu diberlakukan, diantaranya:

Tabel 3.33 Daftar Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2023

No	Tahun	Nomor Peraturan Direktur	Perihal
1	2022	1/PER-LPMUKP/2023	Pedoman Pengelolaan Jaminan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
2	2022	2/PER-LPMUKP/2023	Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP
3	2022	3/PER-LPMUKP/2023	Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

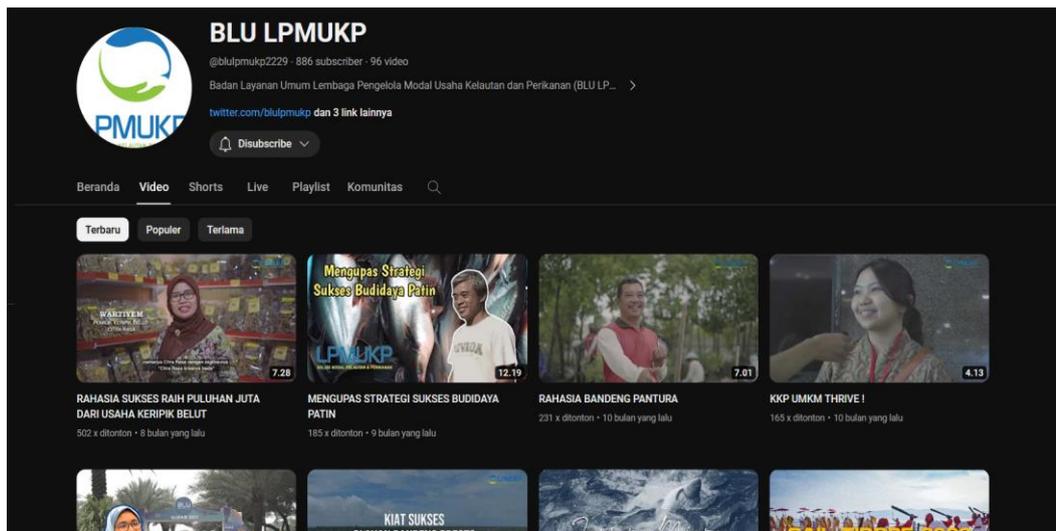
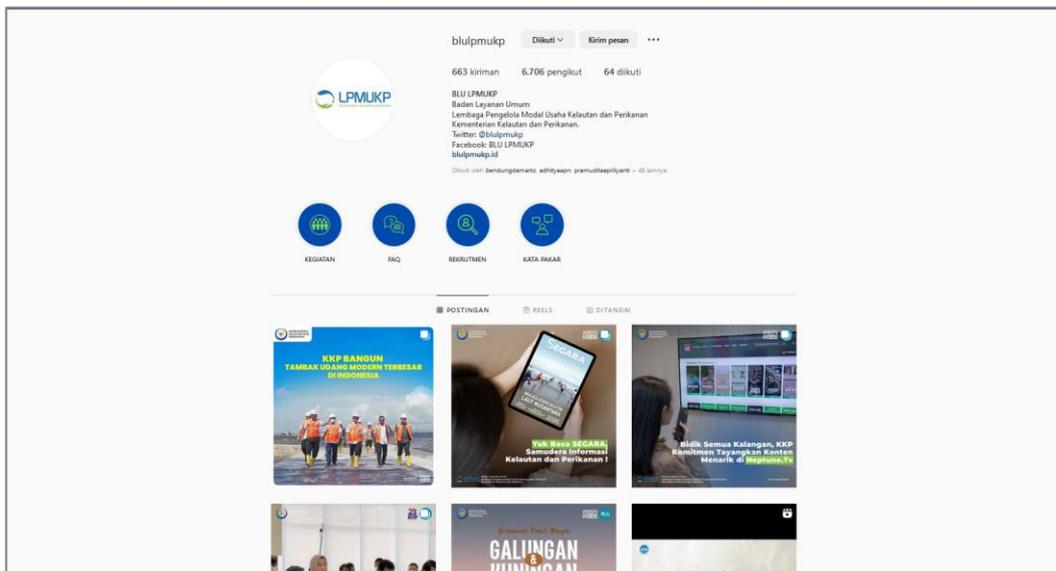
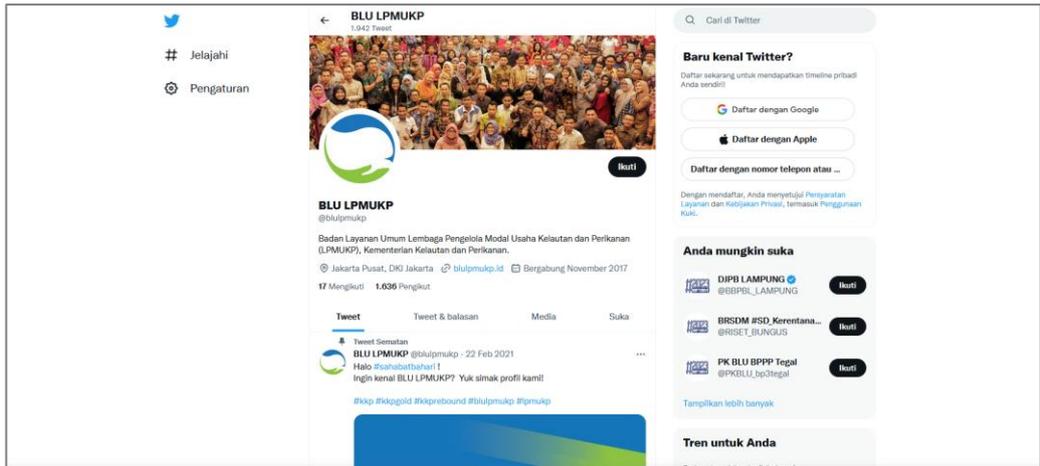
3.4.2. Publikasi BLU LPMUKP Tahun 2023

Sebagai salah satu upaya dalam memperkenalkan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang berfokus dengan kegiatan pembiayaan di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan tarif layanan yang murah serta mudah diakses, maka LPMUKP terus melaksanakan kegiatan publikasi melalui sosial media serta pemanfaatan internet sebagai media penyebaran yang digandrungi masyarakat di zaman sekarang. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh BLU LPMUKP dalam rangka memperkenalkan Lembaga kepada masyarakat:

1) Pembuatan akun sosial media

Pembuatan akun-akun sosial media digunakan sebagai salah satu Langkah LPMUKP dalam memuat informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan serta sebagai salah satu Langkah modernisasi BLU dalam penyampaian informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pembuatan media sosial juga ditujukan untuk mempromosikan layanan LPMUKP kepada publik agar dapat menumbuhkan kesadaran akan kehadiran LPMUKP sebagai salah satu lembaga yang memberikan solusi atas modal usaha khususnya di sektor Kelautan dan Perikanan. Media sosial yang digunakan diantaranya Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

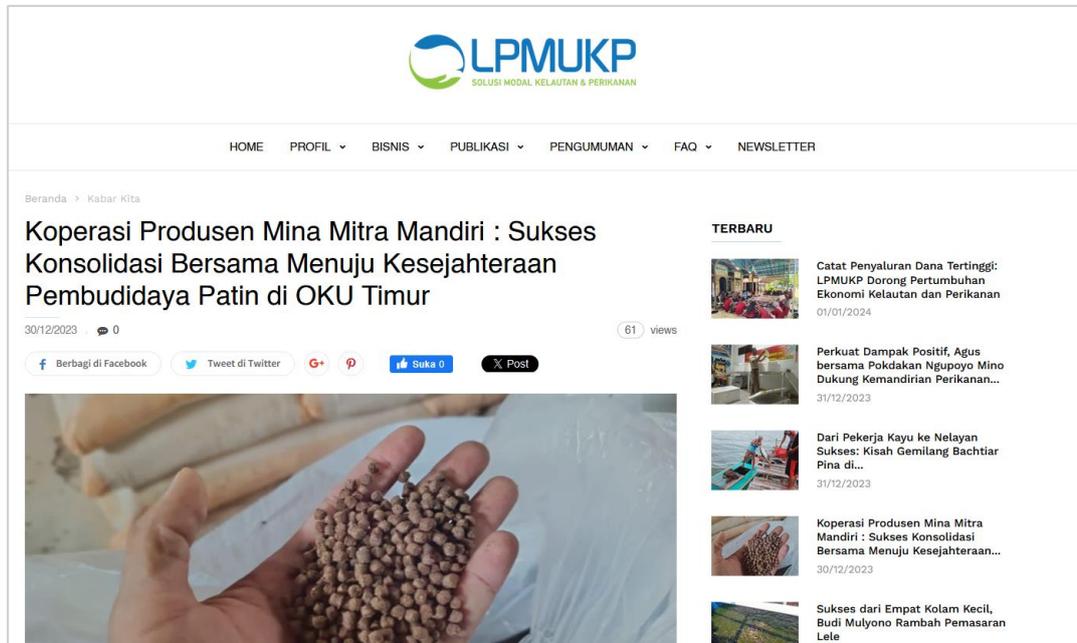




Gambar 3.14 BLU LPMUKP dalam Sosial Media

2) Website BLU LPMUKP

Pemanfaatan teknologi informasi dengan menyebarkan informasi terkait BLU melalui internet, selain pembuatan akun sosial media LPMUKP juga memiliki website yang berisikan informasi dan kegiatan aktual LPMUKP yang dapat diakses melalui <https://blulpmukp.id>.



Gambar 3.15. Tampilan Website LPMUKP

3) Pemberitaan BLU LPMUKP melalui media

Adapun pemberitaan terkait dengan BLU LPMUKP yang terus berinovasi dan mengembangkan inovasi layanan dalam menyalurkan modal usaha melalui

kegiatan dana bergulir. Berikut merupakan pemberitaan terkait dengan BLU LPMUKP melalui media online:

Tabel 3.34 Pemberitaan BLU LPMUKP melalui Media Online

No	Tanggal	Judul	Sumber
1	1/9/2023	Program Kredit Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Memble, Ini Buktinya	https://ekonomi.bisnis.com/read/20230109/99/1616319/program-kredit-nelayan-dari-kementerian-kelautan-dan-perikanan-memble-ini-buktinya
2	1/10/2023	LPMUKP Berjalan Autopilot, KKP Gagal Optimalkan Dana Bergulir	http://maritimnews.com/2023/01/lpmukp-berjalan-autopilot-kkp-gagal-optimalkan-dana-bergulir
3	1/12/2023	Pembiayaan Bidik Kebutuhan Pengadaan Kapal Besar	https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/11/pembiayaan-bidik-kebutuhan-pengadaan-kapal-besar
4	1/16/2023	Penyaluran Kredit Murah ke Nelayan belum Optimal	https://foto.bisnis.com/view/20230116/1618413/penyaluran-kredit-murah-ke-nelayan-belum-optimal
5	1/17/2023	Menteri Trenggono Paparkan Capaian Positif KKP pada 2022 ke DPR	https://www.antaranews.com/berita/3353004/menteri-trenggono-paparkan-capaian-positif-kkp-pada-2022-ke-dpr
6	1/17/2023	Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan Punya Anggaran Rp 6,29 Triliun	https://money.kompas.com/read/2023/01/17/143000726/tahun-2023-kementerian-kelautan-dan-perikanan-punya-anggaran-rp-6-29-triliun?page=all
7	1/17/2023	KKP Dapat Anggaran Rp 6,29 T dari Sri Mulyani Tahun Ini	https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6519783/kkp-dapat-anggaran-rp-629-t-dari-sri-mulyani-tahun-ini
8	1/17/2023	KKP Dapat Alokasi Anggaran 2023 Sebesar Rp6,29 Triliun	https://voi.id/ekonomi/245519/kkp-dapat-alokasi-anggaran-2023-sebesar-rp6-29-triliun
9	1/17/2023	Sakti Wahyu: Pagu Alokasi Anggaran 2023 Sebesar Rp6,29 Triliun	https://www.antaranews.com/berita/3352701/sakti-wahyu-pagu-alokasi-anggaran-2023-sebesar-rp629-triliun
10	2/8/2023	RI Mau Setop Impor Garam, Begini Ambisi Menteri Jokowi	https://www.cnbcindonesia.com/news/20230208162618-4-412193/ri-mau-setop-impor-garam-begini-ambisi-menteri-jokowi
11	2/21/2023	Amankan Sektor Perikanan dari Ancaman Resesi Global, Berikut Strategi KKP	https://koran-jakarta.com/amankan-sektor-perikanan-dari-ancaman-resesi-global-berikut-strategi-kkp?page=all
12	3/24/2023	Haryadi, Pendamping LPMUKP KKP Pulau Taliabu Raih Spesial Achievement ATI 2022	https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/449754/haryadi-pendamping-lpmukp-kkp-pulau-taliabu-raih-spesial-achievement-ati-2022
13	5/5/2023	Modal Usaha kelautan dan Perikanan (MUKP): Rentenir atau Pemberdayaan?	https://faktabanten.co.id/opini/modal-usaha-kelautan-perikanan-mukp-rentenir-atau-pemberdayaan/
14	5/5/2023	Nelayan Kecil Meradang, LPMUKP Hanya Dinikmati Pengusaha Besar	http://maritimnews.com/2023/05/nelayan-kecil-meradang-lpmukp-hanya-dinikmati-pengusaha-besar/
15	6/7/2023	Genjot Produktivitas, Pemeritah Bangun Proyek Percontohan Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi Tahun Ini	https://koran-jakarta.com/genjot-produktivitas-pemeritah-bangun-proyek-percontohan-budi-daya-rumput-laut-di-wakatobi-tahun-ini?page=all
16	6/8/2023	Viktor Laiskodat Bersama Menteri KKP Panen Lobster di Kawasan Mulut Seribu Rote Ndao	https://www.nttmediaexpress.com/region-ntt/4249063560/viktor-laiskodat-bersama-menteri-kkp-panen-lobster-di-kawasan-mulut-seribu-rote-ndao
17	6/11/2023	MUKP Cara Hambur-hamburkan Uang	https://progres.id/kolom/mukp-cara-hambur-hamburkan-uang.html
18	6/19/2023	KKP Hadirkan One Stop Services pada Penas XVI	https://mv.beritacenter.com/news-335558-kkp-hadirkan-one-stop-services-pada-penas-xvi.html
19	6/25/2023	Peduli Perikanan, Bupati Indah Beri Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP di Lutra	https://mediumindonesia.com/peduli-perikanan-bupati-indah-beri-pinjaman-dana-bergulir-lpmukp-di-lutra/
20	7/4/2023	Potensi Besar, Pembiayaan Kecil	https://investor.id/editorial/333988/potensi-besar-pembiayaan-kecil
21	7/14/2023	Dari Hobi Menyantap Lele, Coek Hermawan Sukses Bisnis Benih Lele	https://www.jawapos.com/ekonomi/011772072/dari-hobi-menyantap-lele-coek-hermawan-sukses-bisnis-benih-lele

No	Tanggal	Judul	Sumber
22	7/17/2023	Nelayan Nias Sukses Kembangkan Usaha berkat Dukungan Modal LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/011781261/nelayan-nias-sukses-kembangkan-usaha-berkat-dukungan-modal-lpmukp
23	7/20/2023	Sukses Raih Ratusan Juta dari Budidaya Bandeng Berkat Dukungan LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/011790132/sukses-raih-ratusan-juta-dari-budidaya-bandeng-berkat-dukungan-lpmukp
24	7/24/2023	Suksesnya Lalu Idris, Nelayan Asal Lombok Tengah dalam Bisnis Wisata Bahari	https://www.jawapos.com/ekonomi/011802147/suksesnya-lalu-idris-nelayan-asal-lombok-tengah-dalam-bisnis-wisata-bahari
25	7/24/2023	Lalu Idris, Nelayan Asal Lombok Tengah yang Sukses dalam Bisnis Wisata Bahari	https://www.jawapos.com/travelling/011802286/lalu-idris-nelayan-asal-lombok-tengah-yang-sukses-dalam-bisnis-wisata-bahari
26	7/26/2023	Bidik Pengunjung Pantura, Rumah Makan Ikan Berhasil Pancing Peluang Wisata Kuliner	https://www.jawapos.com/ekonomi/011806288/bidik-pengunjung-pantura-rumah-makan-ikan-berhasil-pancing-peluang-wisata-kuliner
27	8/2/2023	SPBUN Kuala Enok, Angin Segar Nelayan Lokal di Gerbang Selatan Riau	https://www.jawapos.com/ekonomi/011820147/spbun-kuala-enok-angin-segar-nelayan-lokal-di-gerbang-selatan-riau
28	8/4/2023	Pengolahan Ikan Tamban oleh Nina, Dorong Usaha Berdayakan Potensi Lokal	https://www.jawapos.com/ekonomi/012424444/pengolahan-ikan-tamban-oleh-nina-dorong-usaha-berdayakan-potensi-lokal
29	8/14/2023	Buka Sosialisasi LPMUKP, Enos Minta Pelaku Usaha Dapat Memanfaatkannya	https://sumsel.tribunnews.com/2023/08/15/buka-sosialisasi-lpmukp-enos-minta-pelaku-usaha-dapat-memanfaatkannya
30	8/15/2023	Bupati OKU Timur Hadiri Sosialisasi Kegiatan Program LPMUKP	https://pukanews.com/2023/08/15/bupati-oku-timur-hadiri-kegiatan-sosialisasi-program-lembaga-pengelola-modal-usaha-kelautan-dan-perikanan-lpmukp/
31	8/15/2023	Bupati OKU Timur sebut program LPMUKP tingkatkan perekonomian rakyat	https://sumsel.antaraneews.com/berita/714864/bupati-oku-timur-sebut-program-lpmukp-tingkatkan-perekonomian-rakyat
32	8/15/2023	Sosialisasi Program LPMUKP, Ini Kata Bupati Enos	https://www.beritategas.com/sosialisasi-program-lpmukp-ini-kata-bupati-enos/
33	8/15/2023	Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T. menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	https://indoglobenews.id/blog/Bupati-OKU-Timur-Ir-H-Lanosin-MT-menghadiri-kegiatan-menghadiri-kegiatan-Sosialisasi-Program-Lembaga-Pengelola-Modal-Usaha-Kelautan-dan-Perikanan-LPMUKP-Selasa-15-Agustus-2023
34	8/16/2023	Diskan Kabupaten Sukabumi Desiminasi Budidaya Ikan di Kadudampit dan Gegerbitung	https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/diskan-kabupaten-sukabumi-desiminasi-budidaya-ikan-di-kadudampit-dan-gegerbitung/
35	8/24/2023	Bersama LPMUKP, Ikan Gabus Mandiangin Siap Naik Kelas	https://www.jawapos.com/ekonomi/012801881/bersama-lpmukp-ikan-gabus-mandiingin-siap-naik-kelas
36	8/25/2023	Dorong Sektor Garam Rakyat, LPMUKP Buka Peluang Akses Permodalan di Pangkajene Kepulauan	https://www.jawapos.com/ekonomi/012880678/dorong-sektor-garam-rakyat-lpmukp-buka-peluang-akses-permodalan-di-pangkajene-kepulauan
37	8/31/2023	Kadiskan: LPMUKP Mampu Mitigasi Risiko dan Mendorong Kinerja Usaha Kelautan	https://jurnalsukabumi.com/2023/08/31/kadiskan-lpmukp-mampu-mitigasi-risiko-dan-mendorong-kinerja-pelaku-usaha-kelautan/
38	9/1/2023	Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Diseminasi Program LPMUKP, Bantu Meningkatkan Akses Permodalan Pokdakan	https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/dinas-perikanan-kabupaten-sukabumi-diseminasi-program-lpmukp-bantu-meningkatkan-akses-permodalan-pokdakan/
39	9/1/2023	Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Diseminasi Program LPMUKP, Bantu Meningkatkan Akses Permodalan Pokdakan	https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/dinas-perikanan-kabupaten-sukabumi-diseminasi-program-lpmukp-bantu-meningkatkan-akses-permodalan-pokdakan/
40	9/2/2023	SPBUN Kuala Enok, Angin Segar Nelayan Lokal di Gerbang Selatan Riau	https://www.jawapos.com/ekonomi/011820147/spbun-kuala-enok-angin-segar-nelayan-lokal-di-gerbang-selatan-riau
41	9/4/2023	Pengolahan Ikan Tamban oleh Nina, Dorong Usaha Berdayakan Potensi Lokal	https://www.jawapos.com/ekonomi/012424444/pengolahan-ikan-tamban-oleh-nina-dorong-usaha-berdayakan-potensi-lokal

No	Tanggal	Judul	Sumber
42	9/4/2023	Sebarkan Manfaat, Pembudidaya Lele di Bojonegoro Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	https://www.jawapos.com/ekonomi/012926522/sebarkan-manfaat-pembudidaya-lele-di-bojonegoro-dorong-pertumbuhan-ekonomi-masyarakat
43	9/5/2023	Ubah Kehidupan Nelayan Melalui Bisnis Pemasaran Ikan	https://www.jawapos.com/ekonomi/012930067/ubah-kehidupan-nelayan-melalui-bisnis-pemasaran-ikan
44	9/5/2023	Ubah Kehidupan Nelayan Melalui Bisnis Pemasaran Ikan	https://headtopics.com/id/ubah-kehidupan-nelayan-melalui-bisnis-pemasaran-ikan-43596285
45	9/6/2023	LPMUKP Sokong Pengembangan Sumber Daya Laut Lokal di Kabupaten Buru	https://headtopics.com/id/lpmukp-sokong-pengembangan-sumber-daya-laut-lokal-di-kabupaten-buru-43694681
46	9/6/2023	LPMUKP Sokong Pengembangan Sumber Daya Laut Lokal di Kabupaten Buru	https://www.jawapos.com/ekonomi/012940587/lpmukp-sokong-pengembangan-sumber-daya-laut-lokal-di-kabupaten-buru-selatan
47	9/8/2023	Menerjang Ombak Kehidupan, Baharudin Petik Hasil dari Kesungguhannya Jadi Nelayan	https://headtopics.com/id/menerjang-ombak-kehidupan-baharudin-petik-hasil-dari-kesungguhannya-jadi-nelayan-43859766
48	9/8/2023	Menerjang Ombak Kehidupan, Baharudin Petik Hasil dari Kesungguhannya Jadi Nelayan	https://www.jawapos.com/ekonomi/012946289/menerjang-ombak-kehidupan-baharudin-petik-hasil-dari-kesungguhannya-jadi-nelayan
49	9/8/2023	Bersama Kementerian ATRBPN LPMUKP Dukung Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Pembudidaya Ikan	https://www.jawapos.com/nasional/012947572/bersama-kementerian-atrbpn-lpmukp-dukung-sertifikasi-hak-atas-tanah-untuk-pembudidaya-ikan
50	9/10/2023	Kisah Alya Ibu Rumah Tangga Sukses Pembudidaya Lele	https://www.jawapos.com/ekonomi/012950879/kisah-alya-ibu-rumah-tangga-sukses-pembudidaya-lele
51	9/12/2023	6 Koperasi Pugar Ronggolawe Makmur Jembatan Kesuksesan Bagi Pelaku Usaha Garam	https://www.jawapos.com/ekonomi/012957360/koperasi-pugar-ronggolawe-makmur-jembatan-kesuksesan-bagi-pelaku-usaha-garam
52	9/13/2023	Pesona Bahari GWD, Tumbuhkan Geliat Ekonomi Pariwisata dan Cinta Lingkungan	https://www.jawapos.com/ekonomi/012960672/pesona-bahari-gwd-tumbuhkan-geliat-ekonomi-pariwisata-dan-cinta-lingkungan
53	9/15/2023	Perempuan Pesisir di Selayar Bangun Kemakmuran dengan Olahan Ikan Abon	https://www.jawapos.com/ekonomi/012966489/perempuan-pesisir-di-selayar-bangun-kemakmuran-dengan-olahan-ikan-abon
54	9/19/2023	Dukung Komoditas Unggulan KKP, LPMUKP Siap Dorong Pengembangan Rumput Laut	https://www.jawapos.com/ekonomi/012995836/dukung-komoditas-unggulan-kkp-lpmukp-siap-dorong-pengembangan-rumput-laut-wakatobi
55	9/19/2023	Inovasi Usaha Perikanan Minhajul Aspian Dorong Gemar Makan Ikan di Kabupaten Pringsewu	https://www.jawapos.com/ekonomi/012996244/inovasi-usaha-perikanan-minhajul-aspian-dorong-gemar-makan-ikan-di-kabupaten-pringsewu
56	9/23/2023	Pringsewu Siap Jadi Pusat Unggulan Pembudidayaan Ikan Berkelanjutan dengan Dukungan LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/013012261/pringsewu-siap-jadi-pusat-unggulan-pembudidayaan-ikan-berkelanjutan-dengan-dukungan-lpmukp
57	9/25/2023	Bidik Wisatawan, Koperasi Tani Kembang Sedana Optimalkan Potensi Wisata Nusa Penida	https://www.jawapos.com/ekonomi/013017911/bidik-wisatawan-koperasi-tani-kembang-sedana-optimalkan-potensi-wisata-nusa-penida
58	9/27/2023	Langkah LPMUKP Rajut Mimpi Mudi Jadi Pengusaha Garam	https://www.jawapos.com/ekonomi/013024033/langkah-lpmukp-rajut-mimpi-mudi-jadi-pengusaha-garam
59	9/28/2023	Kontribusi Samsudin Dorong Ketahanan Pangan Lewat Budidaya Perikanan	https://www.jawapos.com/ekonomi/013028562/kontribusi-samsudin-dorong-ketahanan-pangan-lewat-budidaya-perikanan
60	9/30/2023	Perjalanan Herman Membangun Rantai Pasok Perikanan Berkualitas Internasional	https://www.jawapos.com/ekonomi/013034021/perjalanan-herman-membangun-rantai-pasok-perikanan-berkualitas-internasional
61	9/30/2023	Digitalisasi Koperasi Perikanan Bawa Maju dan Keberlanjutan di Cilacap	https://www.jawapos.com/ekonomi/013034093/digitalisasi-koperasi-perikanan-bawa-maju-dan-keberlanjutan-di-cilacap

No	Tanggal	Judul	Sumber
62	10/6/2023	50 Anggota Koperasi Bertuah Samudra Langkat Ikuti Sosialisasi Temu Lapangan Korporasi Dirjen Perikanan Budidaya KKP	https://www.buser24.com/50-anggota-koperasi-bertuah-samudra-langkat-ikuti-sosialisasi-temu-lapangan-korporasi-dirjen-perikanan-budidaya-kkp/daerah/
63	10/9/2023	Genjot Pelaku UMKM Perikanan Dan Kelautan Mateng Melalui KUR Program Kementerian	https://agabong.com/2023/10/09/genjot-pelaku-umkm-perikanan-dan-kelautan-mateng-melalui-kur-program-kementerian/
64	10/9/2023	LPMUKP Dorong Langkah Strategis Nelayan Bali Melalui Koperasi	https://www.jawapos.com/ekonomi/013204015/lpmukp-dorong-langkah-strategis-nelayan-bali-melalui-koperasi
65	10/27/2023	Usaha Pembenihan Udang di Barru Harapan Besar Tingkatkan Produksi Udang Nasional	https://www.jawapos.com/nasional/013163773/usaha-pembenihan-udang-di-barru-harapan-besar-tingkatkan-produksi-udang-nasional
66	10/28/2023	HUT Ke-24, KKP Dorong Pertumbuhan Industri Ikan Hias dengan Fasilitas Modal Usaha	https://www.jawapos.com/ekonomi/013168292/hut-ke-24-kkp-dorong-pertumbuhan-industri-ikan-hias-dengan-fasilitas-modal-usaha
67	10/30/2023	Kolaborasi Transformasi Jadi Solusi Jitu Nelayan Ternate Naik Kelas	https://www.jawapos.com/ekonomi/013172731/kolaborasi-transformasi-jadi-solusi-jitu-nelayan-ternate-naik-kelas
68	11/7/2023	Milenial Sumba Timur Maksimalkan Potensi Laut Lewat Budidaya Rumput Laut	https://www.jawapos.com/ekonomi/013232706/milenial-sumba-timur-maksimalkan-potensi-laut-lewat-budidaya-rumput-laut
69	11/8/2023	Kawal Ekologi Laut untuk Ekonomi Biru, Julie Laiskodat Gelar Bimtek Pengelolaan Ruang Laut di Flotim	https://www.victorynews.id/ntt/33110790576/kawal-ekologi-laut-untuk-ekonomi-biru-julie-laiskodat-gelar-bimtek-pengelolaan-ruang-laut-di-flotim
70	11/16/2023	Bangun Rantai Produksi Perikanan Adi Sukses Jadi Pemasar Ikan di Ketapang	https://www.jawapos.com/ekonomi/013291492/bangun-rantai-produksi-perikanan-adi-sukses-jadi-pemasar-ikan-di-ketapang
71	11/16/2023	KKP Percepat Pendataan Kartu Kusuka untuk Kejar Target 100 Persen	https://www.antaraneews.com/berita/3826299/kkp-percepat-pendataan-kartu-kusuka-untuk-kejar-target-100-persen
72	11/17/2023	Inspiratif, Kisah Lilis Gerakan UMKM Perikanan di Probolinggo	https://www.jawapos.com/ekonomi/013295232/inspirasi-kisah-lilis-gerakan-umkm-perikanan-di-probolinggo
73	11/18/2023	Menghidupkan Semangat Budidaya Ikan Mujair dengan Dukungan Dana LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/013298966/menghidupkan-semangat-budidaya-ikan-mujair-dengan-dukungan-dana-lpmukp
74	11/19/2023	Koperasi Jasa Berkah Tompo Galesong Menyulam Manfaat di Laut Takalar	https://www.jawapos.com/ekonomi/013304062/koperasi-jasa-berkah-tompo-galesong-menyulam-manfaat-di-laut-takalar
75	11/21/2023	Akses Permodalan LPMUKP Dorong Produktivitas Kampung Budidaya Bandeng Jepara	https://www.jawapos.com/ekonomi/013309953/akses-permodalan-lpmukp-dorong-produktivitas-kampung-budidaya-bandeng-jepara
76	11/22/2023	Irnawati Lanuru Bangkitkan Ekonomi Lokal Maluku Tengah Lewat Olahan Abon Tuna	https://www.jawapos.com/ekonomi/013312350/irnawati-lanuru-bangkitkan-ekonomi-lokal-maluku-tengah-lewat-olahan-abon-tuna
77	11/24/2023	Dorong Pengembangan Sektor Bahari Papua, LPMUKP Hadir di Perhelatan Sail Teluk Cenderawasih 2023	https://www.jawapos.com/ekonomi/013321671/dorong-pengembangan-sektor-bahari-papua-lpmukp-hadir-di-perhelatan-sail-teluk-cenderawasih-2023
78	11/30/2023	Manfaatkan Potensi Kerupuk Mba Pur Bawa Ekonomi Perempuan Demak Berdaya	https://www.jawapos.com/ekonomi/013347847/manfaatkan-potensi-kerupuk-mba-pur-bawa-ekonomi-perempuan-demak-berdaya
79	12/2/2023	Perjalanan Norman Nelayan yang Bertransformasi Menjadi Pengusaha Sukses di Bidang Perikanan	https://www.jawapos.com/bisnis/013353212/perjalanan-norman-nelayan-yang-bertransformasi-menjadi-pengusaha-sukses-di-bidang-perikanan
80	12/2/2023	Menyelami Kelezatan Ikan Kayu Kuliner Khas Aceh dengan Sejarah yang Unik	https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/013353971/menyelami-kelezatan-ikan-kayu-kuliner-khas-aceh-dengan-sejarah-yang-unik
81	12/18/2023	Dukungan Modal Ubah Keterbatasan Nelayan Gorontalo Jadi Kesuksesan	https://www.jawapos.com/ekonomi/013611052/dukungan-modal-ubah-keterbatasan-nelayan-gorontalo-jadi-kesuksesan
82	12/19/2012	Pokdakan Sinar Laut Jeneponto dari Budi Daya Rumput Laut Hingga Jajaki Pasar Eropa	https://www.jawapos.com/ekonomi/013637067/pokdakan-sinar-laut-jeneponto-dari-budi-daya-rumput-laut-hingga-jajaki-pasar-eropa

No	Tanggal	Judul	Sumber
83	12/26/2023	Transformasi Nelayan Morotai Hingga Dukungan Modal LPMUKP Ubah Nasib Sukardi Papatungan	https://www.jawapos.com/ekonomi/013656943/transformasi-nelayan-morotai-hingga-dukungan-modal-lpmukp-ubah-nasib-sukardi-papatungan
84	12/27/2023	Sukses Dari Empat Kolam Kecil Budi Mulyono Rambah Pemasaran Lele	https://www.jawapos.com/ekonomi/013658926/sukses-dari-empat-kolam-kecil-budi-mulyono-rambah-pemasaran-lele
85	12/27/2023	LPMUKP Sokong Strategi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia	https://www.jawapos.com/ekonomi/013659442/lpmukp-sokong-strategi-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan-indonesia
86	12/30/2023	Dari Pekerja Kayu ke nelayan Sukses: Kisah Gemilang Bachtiar Pina di Dunia Penangkapan Ikan	https://www.jawapos.com/ekonomi/013671789/dari-pekerja-kayu-ke-nelayan-sukses-kisah-gemilang-bachtiar-pina-di-dunia-penangkapan-ikan
87	12/30/2023	Perkuat Dampak Positif, Agus Bersama Pokdakan Ngupaya Mino Dukung Kemandirian Perikanan Dengan Dana Bergulir LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/013672053/perkuat-dampak-positif-agus-bersama-pokdakan-ngupoyo-mino-dukung-kemandirian-perikanan-dengan-dana-bergulir-lpmukp
88	12/31/2023	Catat Penyaluran Dana Tertinggi: LPMUKP Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	https://www.jawapos.com/ekonomi/013683564/catat-penyaluran-dana-tertinggi-lpmukp-dorong-pertumbuhan-ekonomi-kelautan-dan-perikanan
89	12/31/2023	KUD Karya Mina Dorong Kemajuan Nelayan Pantura Melalui Diversifikasi Unit Usaha	https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013682704/kud-karya-mina-dorong-kemajuan-nelayan-pantura-melalui-diversifikasi-unit-usaha
90	12/31/2023	Dukungan Dana LPMUKP Dorong Pemasar Ikan Kering di Pulau Jamea Selayar	https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013678144/dukungan-dana-lpmukp-dorong-pemasar-ikan-kering-di-pulau-jamea-selayar
91	12/31/2023	Dana Bergulir LPMUKP Dukung Akselerasi Program SFV KKP di Banyumas	https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013683536/dana-bergulir-lpmukp-dukung-akselerasi-program-sfv-kkp-di-banyumas

3.4.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2023

1) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal usaha KP

Pada Tahun 2023 LPMUKP telah menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, kegiatan tersebut meliputi kegiatan operasional dan non operasional yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir pada Tahun Anggaran 2023.

Pengelolaan Modal Usaha KP merupakan kegiatan utama BLU LPMUKP yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang seluruhnya bersumber dari PNBP BLU. Adapun Klasifikasi Rincian Output yang digunakan pada kegiatan pengelolaan modal usaha KP adalah Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (6453.BDG), Pengawasan dan Pengendalian Layanan (6453.BIF), Layanan Dukungan Manajemen Internal (6453.EBA), Layanan Saranan dan Prasarana Internal (EBB), Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (6453.FAE). Realisasi kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2023 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.35**.

Tabel 3.35 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Pagu	Total	Persentase
WA	Program Dukungan Manajemen	57.174.996.000	37.316.946.840	65,27%
WA.6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000	37.316.946.840	65,27%
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	11.273.112.000	5.590.001.974	49,59%
BDG.001	UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	11.273.112.000	5.590.001.974	49,59%
051	Dukungan Operasional Penyaluran Modal Usaha	7.357.000.000	3.671.492.762	49,90%
052	Layanan Pengelolaan Kemitraan dan Pendampingan Usaha	3.916.112.000	1.918.509.212	48,99%
BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.998.042.000	622.217.862	31,14%
BIF.001	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1.998.042.000	622.217.862	31,14%
051	Layanan Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Modal Usaha	1.998.042.000	622.217.862	31,14%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	41.197.127.000	30.149.537.204	73,18%
EBA.962	Layanan Umum	7.638.071.000	3.898.098.127	51,04%
051	Layanan Tata Usaha, Kepegawaian, Hukum dan Humas	6.158.120.000	3.759.962.627	61,06%
052	Layanan Perencanaan Strategis Bisnis dan Anggaran	1.479.951.000	138.135.500	9,33%
EBA.994	Layanan Perkantoran	33.559.056.000	26.251.439.077	78,22%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	33.559.056.000	26.251.439.077	78,22%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	295.000.000	40.600.000	13,76%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	295.000.000	40.600.000	13,76%
051	Layanan Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komputasi, Peralatan Perkantoran serta Peralatan dan Mesin	295.000.000	40.600.000	13,76%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2.411.715.000	914.589.800	37,92%
FAE.001	Laporan Pengelolaan Keuangan	955.900.000	418.942.200	43,83%
051	Layanan Operasional dan Pengelolaan Keuangan BLU	955.900.000	418.942.200	43,83%
FAE.002	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Usaha	576.100.000	435.360.700	75,57%
051	Layanan Pengawasan dan Pemeriksaan Intern	576.100.000	435.360.700	75,57%
FAE.003	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	879.715.000	60.286.900	6,85%
051	Layanan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	879.715.000	60.286.900	6,85%

2) Efisiensi Anggaran

Efisiensi sendiri memiliki arti penghematan sumber daya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma. Mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan rencana atau harapan.

Demikian dengan efisiensi anggaran dalam pencapaian keluaran atau output target pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2023. LPMUKP melakukan efisiensi anggaran dalam rangka menyelearkan antara

penggunaan sumber daya atau dalam hal ini merupakan anggaran dengan output yang dicapai. Pada prinsip penganggaran pun BLU dituntut untuk mengedepankan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang digunakan oleh LPMUKP sepanjang Tahun Anggaran 2023, dilakukan perhitungan sesuai dengan Tabel 3.36.

Tabel 3.36 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2023

(Dalam Rp.000,-)

No	Sasaran Kegiatan	NPSK*	Satker	Anggaran	Total Realisasi	%	% NPSK x Anggaran Per SK	% Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8=3x5	9=8-6
1	SK1 Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	93,62%	LPMUKP	57.174.996	37.316.946	65,27	53.527.231	16.210.284
Jumlah Anggaran SK1				57.174.996	37.316.946			
Total LPMUKP				57.174.996	37.316.946	65,27	53.527.231	16.210.284
							%Efisiensi =9/5	28,35%

*Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai efisiensi anggaran LPMUKP, diperoleh nilai sebesar 28,25%. Artinya LPMUKP masih mengupayakan pelaksanaan efisiensi anggaran pada Tahun 2023. Beberapa IKU yang khusus dilakukan efisiensi anggaran secara penuh adalah Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup LPMUKP, dimana dalam pencapaiannya LPMUKP hanya menerapkan monitoring pengisian aplikasi bitrix yang anggarannya sama sekali tidak diakomodir dalam RKAKL LPMUKP Tahun 2023. Selanjutnya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP, dan Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan yang pelaksanaannya menggunakan implementasi pengisian formulir secara *online* dengan memberdayakan tenaga pendamping di daerah, sehingga mampu untuk menghemat anggaran.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir Tahun Anggaran 2023, LPMUKP terus berupaya memberikan inovasi terhadap program penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun Anggaran 2023, LPMUKP telah memberikan komitmen pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat dengan total penyaluran dana bergulir sebesar Rp998.518.000,00 dengan total jumlah pemanfaat dana sebanyak 388 Debitur.

Perolehan PNBPN BLU secara umum telah melampaui target yang ditentukan, realisasi PNBPN BLU Tahun 2023 sebesar Rp61.228.283.450,08 yang terdiri atas pendapatan jasa layanan sebesar Rp22.019.837.486,10 dan pendapatan non jasa layanan sebesar Rp39.208.445.963,98.

Selanjutnya, LPMUKP dari sisi kesehatan pinjaman yang diukur dengan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dalam arti positif dalam realisasi yang bernilai baik secara performa dikarenakan pada pengukuran Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, semakin rendah nilainya maka semakin baik capaiannya atau dengan kata lain polarisasi pengukurannya adalah minimize. Dengan realisasi sebesar 7,33%.

Untuk mendukung pengelolaan BLU yang modern, LPMUKP memiliki Indikator Kinerja persentase penyelesaian modernisasi BLU dimana pada Taun 2023 LPMUKP telah berupaya dalam memenuhi variabel-variabel yang menjadi penilaian modernisasi BLU meskipun belum dapat tercapai dengan maksimal, variabel tersebut adalah Operasionalisasi BIOS, Penyediaan Website, Desain Sistem Informasi pada BLU yang Terintegrasi, Database Terpusat/Terintegrasi, Dashboard, dan SOP Pengelolaan IT.

Selain itu, dari sisi pencapaian kinerja aspek non layanan, LPMUKP juga telah mengupayakan optimalisasi realisasi untuk beberapa Indikator Kinerja yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP, Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 dan Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP.

Secara umum, capaian kinerja LPMUKP Tahun 2023, realisasi kinerja LPMUKP berdasarkan aplikasi kinerja adalah sebesar **93,62%** dan termasuk dalam kategori cukup baik. Indikator Kinerja yang capaiannya optimal adalah Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP, Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima

Pelatihan/Pendampingan, Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen yang Terstandar, Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasi Pengawasan, dan Penyelesaian Temuan BPK.

Dari 12 Indikator Kinerja yang menjadi target LPMUKP pada tahun 2023, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang tidak mencapai target yaitu realisasi PNPB Layanan BLU, Realisasi Penyaluran Dana Bergulir, Rasio Dana Bergulir Diragukan tertagih, Nilai SAKIP LPMUKP, Modernisasi BLU, dan Persentase Realisasi Anggaran.

2. Saran

Guna meningkatkan kinerja pada Tahun Anggaran selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan LPMUKP guna meningkatkan capaian kinerja dalam meningkatkan layanan pada program pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. LPMUKP agar melanjutkan penyaluran dengan proses *clean and clear* di awal usulan proposal serta terus mendukung atau menjalin sinergisitas program antara penyaluran dana bergulir dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pada Tahun 2024 LPMUKP agar melakukan penagihan terhadap jasa layanan yang masih menjadi piutang dengan upaya yang lebih optimal, serta meingkatkan jasa provisi dari realisasi pencairan dana bergulir di Tahun 2024.
3. Dalam rangka menekan rasio dana bergulir tertagih, LPMUKP agar dapat melakukan penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan upaya penagihan, penyelamatan, dan terakhir upaya penyelesaian pinjaman.
4. LPMUKP agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengisian SDM di bidang IT, terutama koordinasi dengan Pembina BLU, sehingga apabila dimungkinkan, LPMUKP agar merekrut SDM IT yang baru untuk menunjang modernisasi BLU.
5. Dalam upaya meningkatkan Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP, LPMUKP agar menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perbaikan di Tahun 2023 supaya di Tahun 2024, LPMUKP dapat memenuhi penilaian-penilaian yang bersifat administratif untuk meingkatkan nilai PM SAKIP.
6. Terkait dengan pelaksanaan realisasi anggaran LPMUKP akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran dan pencapaian output kegiatan dengan melaksanakan monitoring anggaran bulanan dan pencapaian target yang telah ditentukan dengan harapan dapat meningkatkan nilai realisasi penyerapan anggaran serta realisasi output sehingga tidak terjadi *overhead cost*.

Lampiran



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nengah Putra Winata**

Jabatan : Direktur LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Plh. Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP

Effin Martiana

I Nengah Putra Winata

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBPN Layanan BLU (Rp.)	30.000.000.000
		2	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	660.000.000.000
		3	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 3
		4	Modernisasi BLU (Nilai)	100
		5	Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP (Indeks)	80
		6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (Nilai)	93
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	82
		9	Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	92
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2022 lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	75
		12	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	90

Data Anggaran

No.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000
Total Anggaran LPMUKP Tahun 2023		57.174.996.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plh. Sekretaris Jenderal



Effin Martiana

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP



I Nengah Putra Winata



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I Nengah Putra Winata**

Jabatan : Direktur LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris Jenderal


Antam Novambar

Pihak Pertama
Direktur Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan


I Nengah Putra Winata

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBPN Layanan Badan Layanan Umum (Rp.)	30.000.000.000
		2	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Rp.)	660.000.000.000
		3	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 3
		4	Modernisasi Badan Layanan Umum (Nilai)	100
		5	Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80
		7	Nilai PM SAKIP Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	80,5
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	82
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	92
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	75
		12	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	90

Data Anggaran

No.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000
Total Anggaran LPMUKP Tahun 2023		57.174.996.000

Jakarta, 21 November 2023

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Jenderal


Antam Novambar

Pihak Pertama
Direktur Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan


I Nengah Putra Winata



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nengah Putra Winata

Jabatan : Direktur LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



I Nengah Putra Winata

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

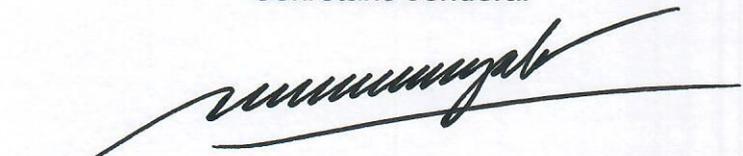
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp.)	30.000.000.000
		2	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	660.000.000.000
		3	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 3
		4	Modernisasi BLU (Nilai)	100
		5	Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP (Indeks)	80
		6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80
		7	Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	80,5
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	82
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	92
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	75
		12	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	90

Data Anggaran

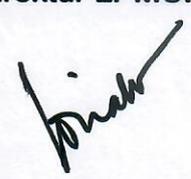
No.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000
Total Anggaran LPMUKP Tahun 2023		57.174.996.000

Jakarta, 13 Desember 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP


I Nengah Putra Winata

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : 005/MM/LPMUKP/I/2024

Yth : Sekretaris Jenderal KKP
Dari : Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Persentase PNBP Layanan BLU LPMUKP Tahun 2023
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 12 Januari 2024

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Persentase PNBP BLU periode Triwulan IV Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. PNBP Layanan merupakan pendapatan BLU yang bersumber dari pendapatan layanan berupa pendapatan atas tarif layanan sesuai PMK 100/PMK.05/2017. PNBP Layanan LPMUKP terdiri atas penerimaan jasa layanan dan penerimaan jasa provisi.
2. Target PNBP Layanan BLU pada level 1 dengan Indikator Kinerja berupa Persentase Realisasi PNBP Layanan BLU target yang disepakati adalah sebesar 97%. Sementara target PNBP pada level 2 dengan Indikator Kinerja berupa Realisasi PNBP Layanan BLU, target yang disepakati adalah sebesar Rp.30.000.000.000,00.
3. Realisasi PNBP Layanan BLU per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.019.837.486 dengan rincian pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pinjaman dana bergulir (424134) adalah sebesar Rp17.012.415.260, pendapatan dari jasa provisi pinjaman (424139) sebesar Rp5.007.422.226. Selain itu, sebetulnya terdapat nilai piutang atas pembayaran jasa layanan yang tidak tertagih pada Tahun 2023 sebesar Rp9.550.809.130, sehingga realisasi PNBP Layanan BLU per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi			Persentase
	Layanan	Macet	Total	
30.000.000.000	22.019.837.486	9.550.809.130	31.570.646.616	105,24%

Namun demikian, dalam manual IKU Realisasi PNBP Layanan dan Persentase Realisasi PNBP Layanan, perhitungan atas capaian PNBP Layanan, hanya diperhitungkan dari penerimaan jasa layanan dan penerimaan dari jasa provisi sehingga nilai capaian pada IKU level 01 dan level 02 adalah sebagai berikut:

Kontrak Kinerja	Uraian IKU	Target	Realisasi	Capaian
Level 01	Persentase Realisasi PNBP Layanan BLU	97%	73,40%	75,67%
Level 02	Realisasi PNBP Layanan BLU	30.000.000.000	22.019.837.486	73,40%

4. Permasalahan yang terjadi pada realisasi PNBP Layanan BLU yang bersumber dari jasa layanan dan provisi pada Triwulan IV berkaitan dengan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban debitur setelah mendapatkan pembiayaan akibat kegagalan usaha yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.
5. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi sepanjang periode Triwulan IV Tahun 2023, pada periode selanjutnya LPMUKP akan melaksanakan beberapa rencana aksi sebagai berikut:
 - a) Melakukan monitoring terhadap debitur-debitur yang telah dibiayai dengan tetap mengingatkan terkait dengan pembayaran jasa layanan maupun pembayaran pokok melalui SMS blast maupun melalui tenaga pendamping di daerah.
 - b) Menginventarisasi debitur-debitur yang memiliki piutang untuk kemudian dilakukan klasterisasi terhadap debitur-debitur yang menunggak. Sehingga diperoleh data berdasarkan kolektibilitas dan dari data tersebut akan dilakukan optimalisasi penagihan piutang dengan skala prioritas, terutama terhadap debitur yang memiliki nilai piutang jasa layanan yang tinggi. Terhadap debitur yang telah dilakukan proses penagihan dan tidak memiliki itikad yang baik, maka akan dilanjutkan kepada proses teguran, bahkan sampai dengan proses penyelesaian.
 - c) Optimalisasi jasa provisi dari pencairan dana bergulir di Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.



I Nengah Putra Winata

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Keuangan

Lampiran

Tabel 1. Rincian Target dan Realisasi PNBP Layanan BLU per Triwulan Tahun 2023

(dalam Rp000)

Uraian	Target Penerimaan 2022					Realisasi				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Persentase PNBP Layanan BLU	18,23%	26,35%	27,29%	25,13%	97,00%	15,38%	14,30%	18,16%	25,56%	73,40%
PNBP Layanan BLU (dalam Rp.000,-)	5.467.917	8.149.039	8.440.254	7.773.677	30.000.000	4.612.797	4.290.860	5.448.780	7.667.398	22.019.837

Tabel 2. Rincian Realisasi PNBP BLU per 31 Desember 2023

Bulan	424911	424134	424139	424916	424919	PNBP
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja. Modal BLU Tahun Anggaran. Yang Lalu	Pendapatan Lain-lain BLU	
Januari	1.348.007.421	86.955.000	3.263.540.224	8.000	-	4.698.510.645
Februari	1.449.818.673	81.600.000	3.320.363.915	123.083	-	4.851.905.671
Maret	1.316.026.580	330.390.000	3.079.745.281	699.065	-	4.726.860.926
April	1.138.514.144	171.300.000	2.774.523.418	(124.500)	-	4.084.213.062
Mei	1.325.476.910	166.875.000	3.122.363.652	-	-	4.614.715.562
Juni	1.302.619.652	186.075.000	2.650.331.346	(137.500)	-	4.138.888.498
Juli	1.376.198.444	515.274.000	3.020.460.257	(176.583)	-	4.911.756.118
Agustus	1.388.134.264	400.650.000	4.386.739.411	(232.759)	-	6.175.290.916
September	1.408.561.661	359.962.500	2.657.811.499	-	-	4.426.335.660
Oktober	1.792.300.071	152.706.750	3.405.447.887	-	-	5.350.454.708
November	1.851.426.366	418.934.250	3.487.284.063	-	-	5.757.644.679
Desember	1.315.331.074	2.136.699.726	3.938.601.141	455.064	100.620.000	7.491.707.005
Total	17.012.415.260	5.007.422.226	39.107.212.093	613.870	100.620.000	61.228.283.450

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : 006/MM/LPMUKP/1/2024

Yth : Sekretaris Jenderal KKP
Dari : Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Persentase Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2023
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 12 Januari 2024

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Penyaluran Dana bergulir periode Triwulan IV Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2023 diarahkan untuk mensukseskan/mendukung program prioritas KKP utamanya program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dan kampung budidaya. Pembiayaan difokuskan untuk diberikan kepada koperasi (koperasi nelayan, dan koperasi pembudidaya). Dimana koperasi yang dipilih adalah yang memiliki banyak anggota sehingga dana bergulir LPMUKP tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Bahwa saat ini disepakati untuk target Rp660.000.000.000 merupakan target komitmen pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk akad kredit antara LPMUKP dengan debitur.
3. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp998.518.000.000. Untuk rincian penyaluran dana bergulir per program terdapat pada Lampiran Memorandum.
4. Berdasarkan realisasi penyaluran dana bergulir per 31 Desember 2023, maka dapat kami sampaikan realisasi dan capaian terhadap target level 1 dan 2 sebagai berikut:

Kontrak Kinerja	Uraian IKU	Target	Realisasi	Capaian
Level 01	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir	80%	151,29%	189,11%
Level 02	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir	660.000.000.000	998.518.000.000	151,29%

5. Faktor keberhasilan pada pencapaian target penyaluran dana bergulir tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberlakuan proses *clean and clear* proposal diawal dan dukungan sistem *Loan Originating System (LOS)* berpengaruh kepada kecepatan proposal usulan pembiayaan yang diajukan oleh debitur kepada LPMUKP. Proses *clean and clear* membuat proposal yang diajukan harus sudah lengkap dan harus mempunyai rekomendasi hasil pengecekan karakter berdasarkan Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK). Kemudian, prosesnya juga telah melalui sistem *LOS* sehingga usulan tersebut dapat dimonitoring secara *online* oleh pendamping di daerah, maupun oleh LPMUKP di pusat.

- 2) Konsistensi dalam mendukung pembiayaan pada program prioritas KKP membuahkan hasil yang positif, dimana dukungan pembiayaan pada program prioritas relatif menyerap dana kelolaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan kepada perorangan. Pembiayaan pada program prioritas diberikan kepada koperasi atau kelompok yang memiliki anggota aktif dengan jumlah yang besar, agar pemanfaatan dana tersebut tetap dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, pembiayaan pada program prioritas juga lebih mudah untuk dimonitoring dikarenakan jumlah debiturnya (Koperasi/KUKP) akan relatif lebih sedikit.
 - 3) Inisiasi pelaksanaan penyaluran dana bergulir melalui pola aktif dimana strategi penyaluran, identifikasi, dan verifikasi dilakukan langsung oleh tim program prioritas yang berada di pusat.
6. Dengan ketercapaian target pada Tahun 2023, maka untuk mengoptimalkan realisasi penyaluran dana bergulir periode selanjutnya, LPMUKP akan melanjutkan strategi penyaluran dana bergulir yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP dengan menerapkan proses *clean and clear* proposal di awal, dukungan sistem *LOS*, serta mengedepankan penerapan pola penyaluran yang aktif yang langsung diinisiasi oleh pegawai pusat LPMUKP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.



I Nengah Putra Winata

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Keuangan

Lampiran

Tabel 1. Data Penyaluran Dana Bergulir Menurut Program Prioritas per 31 Desember 2023

No	Program/Sub Sektor Usaha	Jumlah Akad	Jumlah Debitur
1	Kampung Budidaya	142.477.000.000	13
	Perikanan Budidaya	142.477.000.000	13
2	Penangkapan Ikan Terukur	762.586.500.000	23
	Perikanan Tangkap	762.586.500.000	23
3	Ritel	93.454.500.000	352
	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	21.411.600.000	80
	Perikanan Budidaya	28.180.000.000	188
	Perikanan Tangkap	28.327.200.000	65
	Usaha Garam Rakyat	4.989.700.000	6
	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	10.546.000.000	13
	Total	998.518.000.000	388

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : 2/MM/LPMUKP.3/1/2024

Yth. : Direktur LPMUKP
Dari : Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Penyampaian Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2023
Tanggal : 12 Januari 2024

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran pada Indikator Kinerja Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih atau *Non Performing Loan (NPL)*, bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Nilai outstanding penyaluran dana bergulir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp874.548.562.835,46, sementara itu nilai tunggakan pokok yang telah dilakukan penyisihan mencapai Rp64.068.925.204 dengan rincian sebagai berikut:

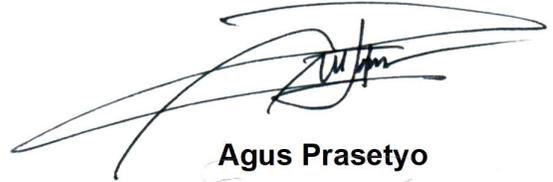
Kualitas	Jumlah
Lancar (Kolektibilitas 1)	636.442.777
Kurang Lancar (Kolektibilitas 2)	1.326.417.757
Diragukan (Kolektibilitas 3)	429.521.167
Macet (Kolektibilitas 4)	62.312.986.280
Nilai Tunggakan (Kolektibilas 2, 3, 4)	64.068.925.204
Total	64.705.367.981

- 2) Selanjutnya, sesuai dengan Manual IKU perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, untuk menghitung nilai *NPL* adalah dengan membagi antara nilai tunggakan sebesar Rp64.068.925.204 dibandingkan dengan nilai *Outstanding* sebesar Rp874.548.562.835,46, sehingga diperoleh nilai *NPL Nett* sebesar 7,33%.

- 3) Nilai NPL sebesar 7,33% tersebut mengalami penurunan sebesar 0,92% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 8,25%. Namun demikian hal tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan nilai *NPL* masih berada di atas target pada perjanjian kinerja yaitu sebesar 3%.
- 4) Nilai *NPL* tersebut disebabkan oleh beberapa hal sehingga berdampak terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban dari debitur kepada LPMUKP berupa pembayaran pokok pinjaman dan jasa layanan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, berikut kami jabarkan terkait dengan penyebab kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut diantaranya:
 - a) Terjadinya Pandemi *Covid* 19 yang berdampak kepada usaha kelautan dan perikanan khususnya dalam hal pemasaran baik local maupun ekspor.
 - b) Terdampak bencana alam (*force majeure*) seperti: rob (banjir) berkepanjangan, gempa bumi, badai dan gelombang tinggi, serta bencana lain yang menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana dalam berusaha.
 - c) Terjadinya kesalahan manajemen ataupun konflik internal dalam organisasi khususnya untuk pemanfaat yang berupa Kelompok Usaha, Koperasi, PT maupun yang berbentuk badan usaha lain yang mengakibatkan terganggunya proses produksi maupun usaha.
 - d) Semakin meningkatnya harga bahan baku (BBM, pakan, bibit, dll) yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga barang produksi sehingga margin semakin tipis.
- 5) Atas permasalahan tersebut, kami telah menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menurunkan rasio NPL dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mengirimkan pengingat (*reminder*) terhadap kewajiban serta tunggakan debitur melalui media elektronik berupa SMS Blast maupun WA Blast.
 - b) Mengirimkan Surat Penagihan, Surat Peringatan, ataupun Surat Teguran sesuai dengan kolektibilitas debitur sesuai dengan Perdir terkait Pengelolaan Piutang.
 - c) Melakukan pemanggilan terhadap debitur yang menjadi prioritas dalam penanganan piutang bermasalah.
 - d) Melakukan Zoom Meeting baik dengan pendamping ataupun dengan debitur untuk meminta konfirmasi dan komitmen terkait dengan pembayaran kewajiban tunggakan.

- e) Pemberian Surat Somasi kepada debitur yang berada di kolektibilitas 4 dimana debitur tersebut dirasa usahanya sudah tidak berjalan dan tidak memiliki itikad baik untuk selanjutnya dilimpahkan kepada PUPN/ KPKNL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.



Agus Prasetyo

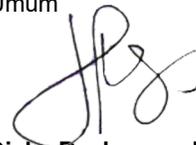
Hasil Perhitungan Capaian Penyelesaian Modernisasi BLU Tahun 2023

Tahap	Uraian	Skor per tahapan	Bobot (%)	Realisasi	Capaian (5x4)
1	2	3	4	5	6
I	Integrasi Data		40		0,8
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development				
	1) Permintaan secret key development	2		2	0,8
	2) Data terkirim pada server development	10			0
	3) Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler/automation</i>	8			0
	b. Pengembangan webservice pada Tahap Production				
	1) Permintaan secret key production	2			0
	2) Data terkirim pada server production	18			0
	c. Kelengkapan Pengiriman Data				
	1) Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari	30			0
2) Kelengkapan data terkirim	30			0	
II	Analitika Data		20		14
	a. Dashboard Layanan				
	1) Menampilkan kinerja layanan	12		12	2,4
	2) Jumlah pengguna layanan	3		3	0,6
	3) Trend pemberian layanan	3		3	0,6
	4) Hasil survey pengguna layanan	3			0
	5) Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	9			0
	b. Dashboard Keuangan				
	1) Menampilkan realisasi pendapatan dan belanja	6		6	1,2
	2) Menampilkan jumlah posisi saldo kas	6		6	1,2
	3) Menampilkan saldo rekening BLU	6			0
	4) Analisis data keuangan	6			0
	5) Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	6			0
	c. Dashboard SDM				
	1) Komposisi SDM	6		6	1,2
	2) Profil SDM	6		6	1,2
	3) Analisis kebutuhan pegawai	2		2	0,4
	4) Analisis beban kerja	2		2	0,4
	5) Analisis kinerja pegawai	2		2	0,4
	6) <i>Training need analysis</i>	2		2	0,4
	d. Dashboard Pendukung (2 dashboard)				
	Dashboard pendukung dibuat berdasarkan pedoman dashboard yang ada di komponen penilaian maturity rating.	20		20	4
III	Sistem Informasi Manajemen		20		16
	a. Sistem Informasi Keuangan				
	1) Pencatatan penerimaan	6		6	1,2
	2) Pencatatan pengeluaran	6		6	1,2
	3) Pencatatan saldo rekening	8		8	1,6
	b. Sistem Informasi Layanan				
	1) Pencatatan transaksi layanan utama	48		48	9,6
	2) Integrasi dengan sistem keuangan	12			0
	c. Sistem Informasi SDM				

	1) Pencatatan data SDM	12		12	2,4	
	2) Pencatatan perhitungan kinerja SDM	8			0	
IV	Website		10		10	
	a. Performa Website					
	1) Pengujian > 40% (bobot 100%)	40		40	4	
	2) Pengujian 20 % s.d. 40% (bobot 75%)					
	3) Pengujian < 20% (bobot 50%)					
	b. Fungsi Website					
	1) Informasi profil BLU	12			12	1,2
	2) Informasi layanan BLU	12			12	1,2
	3) Laporan tata Kelola BLU	12			12	1,2
	4) Fitur sarana pengaduan	12			12	1,2
5) Fitur survey layanan pengguna	12			12	1,2	
V	Operasionalisasi BIOS			10		10
	Kelengkapan Data pada Modul BIOS:					
	Profil	10		10	1	
	Data Layanan	10		10	1	
	Data Keuangan	10		10	1	
	Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategis	10		10	1	
	Bisnis					
	Pengelolaan Kinerja	10		10	1	
	Dokumentasi	10		10	1	
	Pembinaan	10		10	1	
	Dewas	10		10	1	
	Maturity Rating Assesment	10		10	1	
	Tarif dan Remunerasi	10		10	1	
				100		50,8

Jakarta, 11 Januari 2023

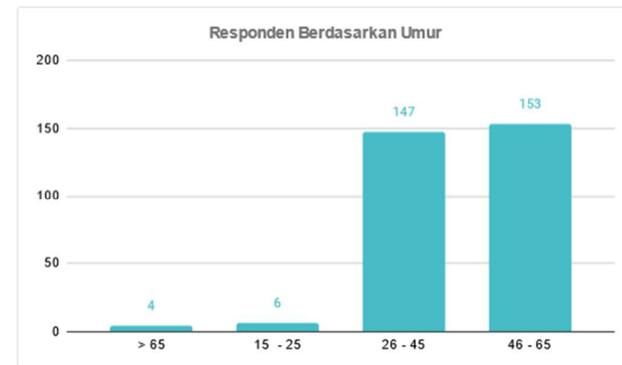
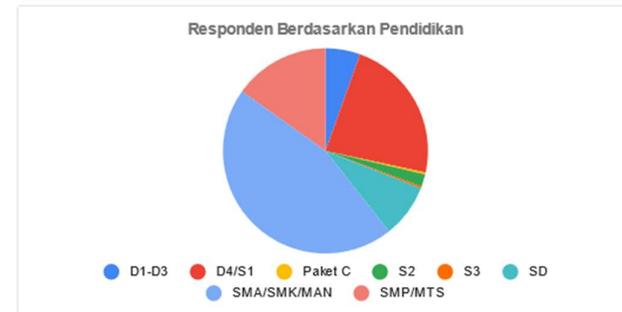
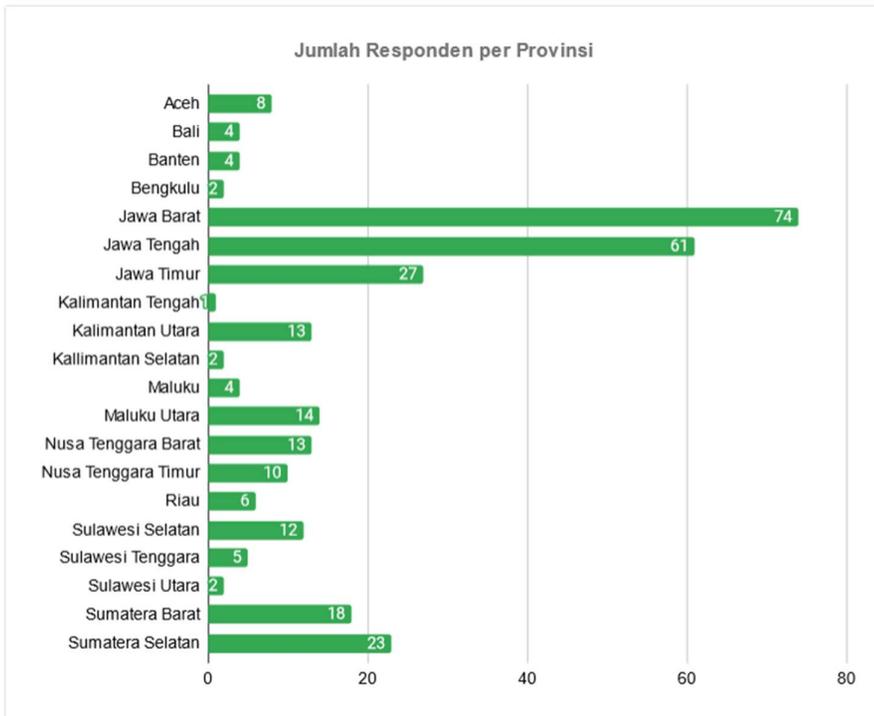
Kepala Divisi Perencanaan dan
Umum



Dicky Rachmanzah

RINGKASAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN PEMANFAAT ATAS LAYANAN LPMUKP TAHUN 2023

1. Profil Responden



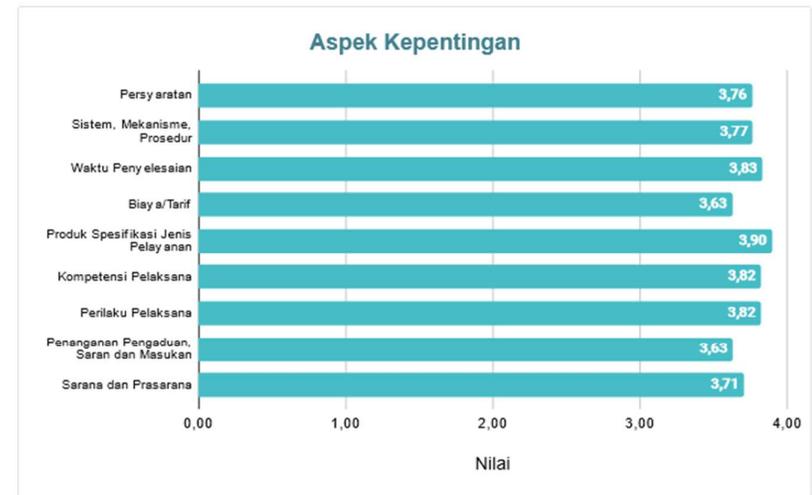
2. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

a. Nilai Indeks Kepuasan dan Kepentingan berdasarkan penialain unsur pertanyaan

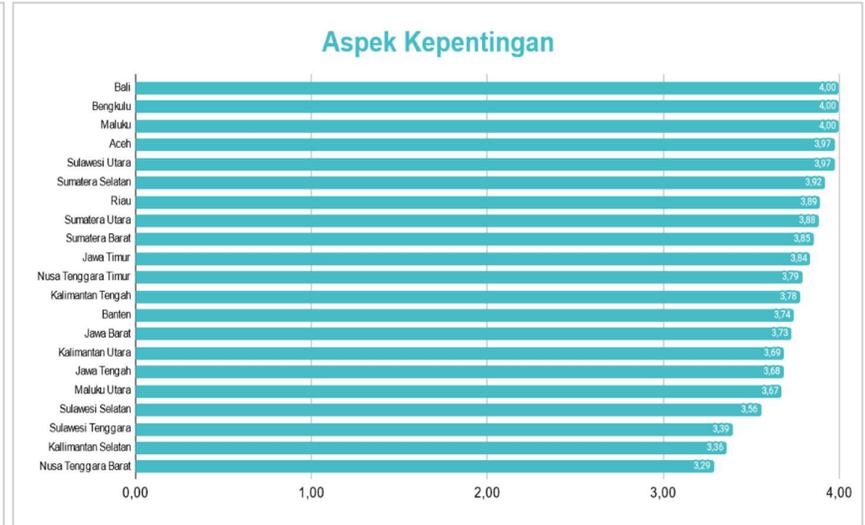
3,54



3,76



b. Nilai Indeks Kepuasan dan Kepentingan berdasarkan hasil penilaian per Provinsi



Mengetahui,

Kepala Divisi Perencanaan dan Umum

Dicky Rachmanzah

B. Pengolahan dan Analisa Data Hasil Survei

Pengolahan dan analisa data hasil survei dilakukan setelah pelaksanaan survei *online*. Pengolahan dan analisa data dilakukan oleh petugas pusat BLU LPMUKP yang dimuat dalam bentuk laporan kegiatan dan disampaikan kepada Pimpinan BLU LPMUKP. Berikut adalah hasil dari data survei peningkatan usaha berdasarkan sektor usaha sebagai berikut :

No	Nama Responden	Jenis Kelamin Responden	Umur Responden	Pendidikan Terakhir Responden	Sektor Usaha Debitur	Volume Produktivitas Sebelum Pinjaman	Volume Produktivitas Setelah Pinjaman	Volume Kenaikan Peningkatan Usaha	Persentase Peningkatan Usaha	Keterangan
1	Sutrisno	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	2.500	3.500	1.000	40%	Sudah Meningkat
2	Abdul Jabbar	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	65.000	85.000	20.000	31%	Sudah Meningkat
3	I Gst Nym Sadi Ari Putra	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Sarjana	Usaha Garam Rakyat	1.000	3.000	2.000	200%	Sudah Meningkat
4	Surono	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	1.500	2.500	1.000	67%	Sudah Meningkat
5	Moh Sidik Sopandi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	100	900	800	800%	Sudah Meningkat
6	Warjito	Laki-Laki	Usia >60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	800	1.500	700	88%	Sudah Meningkat
7	Alimin	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	150	300	150	100%	Sudah Meningkat
8	Totok Miharto	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	20.000	35.000	15.000	75%	Sudah Meningkat
9	Dzurrotus Sholbiyah	Perempuan	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	50	100	50	100%	Sudah Meningkat
10	Dede Haryanto	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	80	80	-	0%	Belum Meningkat
11	Aymuddin	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Sarjana	Perikanan Tangkap	20	30	10	50%	Sudah Meningkat
12	Hadaliy	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMP atau sederajat	Perikanan Tangkap	625	875	250	40%	Sudah Meningkat
13	Lugiyanto	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	50.000	80.000	30.000	60%	Sudah Meningkat
14	Dundan Muqoddas	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	300.000	600.000	300.000	100%	Sudah Meningkat
15	Rokhman	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	10	18	8	80%	Sudah Meningkat
16	Agus Rokhman	Laki-Laki	Usia 51-60 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	25	30	5	20%	Belum Meningkat
17	Mauludiyah	Perempuan	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	10	20	10	100%	Sudah Meningkat

18	Budi Mulyono	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	8	15	7	88%	Sudah Meningkatkan
19	Anim Wijaya	Laki-Laki	Usia >60 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	10.000	20.000	10.000	100%	Sudah Meningkatkan
20	Yokubus Heru Budiarmoko	Laki-Laki	Usia >60 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	2	4	2	100%	Sudah Meningkatkan
21	Arsvandi Matara	Laki-Laki	Usia 20-30 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	200	2.000	1.800	900%	Sudah Meningkatkan
22	Andrian Ika Setyawati	Perempuan	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	50	150	100	200%	Sudah Meningkatkan
23	Jamhur	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	19	21	2	11%	Belum Meningkatkan
24	Muhamad Hasan Basri	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	3.000	4.000	1.000	33%	Sudah Meningkatkan
25	Rajap L Ronaldo	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Usaha Masyarakat Pesisir	2	3	1	50%	Sudah Meningkatkan
26	Mustofa Syahid	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	25.760	52.000	26.240	102%	Sudah Meningkatkan
27	Yasiduhu Waruwu	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	150	250	100	67%	Sudah Meningkatkan
28	Riaman Zega	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	200	350	150	75%	Sudah Meningkatkan
29	Sarjono	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	25	50	25	100%	Sudah Meningkatkan
30	Benizaro Telaumbanua	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	150	350	200	133%	Sudah Meningkatkan
31	Faosokhi Zentrato	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	50	150	100	200%	Sudah Meningkatkan
32	Budianto	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	2.000	4.000	2.000	100%	Sudah Meningkatkan
33	Yudi Susilo	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	500	1.000	500	100%	Sudah Meningkatkan
34	Supriyadi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	8.000	10.000	2.000	25%	Belum Meningkatkan
35	Wiyono	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	50.000	80.000	30.000	60%	Sudah Meningkatkan
36	Ade Marzuki	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	800	1.100	300	38%	Sudah Meningkatkan
37	Amin Sunarto	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Diploma	Perikanan Budidaya	3.000	5.000	2.000	67%	Sudah Meningkatkan
38	Ridwan Rosadi	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	90	120	30	33%	Sudah Meningkatkan
39	Tona'Aro Zentrato	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	50	150	100	200%	Sudah Meningkatkan
40	Bambang Bahtiar	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	20.000	40.000	20.000	100%	Sudah Meningkatkan
41	Sujarwo	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	120.000	400.000	280.000	233%	Sudah Meningkatkan
42	A Syaifullah Hadi	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	15	25	10	67%	Sudah Meningkatkan
43	Giyatno	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	30	50	20	67%	Sudah Meningkatkan
44	Marsudi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	800	1.600	800	100%	Sudah Meningkatkan

45	Muryanto	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	8	12	4	50%	Sudah Meningkat
46	Miftahul Munir	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	28	35	7	25%	Belum Meningkat
47	Munawan Hasim	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	10	20	10	100%	Sudah Meningkat
48	Abdul Rahman	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	3.000	5.000	2.000	67%	Sudah Meningkat
49	Wening Indah Ingtyas	Perempuan	Usia 31-40 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	800	2.500	1.700	213%	Sudah Meningkat
50	Nurte Putra	Laki-Laki	Usia 20-30 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	1.100	1.500	400	36%	Sudah Meningkat
51	M Abdul Sonnif	Laki-Laki	Usia 20-30 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	2.000	2.800	800	40%	Sudah Meningkat
52	Abin	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	7.000	9.000	2.000	29%	Belum Meningkat
53	Hanafi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Diploma	Perikanan Budidaya	6.500	7.500	1.000	15%	Belum Meningkat
54	Kojala	Laki-Laki	Usia 51-60 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	500	1.000	500	100%	Sudah Meningkat
55	Abdul Ganing	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	500	700	200	40%	Sudah Meningkat
56	Susilawati	Perempuan	Usia 31-40 th	Diploma	Perikanan Budidaya	80	70	-10	-13%	Belum Meningkat
57	Devi Marliya	Perempuan	Usia 20-30 th	Diploma	Pengolahan dan Pemasaran	2	3	1	50%	Sudah Meningkat
58	Harsiyanto	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	1.000	2.400	1.400	140%	Sudah Meningkat
59	Aghaton Agustinus Suwardi	Laki-Laki	Usia >60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	900	1.750	850	94%	Sudah Meningkat
60	M.Hariyanto	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	900	1.500	600	67%	Sudah Meningkat
61	Priyo Santoso	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	250	400	150	60%	Sudah Meningkat
62	Pembuatan Perahu	Perempuan	Usia 20-30 th	Sarjana	Perikanan Tangkap	3	5	2	67%	Sudah Meningkat
63	Faqihuddin	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	80.000	130.000	50.000	63%	Sudah Meningkat
64	M.Hariyanto	Laki-Laki	Usia 51-60 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	50	200	150	300%	Sudah Meningkat
65	Ardiansyah	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	1.000	1.500	500	50%	Sudah Meningkat
66	Halima	Perempuan	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	5	15	10	200%	Sudah Meningkat
67	Supriyono	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	3	5	2	67%	Sudah Meningkat
68	Tatan	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	330	550	220	67%	Sudah Meningkat
69	Heri	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	1.000	2.000	1.000	100%	Sudah Meningkat

70	Roni Maholan	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Sarjana	Perikanan Tangkap	7.000	10.000	3.000	43%	Sudah Meningkat
71	Tri Indah R	Perempuan	Usia 20-30 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	20.000	25.000	5.000	25%	Belum Meningkat
72	Ujang Mardiansyah	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	95	150	55	58%	Sudah Meningkat
73	Sakirin	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Usaha Garam Rakyat	1.210	3.410	2.200	182%	Sudah Meningkat
74	Indra Widiyatmiko	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	1.200	2.300	1.100	92%	Sudah Meningkat
75	Suali	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	250	500	250	100%	Sudah Meningkat
76	Tubi Haryanto	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	300	550	250	83%	Sudah Meningkat
77	Suyono	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	1.200	2.500	1.300	108%	Sudah Meningkat
78	Ahmad Arius Aceh	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	50	150	100	200%	Sudah Meningkat
79	Yobi Herianto	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMP atau sederajat	Perikanan Tangkap	80	140	60	75%	Sudah Meningkat
80	Endang Rudiana	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Tangkap	1.000	5.436	4.436	444%	Sudah Meningkat
81	David Priharjo	Laki-Laki	Usia 20-30 th	Sarjana	Perikanan Tangkap	900	5.000	4.100	456%	Sudah Meningkat
82	Barkah Ma'Arif	Laki-Laki	Usia 51-60 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	25.000	32.000	7.000	28%	Belum Meningkat
83	Tumijan	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	9.000	15.000	6.000	67%	Sudah Meningkat
84	Mohammad Irfan	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	35	50	15	43%	Sudah Meningkat
85	Sukariyono	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	100	300	200	200%	Sudah Meningkat
86	Ojer Herdiana	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	85	136	51	60%	Sudah Meningkat
87	Rusdur Abrar	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	100.000	250.000	150.000	150%	Sudah Meningkat
88	Sarianto	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	2.000	4.000	2.000	100%	Sudah Meningkat
89	Ebrewez Virginiawan	Laki-Laki	Usia 20-30 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	50.000	80.000	30.000	60%	Sudah Meningkat
90	Suki	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	900	1.100	200	22%	Belum Meningkat
91	Sufiyati	Perempuan	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	100	250	150	150%	Sudah Meningkat
92	Hanafi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	1.000	3.000	2.000	200%	Sudah Meningkat
93	Jainur Manurung	Laki-Laki	Usia >60 th	Pasca Sarjana	Perikanan Tangkap	7	48	41	586%	Sudah Meningkat
94	Alim Baigawi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Diploma	Perikanan Tangkap	500	1.000	500	100%	Sudah Meningkat
95	Esau Kawa	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	200	800	600	300%	Sudah Meningkat
96	Magdalena Katarina Maubuti	Perempuan	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	100	600	500	500%	Sudah Meningkat

97	Turmudi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	800	900	100	13%	Belum Meningkatkan
98	Muttaqin	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	10	25	15	150%	Sudah Meningkatkan
99	Moch Ungg Najmudin	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	700	1.100	400	57%	Sudah Meningkatkan
100	Eras Rastani	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	30.000	50.000	20.000	67%	Sudah Meningkatkan
101	Nahor Kawa	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	200	600	400	200%	Sudah Meningkatkan
102	Hadi Sampurno	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Usaha Garam Rakyat	750	1.000	250	33%	Sudah Meningkatkan
103	Mudi	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Usaha Garam Rakyat	400	700	300	75%	Sudah Meningkatkan
104	Khoirun Nasihin	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Pasca Sarjana	Usaha Garam Rakyat	100	200	100	100%	Sudah Meningkatkan
105	Kasmanan	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Usaha Garam Rakyat	500	1.500	1.000	200%	Sudah Meningkatkan
106	Aprillia Eka S	Perempuan	Usia 41-50 th	Diploma	Perikanan Budidaya	300.000	500.000	200.000	67%	Sudah Meningkatkan
107	Sanongoni Zai	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMP atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	450	800	350	78%	Sudah Meningkatkan
108	Johan Angkat	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	10	25	15	150%	Sudah Meningkatkan
109	Ismail Sina	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	100	600	500	500%	Sudah Meningkatkan
110	Kemal Arafat Nasution	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	8	15	7	88%	Sudah Meningkatkan
111	Mulyanto	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	2.500	4.000	1.500	60%	Sudah Meningkatkan
112	H. Agus	Laki-Laki	Usia 51-60 th	Diploma	Usaha Masyarakat Pesisir	45.000	70.000	25.000	56%	Sudah Meningkatkan
113	Ahmad Zaini	Laki-Laki	Usia >60 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	1.500	3.500	2.000	133%	Sudah Meningkatkan
114	Jujum Jumhana	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	1.000	2.000	1.000	100%	Sudah Meningkatkan
115	Soltan P Laba	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	100	700	600	600%	Sudah Meningkatkan
116	Nurillah	Perempuan	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	130	143	13	10%	Belum Meningkatkan
117	Kanung Sanuri	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	300.000	500.000	200.000	67%	Sudah Meningkatkan
118	Raimundus Kewaru Kerans	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	400	500	100	25%	Belum Meningkatkan
119	Nurhayati	Perempuan	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	160	240	80	50%	Sudah Meningkatkan
120	H. Rahmad Hidayat R.	Laki-Laki	Usia 51-60 th	Pasca Sarjana	Perikanan Budidaya	100	200	100	100%	Sudah Meningkatkan
121	Sugiarto Budiono	Laki-Laki	Usia 51-60 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	2.000	5.000	3.000	150%	Sudah Meningkatkan
122	Irma Rusdiana	Perempuan	Usia 31-40 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	4.695	5.890	1.195	25%	Belum Meningkatkan

123	Kurdi	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	91	220	129	142%	Sudah Meningkat
124	Mochamad Choirudin	Laki-Laki	Usia 20-30 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	200	600	400	200%	Sudah Meningkat
125	Suwarno	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	10.000	25.000	15.000	150%	Sudah Meningkat
126	Algusriandi	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Sarjana	Usaha Masyarakat Pesisir	248	288	39	16%	Belum Meningkat
127	Tandra Sula	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	35	65	30	86%	Sudah Meningkat
128	Arman	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	100	400	300	300%	Sudah Meningkat
129	Muhamad Gilang Ramadhan	Laki-Laki	Usia 20-30 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	50.000	100.000	50.000	100%	Sudah Meningkat
130	Doris K	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	640	1.100	460	72%	Sudah Meningkat
131	Muhammad Safei	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	50	100	50	100%	Sudah Meningkat
132	Suratno	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMP atau sederajat	Perikanan Tangkap	5	10	5	100%	Sudah Meningkat
133	Nunung Hidayah	Perempuan	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	3	10	7	233%	Sudah Meningkat
134	Kadira	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	8.000	12.000	4.000	50%	Sudah Meningkat
135	Ir. Masbansa Sangadji	Laki-Laki	Usia >60 th	Sarjana	Perikanan Tangkap	55.000	110.000	55.000	100%	Sudah Meningkat
136	Binsar Edward Sianturi	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	25.000	35.000	10.000	40%	Sudah Meningkat
137	Alim Djalal	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	55.000	110.000	55.000	100%	Sudah Meningkat
138	Narto	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	150.000	168.000	18.000	12%	Belum Meningkat
139	Ifan Abd Rahman	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	8.000	24.000	16.000	200%	Sudah Meningkat
140	Dominggus Toge	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	5.000	10.000	5.000	100%	Sudah Meningkat
141	M Labib Langlang Buana	Laki-Laki	Usia 20-30 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	700	4.000	3.300	471%	Sudah Meningkat
142	Abdul Rauf	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	10.000	20.000	10.000	100%	Sudah Meningkat
143	Kamaruddin	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	10.000	20.000	10.000	100%	Sudah Meningkat
144	Nasruddin	Laki-Laki	Usia 41-50 th	Sarjana	Perikanan Tangkap	10.000	20.000	10.000	100%	Sudah Meningkat
145	Haji Ahmad Hm	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	10.000	15.000	5.000	50%	Sudah Meningkat
146	Kasmanta	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	9	24	15	167%	Sudah Meningkat
147	Suganda	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Budidaya	180	850	670	372%	Sudah Meningkat
148	Teguh Karya	Laki-Laki	Usia 20-30 th	Sarjana	Perikanan Budidaya	3.000.000	15.000.000	12.000.000	400%	Sudah Meningkat

149	Muhriji	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	800	2.000	1.200	150%	Sudah Meningkat
150	Dr.Biyati Ahwarumi	Perempuan	Usia 31-40 th	Pasca Sarjana	Usaha Garam Rakyat	1.000	50.000	49.000	4900%	Sudah Meningkat
151	Mushlih	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	1.000	2.000	1.000	100%	Sudah Meningkat
152	Masduki	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Perikanan Tangkap	60	80	20	33%	Sudah Meningkat
153	Irawati Usman	Perempuan	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	2.000	6.000	4.000	200%	Sudah Meningkat
154	Nasher Alzagladi	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	2.000	4.000	2.000	100%	Sudah Meningkat
155	Giyono	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	2.500	5.000	2.500	100%	Sudah Meningkat
156	Martunis	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	17.000	20.000	3.000	18%	Belum Meningkat
157	Rosad	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	1.500.000	1.800.000	300.000	20%	Belum Meningkat
158	Syamsuddin	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	50	80	30	60%	Sudah Meningkat
159	Rakhmat Safaat	Laki-Laki	Usia 20-30 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	3.600	3.900	300	8%	Belum Meningkat
160	Rudi harto	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SD atau sederajat	Perikanan Budidaya	200.000	230.000	30.000	15%	Belum Meningkat
161	Dina	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	1.560	2.050	490	31%	Sudah Meningkat
162	Opip	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Tangkap	4.480	6.160	1.680	38%	Sudah Meningkat
163	Erik	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Perikanan Tangkap	300	500	200	67%	Sudah Meningkat
164	Madiyah	Laki-Laki	Usia 51-60 th	SD atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	35	50	15	43%	Sudah Meningkat
165	Bai Basri Bela	Laki-Laki	Usia 31-40 th	SMA atau sederajat	Pengolahan dan Pemasaran	2.000	6.000	4.000	200%	Sudah Meningkat
166	Burhan A. Landa	Laki-Laki	Usia 31-40 th	Sarjana	Pengolahan dan Pemasaran	3.000	8.000	5.000	167%	Sudah Meningkat
167	Heru mulyo	Laki-Laki	Usia 41-50 th	SMP atau sederajat	Perikanan Budidaya	50.000	100.000	50.000	100%	Sudah Meningkat
TOTAL						6.907.311	21.121.251	14.213.939	150%	
Total Average Persentase Produktivitas Usaha									150%	Persentase
Debitur yang Peningkatan Usaha < 30 %									21	Orang
Debitur yang Peningkatan Usaha > 30 %									146	Orang
Total Keseluruhan Debitur yang disurvei									167	Orang
Indeks Persentase Survei Peningkatan Usaha									87,43%	Persentase

Tabel 3.7. Tabel Hasil Survei Peningkatan Usaha

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023

Kepada : 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kepala Biro Umum dan PBJ
4. Kepala Biro Humas dan KLN
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
7. Direktur LPMUKP
8. Kepala BPISDKP

Dari : Kepala Biro Perencanaan

Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 14 Desember 2023

Dalam rangka Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri dilakukan berpedoman pada Permen PAN RB 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup evaluasi mencakup :
 - a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
 - b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
 - c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. Penilaian Mandiri level II Lingkup Setjen telah dilakukan bersama dengan Inspektorat I dengan melakukan verifikasi terhadap 4 komponen penilaian Evaluasi SAKIP dengan menggunakan aplikasi kinerjaku yang memiliki bobot masing-masing komponen. Hasil verifikasi sebagai berikut :

a. Komponen dan Bobot Penilaian

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja	6	9	15	30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
Total	20	30	50	100

Sumber: Hasil Verifikasi PM SAKIP di Aplikasi Kinerjaaku

b. Hasil Verifikasi Penilaian Mandiri

No	Unit Kerja	Nilai Akuntabilitas					Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	
1	Biro Perencanaan	27,60	24,00	13,80	20,00	85,40	A
2	Biro SDMAO	25,80	24,60	13,80	20,50	84,70	A
3	Biro Hukum	27,00	24,60	13,50	22,50	87,60	A
4	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	25,20	24,00	11,10	23,00	83,30	A
5	Biro Keuangan	27,00	24,00	12,00	22,50	85,50	A
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	24,60	23,70	12,75	19,25	80,30	A
7	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	27,90	24,00	12,75	22,50	87,15	A
8	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A
9	Lembaga Pengelola Modal Usaha KP	22,20	22,80	11,10	18,50	74,60	BB

3. Untuk perbaikan implementasi SAKIP kedepan, hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama antara lain :

- a. Mendorong penyempurnaan perencanaan kinerja untuk lebih memastikan adanya keselarasan perencanaan kinerja antara Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, merumuskan tujuan dan sasaran yang berorientasi outcome pada level kinerjanya dan indikator kinerja yang lebih SMART untuk mengukur keberhasilan kinerja yang ditetapkan dan menetapkan target kinerja yang lebih realistis dan *achievable*.
- b. Mereviu kembali penjenjangan kinerja untuk memastikan hubungan antara level kinerja disusun dengan mempertimbangkan CSF (*Critical Success Factor*) dengan cara memastikan tidak terjadi penetapan kinerja yang

berulang antar level kinerja, sehingga hubungan antar level kinerja dapat *terbentuk sebab-akibatnya*.

- c. Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matrik pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks tersebut dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi.
- d. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- e. Mendorong komitmen pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan *feedback* perbaikan sebagai bentuk *controlling* pimpinan unit kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.
- f. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, dengan menyajikan informasi detail pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan.
- g. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja.
- h. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja.
- i. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Andy Artha Donny Oktopura

Tembusan Yth.
Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor 83/SJ.2/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Umum dan PBJ
3. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Perikanan
4. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Menindaklanjuti memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor.2/SJ.1/RC610/2024 tentang Penyampaian Data Capaian Indikator Kinerja (IK) Manajerial Triwulan IV tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2024, dengan ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 sebagai berikut:

1. Proses mengunduh (*download*) data capaian IK NKA triwulan IV tahun 2023 berdasarkan data SMART DJA per tanggal 10 Januari 2024 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 54/SJ.2/TU.210/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.
2. Capaian nilai IK NKA Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 2023 sebesar 90,84, seluruh Unit Eselon I **telah mencapai target** yang telah ditetapkan sebesar 86,00 terdapat Satuan Kerja (Satker) **tidak mencapai target** sebesar 82,00 (terlampir).
3. Berikut kami sampaikan data capaian IK NKA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKA pada triwulan IV tahun 2023 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

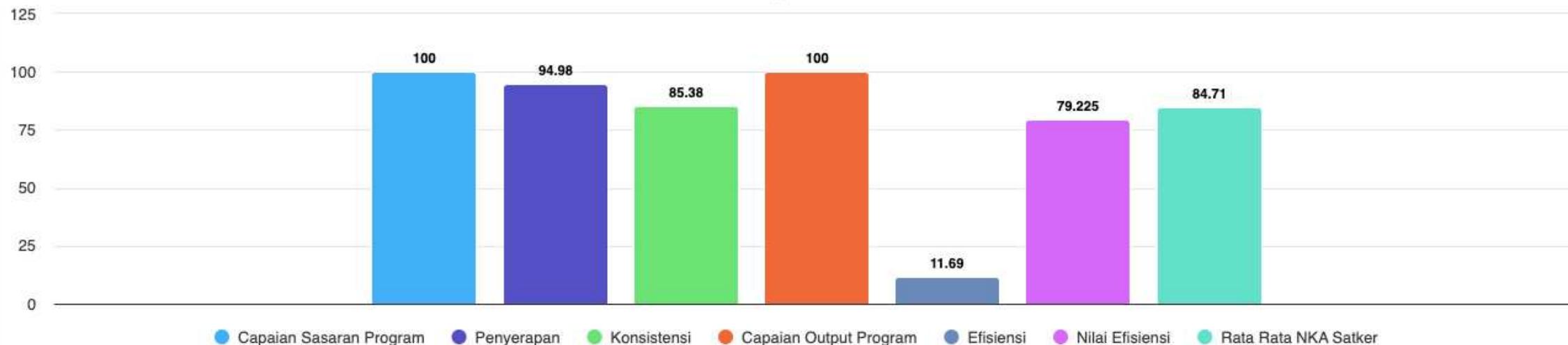
Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nilai Kinerja

90.84

Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023



NKA Satuan Kerja

Monitoring / NKA Satker

[Download Excel](#)Tampilkan entriCari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	Kinerja ↑↓	Penyerapan ↑↓	Konsistensi ↑↓	CRO ↑↓	Efisiensi ↑↓	Nilai Efisiensi ↑↓
1	010076	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	85,66	88,86	61,92	100,00	11,14	77,86
2	026221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	85,35	99,15	95,19	100,00	0,85	52,13
3	030012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	86,49	96,83	93,61	100,00	3,17	57,92
4	040093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	85,48	99,95	98,61	100,00	0,05	50,13
5	050064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	82,52	99,58	81,12	100,00	0,42	51,04
6	060032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	83,51	98,52	82,93	100,00	1,48	53,71
7	070044	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	83,07	86,82	40,83	100,00	13,18	82,94
8	080007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	78,87	95,12	45,88	100,00	4,88	62,21
9	090099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	86,18	99,09	99,58	100,00	0,91	52,26
10	100094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	81,42	100,00	76,51	100,00	0,00	50,00
11	110098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	83,49	99,26	85,34	100,00	0,74	51,84
12	120099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	85,50	99,85	98,43	100,00	0,15	50,36
13	130095	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	86,71	98,03	98,86	100,00	1,97	54,91
14	140097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	81,08	99,58	73,22	100,00	0,42	51,04
15	150098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	87,76	96,12	98,14	100,00	3,88	59,70
16	160094	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	84,84	98,02	88,53	100,00	1,98	54,95
17	175355	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	85,33	99,99	97,94	100,00	0,01	50,02
18	180091	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	85,53	100,00	99,05	100,00	0,00	50,00



NKA Satuan Kerja

Monitoring / NKA Satker

[Download Excel](#)Tampilkan entriCari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	Kinerja ↑↓	Penyerapan ↑↓	Konsistensi ↑↓	CRO ↑↓	Efisiensi ↑↓	Nilai Efisiensi ↑↓
19	190091	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	78,76	99,47	60,08	100,00	0,53	51,32
20	200093	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	85,70	99,98	99,92	100,00	0,02	50,06
21	210055	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	85,74	98,43	94,87	100,00	1,57	53,93
22	225127	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	86,09	98,38	96,60	100,00	1,62	54,06
23	235221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	85,72	99,96	100,00	100,00	0,04	50,10
24	249001	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	94,32	99,34	69,13	100,00	20,00	100,00
25	250069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	80,31	100,00	70,37	100,00	0,00	50,00
26	260059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	83,05	97,33	76,35	100,00	2,67	56,69
27	280049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	84,04	94,44	71,98	100,00	5,56	63,90
28	290095	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	82,13	99,89	80,00	100,00	0,11	50,28
29	300078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	78,19	99,92	58,47	100,00	0,08	50,20
30	310046	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	85,63	100,00	99,63	100,00	0,00	50,00
31	320014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	89,28	100,00	41,08	100,00	20,00	100,00
32	330036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	82,19	100,00	80,71	100,00	0,00	50,00
33	340048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	82,36	99,96	81,49	100,00	0,04	50,10
34	417747	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA	86,74	97,95	98,75	100,00	2,05	55,13
35	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	83,43	99,21	84,86	100,00	0,79	51,98
36	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	87,40	97,17	99,73	100,00	2,83	57,07
37	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,54	51,49	95,88	100,00	20,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 37 dari 37 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 20/SJ.7/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Humas Kerjasama Luar Negeri
3. Kepala Biro Keuangan
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Biro Umum dan PBJ
7. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Hal : Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023

Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Tanggal : 3 Januari 2024

Dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian akhir IKU MP Sekretariat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2023:

1. Penilaian capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan IV Tahun 2023 menggunakan *platform* Portal *Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).
2. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar **133,33%**. Capaian tersebut diperoleh dari 7 (tujuh) satuan kerja dan LPMUKP dengan nilai masing-masing **133,33%**.
3. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 adalah sebesar **112,59%**. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2023. Nilai tertinggi adalah sebesar **116,67%** berhasil dicapai oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Pusat Data, Statistik dan Informasi.
4. Target capaian IKU MP Sekretariat Jenderal Tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebesar 92%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aulia Riza Farhan

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Memorandum
 Nomor : 20/SJ.7/TU.210/I/2024
 Tanggal : 3 Januari 2024

Capaian IKU MP Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Triwulan				Capaian	Target	% Capaian
		I	II	III	IV			
1	Biro Perencanaan	100,00	100,00	116,67	133,33	112,50	92,00	122,28
2	BHKLN	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
3	Biro Keuangan	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
4	BSDMAO	100,00	99,68	100,00	133,33	108,25	92,00	117,67
5	Biro Hukum	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
6	Biro Umum dan PBJ	92,59	98,25	100,00	133,33	106,04	92,00	115,26
7	Pusdatin	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
8	LPMUKP	100,00	100,00	100,00	133,33	108,33	92,00	117,75




CAPAIAN AKHIR IKU MANAJEMEN PENGETAHUAN

Triwulan IV Tahun 2023





CAPAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Capaian MP KKP per Triwulan Tahun 2023

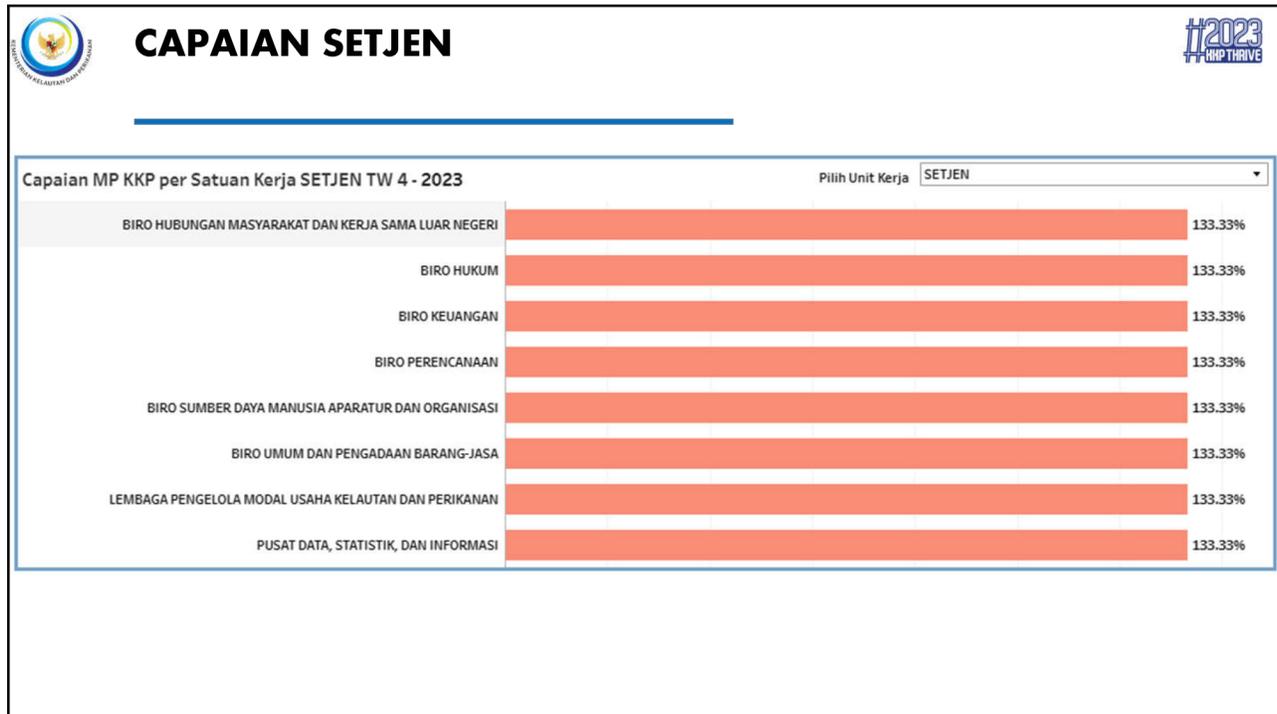


Triwulan	Capaian (%)
TW 1	0.00%
TW 2	0.00%
TW 3	124.65%
TW 4	129.51%
Rata-rata	0.00%

Capaian MP KKP per Unit Kerja TW 4 - 2023



Unit Kerja	Capaian (%)
BPPMHKP	125.00%
BPPSDMKP	133.33%
ITJEN	122.22%
DJPSPKP	126.67%
DJPB	130.00%
DJPT	133.33%
DJPKRL	130.00%
SETJEN	133.33%



Capaian SETJEN

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA SATKER	NILAI SAAT INI	STATUS
1	ARI PRABOWO	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ...	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA S...	4	Memenuhi
2	EFFIN MARTIANA	KEPALA BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	4	Memenuhi
3	SETYAWATI	KEPALA BIRO KEUANGAN	BIRO KEUANGAN	4	Memenuhi
4	IR. I NENGAH PUTRA WINATA	DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAH...	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUT...	4	Memenuhi
5	MIAZWIR	KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARAN...	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	4	Memenuhi
6	ANDY ARTHA DONNY OKTOPURA	KEPALA BIRO PERENCANAAN	BIRO PERENCANAAN	4	Memenuhi
7	RIZA TRIANZAH	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARA...	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN...	4	Memenuhi
8	AULIA RIZA FARHAN	KEPALA PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORM...	PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	4	Memenuhi



Terima Kasih

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 1717/SJ.2/RC.610/X/2023

Yth. : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
6. Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
8. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Biro Keuangan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022”

Tanggal : 12 Oktober 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan III Tahun 2023 dan berkenaan dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022” diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2022 yang dibandingkan dengan besarnya realisasi anggaran Unit Kerja di lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2022.
2. Berkenaan dengan temuan di lingkup Sekretariat Jenderal pada Tahun 2022 bersifat manajerial tidak ada yang bernilai material maka capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022” sebesar 0,01% (target yang ditetapkan sebesar $\leq 1\%$).

3. ...

3. Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022” mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan terutama pertanggungjawaban belanja, agar laporan keuangan dapat disajikan secara memadai baik dari segi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Lampiran Memorandum
Nomor : 1717/SJ.2/RC.610/X/2023
Tanggal : 12 Oktober 2023

Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022” Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Biro Umum dan PBJ	475.510.832.637	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Umum dan PBJ	-	38.200.599,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Perencanaan	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Keuangan	-	30.281.900,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Hukum	-	-	≤1	0,00	0
	Biro SDMAO	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Humas dan KLN	-	-	≤1	0,00	0
	Pusdatin	-	-	≤1	0,00	0
2.	LPMUKP	41.467.114.758	-	≤1	0,00	101,00
3.	DEKONSENTRASI	5.873.164.774	-	≤1	0,00	101,00
	TOTAL	522.851.112.169,00	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99

Keterangan:

1. Realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
2. Nilai temuan BPK atas LK Sekretariat Jenderal Tahun 2022
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
4. Perhitungan % capaian adalah $[1+(1 - \text{realisasi/target})]*100$

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 86/SJ.2/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro
2. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
3. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Badan Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Sehubungan dengan Surat Inspektur Jenderal Nomor B.267/ITJ.1/HP.510/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Setjen, dapat kami sampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2023 yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal KKP. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2023, bersama ini disampaikan Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" periode Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 99.12% (telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 112 rekomendasi dari 113 rekomendasi).
2. Pencapaian ini diperoleh berdasarkan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Unit Kerja Lingkup Setjen pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan Desember 2023.
3. Capaian IKU dari masing-masing Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Memorandum
Nomor : 86/SJ.2/TU.210/I/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

**Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1.	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2.	Biro Keuangan	12	12	100,00	0	00,00
3.	Biro Umum dan PBJ	18	18	100,00	0	00,00
4.	Biro Hukum	16	16	100,00	0	00,00
5.	Biro SDMAO	24	24	100,00	0	00,00
6.	Biro Humas dan KLN	1	1	100,00	0	00,00
7.	PUSDATIN	7	7	100,00	0	00,00
8.	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00
TOTAL		113	112	99,12	1	00,88



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	660056 LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	56,879,996,000 37,276,346,840 (65.54%)	295,000,000 40,600,000 (13.76%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	57,174,996,000 37,316,946,840 (65.27%)
		SISA	0	19,603,649,160	254,400,000	0	0	0	0	0	0	19,858,049,160
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	56,879,996,000 37,276,346,840 (65.54%)	295,000,000 40,600,000 (13.76%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	57,174,996,000 37,316,946,840 (65.27%)
		SISA	0	19,603,649,160	254,400,000	0	0	0	0	0	0	19,858,049,160